



RENSTRA

2018 - 2023



DINAS KELAUTAN & PERIKANAN

PROVINSI SULAWESI SELATAN



GUBERNUR SULAWESI SELATAN
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR 30 TAHUN 2019
TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, dan Pasal 123 ayat (1) Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102), Jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010, Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019, Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018-2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Pasal 2

- (1) Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2018-2023.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 3

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 sebagaimana dimaksud pada pasal 2 terdiri atas Rencana Strategis Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut :
- a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Inspektorat Daerah;
 - d. Dinas Pendidikan;
 - e. Dinas Kesehatan dan RSUD/RSK BLUD;
 - f. Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang;
 - g. Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi;
 - h. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan;
 - i. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - j. Dinas Sosial;
 - k. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - l. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - m. Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - n. Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah;
 - o. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - p. Dinas Perhubungan;
 - q. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
 - r. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - s. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Daerah;
 - t. Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - u. Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata;
 - v. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 - w. Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - x. Dinas Perkebunan;
 - y. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - z. Dinas Kehutanan;
 - aa. Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral;
 - bb. Dinas Perindustrian;
 - cc. Dinas Perdagangan;
 - dd. Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - ee. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - ff. Badan Pengelola Keuangan Daerah;
 - gg. Badan Pendapatan Daerah;
 - hh. Badan Kepegawaian Daerah;

- ii. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- jj. Badan Penelitian Pembangunan Daerah;
- kk. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- ll. Badan Penghubung Daerah;
- mm. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

(2) Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

BAB II KETENTUAN PENUTUP

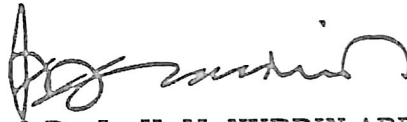
Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada April Tahun 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 15 Juli 2019

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,



Prof. Dr. Ir. H. M. NURDIN ABDULLAH, M.Agr.

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 15 Juli 2019

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN,**




DR. ABDUL HAYAT, M.Si.

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019 NOMOR 30

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat-Nya sehingga dapat diselesaikannya “**Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2018-2013**” sebagai dokumen Perencanaan pelaksanaan Pembangunan Kelautan dan Perikanan tahun 2018-2023 dengan mengacu pada RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2018-2023 dan Rancangan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023.

Renstra ini disusun untuk menjadi acuan dalam merencanakan dan merumuskan program dan kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2018-2023 dan menjadi kontribusi terhadap pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan terutama pada sektor perikanan dan kelautan. Segala dukungan dari semua pihak sangat diharapkan, baik dari stakeholder dan instansi terkait lainnya dalam mensukseskan pembangunan kelautan dan perikanan Sulawesi Selatan.

Atas segala masukan dan sumbangan pemikiran semua pihak sehingga dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja ini dapat terselesaikan, disampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi. Semoga Renstra ini bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan pembangunan kelautan dan perikanan di Provinsi Sulawesi Selatan.

Makassar, Desember 2018

**KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN**



Ir. SULKAF S. LATIEF, MM.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR, TABEL, DAN LAMPIRAN	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	6
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	6
2.2 Sumber Daya Dinas Kelautan dan Perikanan	13
2.3 Kinerja Pelayanan	19
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan	34
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI.....	36
3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi	36
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	38
3.3 Telaahan Renstra Kementerian	40
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	42
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	50
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	51
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah.....	51
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	54
5.1 Strategi dan Arah Kebijakan.....	54
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	56
6.1 Program dan Kegiatan	56
BAB VII INDIKATOR KINERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	72
BAB VIII PENUTUP.....	88

DAFTAR GAMBAR, TABEL, DAN LAMPIRAN

A. DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Selatan	Provinsi	12
----------	---	----------	----

B. DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Struktur Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan.....		13
Tabel 2.2	Struktur Diklat PIM 2013-2017.....		13
Tabel 2.3	Jumlah Jabatan Struktural.....		14
Tabel 2.4	Struktur Pegawai Menurut Tingkat Kepangkatan dan Golongan.....		14
Tabel 2.5	Distribusi Sumberdaya Pegawai.....		15
Tabel 2.6	Kondisi Sarana Pelabuhan Perikanan di Sulawesi Selatan.....		16
Tabel 2.7	Sarana dan Prasarana Pendukung Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sulawesi Selatan.....	Provinsi	18
Tabel 2.8	Produksi Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017.....		19
Tabel 2.9	Volume Produksi Perikanan Budidaya Provinsi Sulawesi Selatan.....		20
Tabel 2.10	Volume Produksi Perikanan Tangkap Provinsi Sulawesi Selatan.....		20
Tabel 2.11	Volume Produksi Olahan Provinsi Sulawesi Selatan.....		21
Tabel 2.12	Produksi Komoditi Unggulan Provinsi Sulawesi Selatan.....		22
Tabel 2.13	Volume, Nilai Ekspor Produksi Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017.....		23
Tabel 2.14	Rata-Rata Konsumsi Ikan Tahun 2013-2017.....		24
Tabel 2.15	Perkembangan Nilai Tukar Nelayan Sulawesi Selatan Periode 2013-2017.....	Tahun	24
Tabel 2.16	Luas dan Tipe Kawasan Konservasi Perairan Tahun 2013-2017.....		25
Tabel 2.17	Jumlah Pulau-Pulau Kecil yang Dikelola Tahun 2013-2017.....		26
Tabel 2.18	Capaian Kinerja Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Tahun 2013-2017.....		27
Tabel 2.19	Capaian Kinerja Kelompok Pengawas yang Aktif Tahun 2013-2017.....		27
Tabel 2.20	Pengembangan SDM Aparat dan Masyarakat Usaha Perikanan (Berbasis Gender) Dalam Mendukung Peningkatan Produksi Perikanan Tahun 2013-2017		28
Tabel 2.21	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan.....	Provinsi Sulawesi	30
Tabel 2.22	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan.....	Provinsi Sulawesi	33
Tabel 3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan.....		36
Tabel 3.2	Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal).....		38

Tabel 3.3	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.....	39
Tabel 3.4	Komparasi Capaian Sasaran Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018.....	40
Tabel 3.5	Permasalahan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.....	42
Tabel 3.6	Permasalahan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Telaaha Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.....	47
Tabel 3.7	Permasalahan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.....	49
Tabel 3.8	Penilaian Isu Strategis terhadap kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan skala.....	53
Tabel 3.9	Skor Kriteria penentuan isu strategis.....	54
Tabel 3.10	Rata-rata skor isu-isu strategis.....	54
Tabel 4.1	Penyusunan Penjelasan Visi.....	55
Tabel 4.2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sulawesi Selatan.....	56
Tabel 4.3	Penentuan Strategi.....	58
Tabel 4.4	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.....	59
Tabel 5.1	Alur Pikir Penetapan Indikator Kinerja.....	75
Tabel 6.1	Indikator Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sulawesi Selatan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2018-2023.....	87

C. DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran :	Usulan Program Kegiatan Pembangunan Kelautan dan Perikanan Tahun 2014-2018 Satuan Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan	79
------------	--	----



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018-2023 merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin di capai dalam kurun waktu 1 (Satu) tahun sampai dengan 5 (Lima) tahun dan disusun berdasarkan pemahaman terhadap lingkungan strategik baik dalam skala nasional, regional maupun lokal dengan memperhitungkan potensi, peluang dan tantangan yang ada atau timbul serta memuat visi dan misi sebagai penjabaran dalam membina unit kerja serta kebijaksanaan sasaran dan prioritas sasaran dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023. Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan memuat **Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program Pembangunan Daerah, Program Prioritas dan Kegiatan Pembangunan** yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta berpedoman kepada RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2018-2023 yang bersifat indikatif, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Salah satu indikator makro ekonomi pada pembangunan Kelautan dan Perikanan Sulawesi Selatan adalah pertumbuhan produksi perikanan. Indikator ini diarahkan untuk mendukung kebijakan **Hilirisasi Komoditas Unggulan Sulawesi Selatan** dalam rangka merespon kebijakan pembangunan daerah dan pembangunan nasional yaitu **Kemaritiman dan Kelautan**. Selama kurun waktu 2013-2017, data pertumbuhan produksi perikanan Sulawesi Selatan mengalami pertumbuhan positif terutama pada Usaha Perikanan Budidaya, namun sejalan pencapaian pertumbuhan produksi di beberapa daerah masih terdapat beberapa permasalahan baik secara teknis, sosial dan lingkungan.

Oleh karena itu Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus mendorong peningkatan pertumbuhan produksi dengan fokus pada peningkatan produksi perikanan budidaya, sementara pada pemanfaatan sumberdaya perikanan tangkap diupayakan melalui pengembangan sarana dan prasarana teknologi penangkapan ikan yang ramah lingkungan. Adapun Produksi Perikanan Sulawesi Selatan bersumber dari usaha perikanan penangkapan (Laut & Perairan Umum) dan usaha perikanan

RENCANA STRATEGIS 2018 – 2023

budidaya (Laut, Tambak, Kolam dan Sawah). Belum optimalnya pencapaian tingkat produktifitas usaha perikanan budidaya dan usaha penangkapan memberi dampak pada kegiatan pembangunan dan pengembangan sektor perikanan secara keseluruhan. Pembangunan usaha Kelautan dan Perikanan Sulawesi Selatan ke depan akan menjadi usaha perikanan yang berproduktivitas dan memiliki daya saing yang tinggi baik pasar dalam negeri maupun pasar ekspor. Upaya yang dilakukan diarahkan pada tiga ruang lingkup pengembangan yaitu hilirisasi dan optimalisasi kegiatan produksi melalui pengembangan inovasi teknologi produktif, peningkatan daya saing melalui penanganan dan penerapan teknologi pengolahan produk hasil perikanan sehingga menghasilkan produk yang kompetitif dan berkarakter, dan pengembangan mekanisme serta jaringan pemasaran yang inklusif. Dengan komitmen ini, pembangunan Kelautan dan Perikanan Sulawesi Selatan secara optimal akan mampu memberi kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Sulawesi Selatan dan Nasional.

Beberapa alasan yang dapat menjadi pertimbangan terhadap pencapaian target pembangunan kelautan dan perikanan Sulawesi Selatan, diantaranya: (1) Pembangunan Sektor Perikanan Budidaya kedepan menekankan pada peningkatan produksi melalui upaya rekayasa teknologi dan upaya perbaikan lingkungan/habitat pemeliharaan; (2) Pembangunan Sektor Perikanan Tangkap diarahkan pada optimalisasi pemanfaatan sumberdaya perikanan yang berbasis pada tiga fokus pengembangan, yaitu inovasi dan pengembangan teknologi penangkapan ikan ramah lingkungan (*fishing technology*), penguasaan dan pengembangan pengetahuan terhadap target tangkapan (*fish target*), dan peningkatan pemahaman terhadap daerah penangkapan ikan (*fishing ground*); (3) Adanya Gerakan Peningkatan Produksi Komoditas terhadap 7 komoditi unggulan seperti udang, rumput laut, kepiting, cumi-cumi, bandeng, kakap kerapu dan tuna cakalang tongkol sebagai wujud dari Hilirisasi Perikanan dan Kelautan; (4) semakin bergairahnya masyarakat pembudidaya untuk berusaha karena lingkungan sumberdaya perikanan yang mendukung; (5) adanya trend dukungan kebutuhan akan semakin besar sehingga ada jaminan pasar.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai lembaga pemerintah diberi mandat untuk mengemban tugas dan tanggung jawab pembinaan, pelayanan kepada masyarakat dimana dituntut untuk menyusun Perencanaan Strategis yang Akuntabel. Hal ini sejalan dengan tuntutan masyarakat kepada

aparatur pemerintah untuk merespon atas mandat yang diberikan dalam rangka pencapaian visi misi pembangunan.

Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2018-2023 merupakan perencanaan pembangunan dalam jangka lima tahun dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan yang diarahkan sebagai langkah adaptasi terhadap era globalisasi, desentralisasi serta diposisikan sebagai tahapan penguatan, perluasan, pendalaman dan sekaligus penyempurnaan dari pelaksanaan program yang telah dilaksanakan dalam periode sebelumnya, utamanya dalam mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan Sulawesi Selatan yang inovatif, produktif, kompetitif, inklusif dan berkarakter.



Gambar. 1. Keterkaitan Dokumen Renstra dengan Dokumen RPJMD

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil,
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

RENCANA STRATEGIS 2018 – 2023

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah,
 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pem-binaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,
 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota,
 15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 16. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 17. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia;
 18. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah,
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,
23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No. 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah,
24. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 - 2029,
25. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No.1 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan PUG dalam Pembangunan Daerah,
26. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan, (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 243);
27. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
28. Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023;
29. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan No.80 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan;
30. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan No 37 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi UPT Balai Penerapan Mutu Produk Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan;
31. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan No 38 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi Cabang Dinas Kelautan;
32. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan No 39 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi Cabang Dinas Kelautan;

1.3.Maksud dan Tujuan

Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 disusun dengan maksud untuk menjabarkan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan, terutama yang terkait dengan urusan Kelautan dan Perikanan sehingga rumusan program strategis dengan skala prioritas, kebijakan, indikator perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan lebih terarah.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan adalah 1) sebagai pedoman bagi unit kerja lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan (Renja) untuk lima tahun ke depan yang diimplementasikan dalam pelaksanaan program kegiatan, indikator

RENCANA STRATEGIS 2018 – 2023

kinerja dan kelompok sasaran , 2) sebagai acuan dalam merumuskan kebijakan bagi unit kerja lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan instansi terkait di kabupaten/kota dalam mendukung pembangunan Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan .

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan berpedoman pada RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan dan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang diimplementasikan melalui dukungan dana yang dimuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka mewujudkan Visi, Misi dan Strategi yang telah ditetapkan.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Pembangunan Perikanan dan Kelautan Provinsi Sulawesi Selatan untuk tahun 2018 - 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Bagian ini memuat uraian tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.

Bab II Gambaran Pelayanan SKPD memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Kelautan dan Perikanan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas sumberdaya yang dimiliki, dan kinerja pelayanan melalui pelaksanaan Renstra sebelumnya dan capaian program yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode 2018 - 2023 serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan.

Bab III Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan beserta faktor-faktor yang menganalisis isu-isu strategis yang merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan dapat dioperasionalkan dan secara moral serta estetika birokratis yang dapat diper-tanggungjawabkan.

Bab IV Tujuan dan Sasaran, memuat uraian tentang tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang menggambarkan apa yang diharapkan pada yang akan datang, dan menggambarkan langkah-langkah utama yang akan diambil untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan, memuat uraian tentang penjelasan yang masing-masing tujuan dan sasaran yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya akan dirinci lebih detil bagaimana cara mencapainya melalui strategi dan arah kebijakan yang akan dirumuskan.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan, memuat rencana program dan kegiatan serta pendanaan. Pada bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan, memuat indikator kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sulawesi Selatan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VIII Penutup,

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 80 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan maka berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 86 Tahun 2016 telah disusun Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan

a. Tugas dan Fungsi

Adapun uraian tugas pokok dan fungsi jabatan pada struktural organisasi lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan sesuai Pergub86 tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. Tugas Pokok

Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, hukum, dan keuangan dalam lingkungan Dinas.

• Sub. Bagian Umum. Kepegawaian dan Hukum

Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan ketatausahaan, administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang, urusan rumah tangga serta mengelola administrasi kepegawaian, dan hukum.

- **Sub. Bagian Program**

Kepala Subbagian Program mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan mengelola penyusunan program, penyajian data dan penyusunan laporan kinerja.

- **Sub. Bagian Keuangan**

Kepala Subbagian Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam menghimpun bahan dan mengelola administrasi keuangan meliputi penyusunan anggaran, penggunaan, pembukuan, pertanggungjawaban dan pelaporan.

Bidang Pengelolaan Dan Penataan Ruang Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil

Kepala Bidang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang pengelolaan dan penataan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil.

Bidang Perikanan Budidaya dan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

Kepala Bidang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Perikanan Budidaya dan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan.

Bidang Perikanan Tangkap

Kepala Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang perikanan tangkap .

RENCANA STRATEGIS 2018 – 2023

Bidang Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas melaksanakan penyiapan koordiansi, fasilitas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan.

UPT Pelabuhan Perikanan Wilayah 1 dan 2

Kepala UPT mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan pelayanan dan pengelolaan pemanfaatan sumber daya ikan, serta keselamatan operasional kapal perikanan.

UPT BALAI PENERAPAN MUTU PRODUK HASIL PERIKANAN

Kepala UPT mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan pelayananpengujian mutu dan keamanan produk perikanan, diversifikasi produk perikanan, dan pemenuhan persyaratan SNI produk perikanan.

UPT BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU DAN LAUT

Kepala UPT mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan pelayanan teknis operasional produksi dan pelayanan teknik budidaya ikan air payau dan laut, koordinasi teknis dengan jejaring pemuliaan ikan.

CABANG DINAS KELAUTAN

Dengan Peraturan Gubernur telah, dibentuk Cabang Dinas Kelautan, masing-masing:

- a. Cabang Dinas Kepulauan Selayar, Kelas A berkedudukan di Kabupaten Selayar yang meliputi wilayah kerja pelayanan Kabupaten Kepulauan Selayar;
- b. Cabang Dinas Pangkajene dan Kepulauan, Kelas A berkedudukan di Kabupaten Pangkep yang meliputi wilayah kerja pelayanan Kabupaten Kepulauan Pangkajene dan Kepulauan;

- c. Cabang Dinas Luwu Raya, Kelas A berkedudukan di Kota Palopo yang meliputi wilayah kerja pelayanan Kota Palopo, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Tana Toraja, dan Kabupaten Toraja Utara;
- d. Cabang Dinas Ajatappareng, Kelas A berkedudukan di Kota Pare-Pare yang meliputi wilayah kerja pelayanan Kabupaten Barru, Kota Pare-Pare, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Sidrap, dan Kabupaten Enrekang;
- e. Cabang Dinas Bosowasi, Kelas A berkedudukan di Kabupaten Bone yang meliputi wilayah kerja pelayanan Kabupaten Bone, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Wajo, dan Kabupaten Sinjai;
- f. Cabang Dinas Wilayah Selatan, Kelas A berkedudukan di Kabupaten Bulukumba yang meliputi wilayah kerja pelayanan Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Bantaeng, dan Kabupaten Bulukumba;
- g. Cabang Dinas Wilayah Mamminasata, Kelas A berkedudukan di Kota Makassar yang meliputi wilayah kerja pelayanan Kota Makassar, Kabupaten Maros, Kabupaten Gowa, Kabupaten Takalar;

Kepala Cabang Dinas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di bidang Kelautan dan Perikanan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Gubernur berdasarkan wilayah kerja.

2. Fungsi

Kepala Dinas

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait tugas dan fungsinya.

Sekretaris

Untuk melaksanakan tugas Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan dinas;
- b. Pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan;
- c. Pengoordinasian urusan umum, kepegawaian, dan hukum;
- d. Pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

• **Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum**

Untuk melaksanakan tugas KepalaSub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengoordinasian urusan umum, kepegawaian, dan hukum;
- b. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai bidang tugasnya.

• **Sub Bagian Program**

Untuk melaksanakan tugas KepalaSub Bagian Program menyelenggarakan fungsi

- a. Pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan;
- b. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai bidang tugasnya.

• **Sub Bagian Keuangan**

Untuk melaksanakan tugas KepalaSub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan;
- b. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai bidang tugasnya.

Bidang Pengelolaan Dan Penataan Ruang Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil

Kepala Bidang Pengelolaan dan Penataan Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan di bidang Pengelolaan Dan Penataan Ruang Laut,

- Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Pengelolaan Dan Penataan Ruang Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;
 - c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pengelolaan Dan Penataan Ruang Laut, Pesisir, Dan Pulau-Pulau Kecil;
 - d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengelolaan Dan Penataan Ruang Laut, Pesisir, Dan Pulau-Pulau Kecil;
 - e. Pelaksanaan administrasi Bidang Pengelolaan Dan Penataan Ruang Laut, Pesisir, Dan Pulau-Pulau Kecil; dan
 - f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Bidang Perikanan Budidaya dan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

Kepala Bidang Perikanan Budidaya dan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan di Bidang Perikanan Budidaya Dan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan;
- b. pelaksanaan kebijakan di Bidang Perikanan Budidaya Dan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di Bidang Perikanan Budidaya dan Daya Saing Produk Kelautan Dan Perikanan;
- d. pelaksanaan pembinaan teknis dan supervisi di Bidang Perikanan Budidaya dan Daya Saing Produk Kelautan Dan Perikanan;
- e. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) di bidang pembudidayaan ikan, pemasaran, dan pengolahan hasil perikanan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.
- f. penguatan daya saing dan sistem logistik produk kelautan dan perikanan serta peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan
- g. pelaksanaan evaluasi serta pelaporan di bidang Perikanan Budidaya dan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan;
- h. pelaksanaan administrasi Bidang Perikanan Budidaya dan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan ; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Perikanan Tangkap

Kepala Bidang Perikanan Tangkap dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang Perikanan Tangkap;
- b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang Perikanan Tangkap;
- c. pelaksanaan penyiapan pengelolaan, penangkapan ikan diwilayah laut sampai dengan 12 mil, pembinaan dan penguatan kenelayanan;
- d. pelaksanaan penyiapan rekomendasi untuk penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), Pemasangan Rumpon, dan penerbitan buku kapal perikanan 5 GT sampai dengan 30 GT ,
- e. pelaksanaan penyiapan rekomendasi untuk penerbitan izin lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan kewenangan provinsi;
- f. pelaksanaan pembinaan, pengaturan, penguatan di bidang Perikanan Tangkap;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perikanan Tangkap;
- h. pelaksanaan administrasi Bidang Perikanan Tangkap ; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Bidang Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. pelaksanaan perumusan kebijakan di Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan;
- d. pemberian pembinaan teknis dan supervisi di bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan;

- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
- f. pelaksanaan administrasi Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan ; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

UPT Pelabuhan Perikanan Wilayah 1 dan 2

Kepala UPT dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perencanaan teknis pelaksanaan pelayanan Pelabuhan Perikanan Wilayah I;
- b. pelaksanaan teknis pelayanan Pelabuhan Perikanan Wilayah I;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelayanan Pelabuhan Perikanan Wilayah I;
- d. pelaksanaan administrasi UPT; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

UPT BALAI PENERAPAN MUTU PRODUK HASIL PERIKANAN

Kepala UPT dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perencanaan teknis pelaksanaan pelayanan pengujian mutu dan keamanan produk perikanan, diversifikasi produk perikanan, dan pemenuhan persyaratan SNI produk perikanan;
- b. pelaksanaan teknis pelayanan pengujian mutu dan keamanan produk perikanan, diversifikasi produk perikanan, dan pemenuhan persyaratan SNI produk perikanan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelayanan pengujian mutu dan keamanan produk perikanan, diversifikasi produk perikanan, dan pemenuhan persyaratan SNI produk perikanan;
- d. pelaksanaan administrasi UPT; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

UPT BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU DAN LAUT

Kepala UPT dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perencanaan teknis pelaksanaan pelayanan teknik budidaya ikan air payau/laut, koordinasi teknis dengan jejaring pemuliaan ikan;
- b. pelaksanaan teknis pelayanan teknik budidaya ikan air payau/laut, koordinasi teknis dengan jejaring pemuliaan ikan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelayanan teknik budidaya ikan air payau/laut, koordinasi teknis dengan jejaring pemuliaan ikan;
- d. pelaksanaan administrasi UPT; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

CABANG DINAS KELAUTAN

Kepala Cabang Dinas Kelautan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

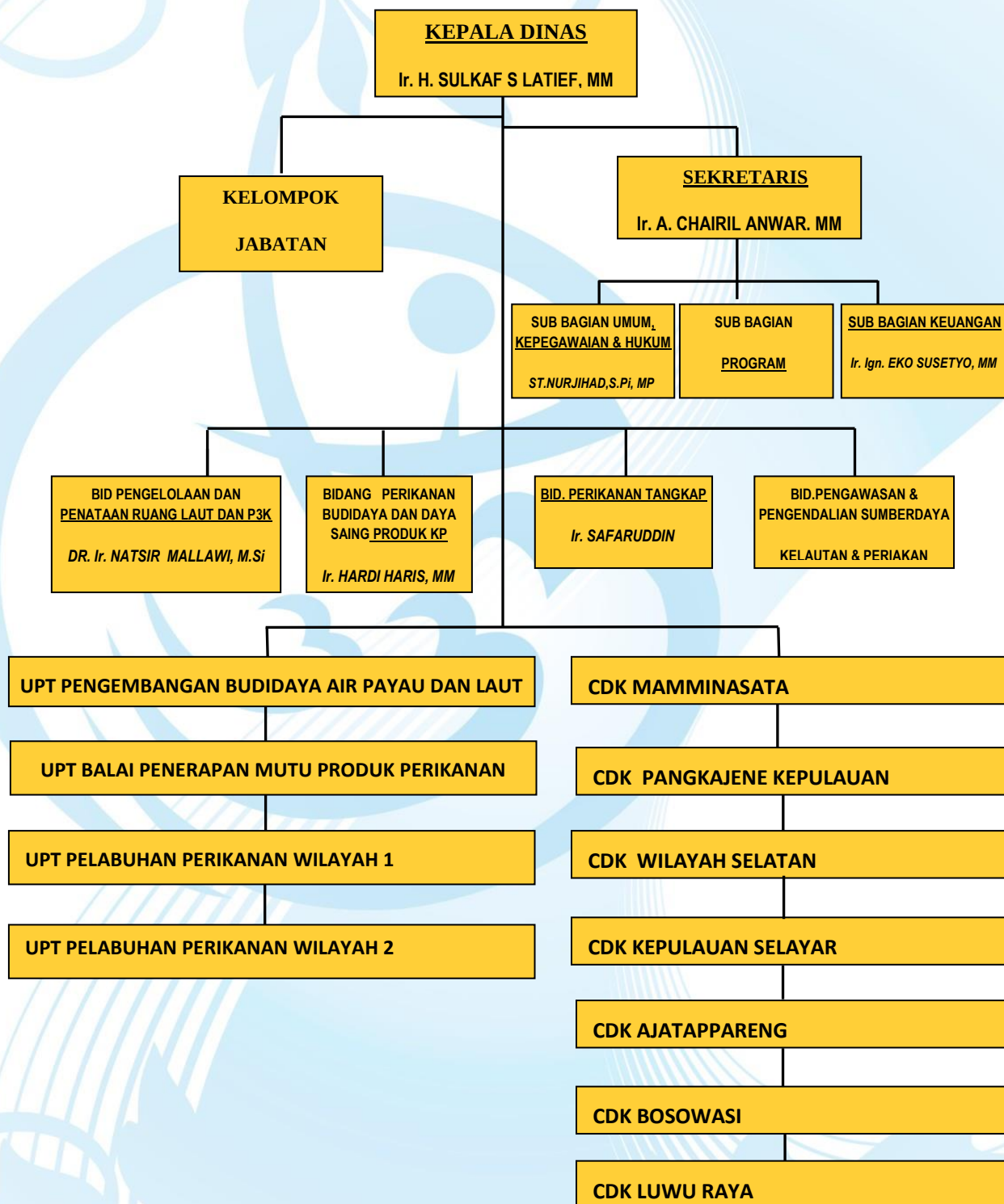
- a. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan program sesuai dengan lingkup bidang tugas dan wilayah kerjanya;
- b. Koordinasi dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan sesuai dengan lingkup bidang tugas dan wilayah kerjanya;
- c. Koordinasi dan pelaksanaan administrasi sesuai dengan lingkup bidang tugas dan wilayah kerjanya; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya

b. Organisasi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Permendagri Nomor 12 Tahun 2017 tentang pembentukan Cabang Dinas Kelautan maka Rancangan Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris membawahi 3 Sub Bagian
3. Kepala Bidang sebanyak 4 unit
4. Kepala UPT sebanyak 4 unit dengan membawahi 1 bagian tatausaha dan 2 unit seksi
5. Kepala CDK sebanyak 7 unit dengan membawahi 1 bagian tatausaha dan 2 unit seksi

Adapun struktur organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut :



Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan

2.2. Sumber Daya Dinas Kelautan dan Perikanan**2.2.1. Kepegawaian****a. Tingkat Pendidikan**

Jumlah Pegawai Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 tercatat sebanyak 203 orang, dengan tingkat pendidikan bervariasi dari Sekolah Dasar (SD) sampai Doktor (S3). Adapun Strukturnya sebagai berikut

Tabel 2.1.**Struktur Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Pria	Wanita	
1	S3	2	1	3
2	S2	26	16	42
3	S1	42	66	108
4	Sarjana Muda	19	8	27
5	SLTA	20	2	22
6	SLTP	2	1	3
7	SD	1	0	0
	Jumlah	119	88	203

Sumber : Data Kepegawaian Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018

b. Tingkat Penjenjangan dan Eselon

Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) harus dibarengi dengan sistem karier yang baik. tapi sebelumnya harus dilakukan analisis beban kerja. Kepala Dinas harus memiliki komitmen yang kuat untuk membangun sistem karier dalam jabatan, sesuai dengan amanat UU No 5/2014 tentang ASN. Karier PNS berbasis pada sistem merit yang lebih terbuka, adil, transparan dengan kualifikasi, kompetensi, kinerja serta integritas, dan moralitas yang baik.

RENCANA STRATEGIS 2018 – 2023

Tingkat penjenjangan yang telah diikuti oleh pegawai Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sulawesi Selatan sejak tahun 2013 – 2018 sebanyak 35 orang yang mulai dari Diklat PIM IV sampai dengan Diklat PIM II. Adapun strukturnya sebagai berikut :

Tabel.2.2.
Struktur Diklat PIM 2013-2018

No	Diklat	Jenis Kelamin		Jumlah
		Pria	Wanita	
1	Diklat PIM II	2	-	2
2	Diklat PIM III	9	2	11
3	Diklat PIM IV	16	6	22
	Jumlah	27	8	35

Sumber : Data Kepegawaian Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018

Tabel.2.3.
Jumlah Jabatan Struktural

No	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Pria	Wanita	
1	Eselon II	1	-	1
2	Eselon III	15	1	16
3	Eselon IV	26	11	37
	Jumlah	42	12	54

Sumber : Data Kepegawaian Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018

c. Pangkat dan Golongan

Tingkat kepangkatan dan golongan pegawai Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sulawesi Selatan bervariasi dari Golongan I sampai Golongan IV, adapun strukturnya sebagai berikut :

Tabel.2.4.
Struktur Pegawai Menurut Tingkat Kepangkatan dan Golongan

No	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Pria	Wanita	
1	Golongan IV/d	-	-	-
2	Golongan IV/c	1	-	1
3	Golongan IV/b	10	1	11
4	Golongan IV/a	12	9	21
5	Golongan III/d	23	20	43
6	Golongan III/c	28	35	63
7	Golongan III/b	11	17	28
8	Golongan III/a	4	6	10
9	Golongan II/d	6	-	6
10	Golongan II/c	9	3	12
11	Golongan II/b	5	-	5
12	Golongan II/a	2	-	2
13	Golongan I/d	-	-	-
14	Golongan I/c	-	1	1
15	Golongan I/b	2	-	2
16	Golongan I/a	-	-	-
	Jumlah	113	92	203

Sumber : Data Kepegawaian Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018

d. Distribusi Sumberdaya Pegawai

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi terdiri atas 4 bidang teknis, Sekretariat dan didukung 5 Unit Pelayanan Teknis Daerah. Pada unit tersebut telah terdistribusi pegawai dengan jumlah sumberdaya kepegawaian sebagai berikut :

Tabel. 2.5
Distribusi Sumberdaya Pegawai

No	Bidang / Unit	PNS		Jumlah	Tenaga Kontrak		Jumlah
		Jenis Kelamin			Jenis Kelamin		
		Pria	Wanita		Pria	Wanita	
1	Perikanan Budidaya dan Daya Saing Produk KP	6	7	13	9	5	14
2	Pengelolaan Dan Penataan Ruang Laut, Pesisir, Dan Pulau-Pulau Kecil	4	17	21	2	5	7
3	Perikanan Tangkap	5	6	11	1	2	3
4	Pengawasan Sumberdaya KP	6	8	14	3	2	5
5	Sekretariat						
	a. Subag Umum dan Kepegawaian	14	12	26	4	2	6
	b. Subag Keuangan	8	7	15	-	2	2
	c. Subag Program	4	10	14	1	2	3
6	UPT BPMPP	5	12	17	9	6	15
7	UPT BPBAPL	6	2	8	3	1	4
8	UPT PPW1	8	3	11	3	3	6
9	UPT PPW2	6	-	6	3	2	5
10	CDK Mamminasata	7	7	14	3	3	6
11	CDK Pangkajene Kep.	10	-	10	3	2	5
12	CDK Wilayah Selatan	3	4	7	3	2	5
13	CDK Kepulauan Selayar	6	-	6	3	2	5
14	CDK Ajatappareng	3	2	5	3	2	5
15	CDK Bosowasi	5	2	7	3	2	5
16	CDK Luwu Raya	3	3	6	3	2	5
	Jumlah	2	-	2			
		111	102	203	59	48	107

Sumber : Data Kepegawaian Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018

2.2.2. Sarana dan Prasarana (Aset)

Sarana dan Prasarana (Aset) yang mendukung Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan untuk mengembangkan Program dan kegiatan guna menunjang tugas dan fungsi pelayanan adalah :

A. Bidang Perikanan Tangkap**A.1. Pelabuhan Perikanan**

Pelabuhan Perikanan adalah Prasarana Perikanan tangkap yang fungsinya :

1. Tempat kegiatan bongkar muat hasil perikanan
2. Sebagai sarana bengkel untuk perbaikan kapal, mesin dan alat tangkap ikan
3. Sebagai tempat sarana pembinaan nelayan dan sekaligus sebagai home base nelayan

Disamping sarana dan prasarana tersebut, juga dilengkapi sarana penunjang yakni (1) Tempat Pemasaran Ikan, (2) Tempat Kapal Bersandar, (3) Perkantoran, sampai dengan tahun 2018, terdapat 23 unit Pelabuhan Perikanan (Tipe D) yang ada di 15 Kabupaten/kota dengan kondisi rata-rata baik, dan beroperasi. Secara detail keberadaan Pelabuhan Perikanan di Sulawesi Selatan seperti pada tabel 2.6 baik yang sudah diserahkan ke Provinsi maupun yang belum diserahkan.

Tabel 2.6.
Kondisi Sarana Pelabuhan Perikanan di Sulawesi Selatan

NO	NAMA PELABUHAN PERIKANAN	LOKASI	KELAS / TYPE	KETERANGAN
		KAB / KOTA		
1	Pelabuhan Perikanan Untia	Kota Makassar	PPN / B	UPT Pusat
2	Pelabuhan Perikanan Paotere	Kota Makassar	PPI / D	Operasional belum P3D
3	Pelabuhan Perikanan Bontobahari	Kab. Maros	PPI / D	Operasional belum P3D
4	Pelabuhan Perikanan Labuang	Kab. Maros	PPI / D	Operasional belum P3D
5	Pelabuhan Perikanan Maccini Baji	Kab. Pangkep	PPI / D	Operasional belum P3D
6	Pelabuhan Perikanan Polejiwa	Kab. Barru	PPI / D	Tidak Operasional
7	Pelabuhan Perikanan Cempae	Kota Parepare	PPI / D	Operasional Proses P3D
8	Pelabuhan Perikanan Lonrae	Kab. Bone	PPI / D	Operasional Proses P3D
9	Pelabuhan Perikanan Siwa	Kab. Wajo	PPI / D	Tidak Operasional

RENCANA STRATEGIS 2018 – 2023

10	Pelabuhan Perikanan Bonepute	Kab. Luwu	PPI / D	Tahap pembangunan (tidak operasional)
11	Pelabuhan Perikanan Ulo-Ulo	Kab. Luwu	PPI / D	Tidak Operasional
12	Pelabuhan Perikanan Balambang	Kab. Luwu	PPI / D	Tahap pembangunan (tidak operasional)
13	Pelabuhan Perikanan Pontap	Kota Palopo	PPI / D	Operasional (Proses P3D)
14	Pelabuhan Perikanan Malangke	Kab. Luwu Utara	PPI / D	Tahap pembangunan (tidak operasional)
15	Pelabuhan Perikanan Malili	Kab. Luwu Timur	PPI / D	Operasional (belum P3D)
16	Pelabuhan Perikanan Lappa	Kab. Sinjai	PPI / D	Operasional (belum P3D)
17	Pelabuhan Perikanan Kajang	Kab. Bulukumba	PPI / D	Operasional (Sudah P3D)
18	Pelabuhan Perikanan Bontobahari	Kab. Bulukumba	PPI / D	Tahap pembangunan/Operasional (Sudah P3D)
19	Pelabuhan Perikanan Birea	Kab. Bantaeng	PPI / D	Operasional (Sudah P3D)
20	Pelabuhan Perikanan Tanrusampe	Kab. Jeneponto	PPI / D	Operasional Musiman (Sudah P3D)
21	Pelabuhan Perikanan Boddia	Kab. Takalar	PPI / D	Tidak Operasional
22	Pelabuhan Perikanan Beba	Kab. Takalar	PPI / D	Tahap pembangunan/Operasional (Sudah P3D)
23	Pelabuhan Perikanan Barombong	Kab. Gowa	PPI / D	Operasional (belum P3D)
24	Pelabuhan Perikanan Bonehalang	Kab. Kep. Selayar	PPI / D	Operasional (belum P3D)

Sumber : Bidang Perikanan Tangkap dan Laporan Tahunan 2017

A.1. Stasiun Pengisian Bahan Bakar

Sarana Stasiun Pengisian Bahan Bakar yang berlokasi di Pelabuhan Perikanan dimana aset tersebut sudah diserahkan ke provinsi yaitu sebagai berikut :

1. SPDN Pelabuhan Perikanan Beba Kabupaten Takalar 1 unit
2. SPDN Pelabuhan Perikanan Birea Kabupaten Bantaeng 1 unit
3. SPDN Pelabuhan Perikanan Kajang Kabupaten Bulukumba 1 unit
4. SPDN Pelabuhan Perikanan Lonrae Kabupaten Bone 1 unit

B. Bidang Perikanan Budidaya

B.1. Dempon Tambak

Sarana Dempon tambak milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terdapat di hampir seluruh Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan. Adapun peranan sarana tersebut adalah :

1. Tempat uji coba teknologi budidaya
2. Tempat pelatihan dan pembinaan bagi petugas pemerintah dan swasta untuk berusaha di bidang perikanan tambak
3. Sarana pembelajaran bagi petugas perikanan budidaya dalam peningkatan kinerjanya

B.2. Sarana Perikanan Budidaya Payau dan Laut

Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya Payau dan Laut yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dikelola oleh UPT Perikanan Budidaya Payau dan Laut terdapat di kabupaten Barru, yang peranannya adalah :

1. Sarana uji coba pembenihan udang untuk spesies atau jenis udang tertentu
2. Sarana pengkajian terhadap tingkat produktivitas dan kelangsungan hidup budidaya payau dan laut.
3. Sarana pelatihan, pembinaan petugas pemerintah dan swasta yang memiliki usaha dibidang pembenihan udang
4. Sarana pembelajaran bagi petugas BPU dalam peningkatan kinerjanya
5. Sebagai unit produksi benur udang yang berkualitas

Adapun unit sarana dan prasarana yang terletak di UPT Perikanan Budidaya Payau dan Laut yaitu :

- | | |
|--------------------------|--------|
| 1. Kantor UPT | 1 unit |
| 2. Kendaraan operasional | 1 unit |
| 3. Kolam perbenihan | 4 unit |
| 4. Kolam pendederan | 4 unit |

- | | |
|-----------------|--------|
| 5. Laboratorium | 1 unit |
|-----------------|--------|

B.3. Instalasi Pengembangan Budiaya Air Tawar (Instalasi Lajoa)

Sarana Pengembangan Budidaya Air Tawar (Instalasi Lajoa) yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terdapat di Kabupaten Soppeng dan pengembangannya didukung Lima (5) Kabupaten/Kota, masing-masing yaitu Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Sidrap, Kota Palopo dan Kabupaten Gowa. Adapun peranannya adalah :

1. Sarana uji coba teknologi pembenihan dan pembesaran ikan air tawar
2. Sarana Pelatihan dan Pembinaan kegiatan budidaya air tawar
3. Sarana pemurnihan benih ikan air tawar untuk menghasilkan bibit ikan dan calon induk unggul dan tahan terhadap penyakit
4. Sarana produksi untuk kebutuhan Restocking dan pemenuhan calon induk untuk Unit Pembenihan Rakyat (UPR) dan BBI lokal Kabupaten/Kota.

Adapun unit sarana dan prasarana yang terletak di Instalasi Lajoa yaitu :

- | | |
|--------------------------|--------|
| 1. Kantor Instalasi | 1 unit |
| 2. Kendaraan operasional | 1 unit |
| 3. Kolam perbenihan | 4 unit |
| 4. Kolam pendederan | 4 unit |
| 5. Laboratorium | 1 unit |

C. Pembinaan Usaha dan Kelembagaan

C.1. Sarana Penerapan Mutu dan Pengembangan Produk Hasil Perikanan

Sarana dan Prasarana Penerapan Mutu dan Pengembangan Produk Hasil Perikanan yang dimiliki Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dikelola oleh UPT Balai Penerapan Mutu dan Pengembangan Produk Hasil Perikanan, yang berlokasi di kota Makassar adapun aset-aset yang berperan dalam pengembangan produk dan pelayanan mutu adalah :

1. Sarana pengujian terhadap mutu hasil perikanan,

2. Sarana pengkajian terhadap mutu hasil pengolahan modern dan tradisional hasil perikanan,
3. Sarana pembinaan dan pengawasan mutu hasil perikanan,
4. Sarana pelatihan dan pembelajaran bagi petugas pemerintah dan swasta yang menangani hasil perikanan.

Adapun unit sarana dan prasarana yang terletak di Instalasi Lajoa yaitu :

1. Kantor UPT	1 unit
2. Kendaraan operasional	1 unit
3. Gedung pelayanan	1 unit
4. Laboratorium	1 unit

C.2. Depo

Disamping Sarana dan Prasarana Penerapan Mutu dan Pengembangan Produk Hasil Perikanan) tersebut diatas, juga dilengkapi dengan Depo 1 unit yang peranannya adalah sarana penyimpanan produksi hasil perikanan terutama pada saat ikan/udang mengalami panen puncak yang berlokasi di Kabupaten Barru.

D. Perlindungan, Pengawasan dan Pengendalian

Unit perlindungan, pengawasan dan pengendalian melaksanakan tugas pada usaha penangkapan dan budidaya. Khusus untuk pelaksanaan tugas pada kegiatan penangkapan, unit ini dilengkapi dengan kapal pengawasan perikanan. Dalam kegiatan tugas pengawasan dilaut, petugas perikanan sering bekerja sama dengan TNI Angkatan Laut dan Kepolisian Perairan Laut, terutama pada saat operasi lapangan dilakukan. Secara keseluruhan sarana dan prasarana pengawasan pendukung Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan seperti pada tabel berikut :

Tabel 2.7.
Sarana dan Prasarana Pendukung
Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sulawesi Selatan

No	Sarana/Prasarana	Jumlah (Unit)
1	Pos Pengawas	60
2	Kapal Pengawasan	2

Sumber : Subdin Perlindungan, Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya KP dan Laporan Tahunan 2018

E. Kawasan Konservasi Perairan Daerah dan Perlindungan Laut

Mengembangkan konservasi sumberdaya ikan dan konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil melalui upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan secara berkelanjutan pada tingkat ekosistem, jenis dan genetik serta mendorong penguatan fungsi otoritas pengelola konservasi sumberdaya ikan maka telah dibangun prasarana Konservasi di beberapa kabupaten yaitu :

1. Gedung Konservasi di Kabupaten Pangkep 1 unit
2. Gedung Konservasi di Kabupaten Barru 1 unit
3. Gedung Konservasi di Kabupaten Luwu Utara 1 unit
4. Gedung Konservasi di Kabupaten Selayar 1 unit

F. Pengembangan SDM Aparat dan Masyarakat Usaha Perikanan dalam mendukung Peningkatan Produksi Perikanan

Dalam rangka peningkatan produksi perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan beberapa upaya untuk mencapai target sasaran yang diinginkan. Beberapa upaya strategis dilakukan untuk mewujudkannya, salah satunya adalah pengembangan SDM Aparat dan Masyarakat. Ber-dasarkan data dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dengan memperhatikan penilaian yang sama dan diberikan pada masyarakat atas kesamaan dan perbedaan antara laki-laki dan perempuan serta atas berbagai peran

yang mereka lakukan untuk mewujudkan Pengarusutamaan Gender, maka persentase keterwakilan perempuan terhadap laki-laki untuk memperoleh kesempatan untuk pengembangan SDM dapat dilihat pada tampilan data pada tabel 2.8.

Tabel 2.8
Pengembangan SDM Aparat dan Masyarakat Usaha Perikanan
(Berbasis Gender) Dalam Mendukung Peningkatan
Produksi Perikanan sampai tahun 2017

Uraian	Realisasi (%) sampai tahun 2017	
	L	P
Aparat Dinas KP	59,97	39,11
Pembudidaya	97,56	3,82
Nelayan	94,29	2,80
Pengolah dan Pemasar	27,86	50,88
Jumlah	279,68	96,60
Rasio	1,42	

Sumber : Data Olahan DKP Prov. Sulsel Tahun 2018

1.3. Kinerja Pelayanan

Capaian kinerja pelayanan selama 5 (lima) tahun berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib dan indikator sesuai urusan yang menjadi tugas dan fungsi (IKK) yaitu :

a. Produksi Perikanan

Produksi perikanan Sulawesi Selatan selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup besar yaitu rata-rata 10,3 % per tahun, dimana produksi perikanan pada tahun 2013 hanya sebesar 2.884.006,7 ton meningkat menjadi sebesar 4,262,554.7 ton pada tahun 2017. Kenaikan produksi perikanan ini didukung dengan produksi perikanan budidaya yang juga mengalami kenaikan sebesar 10,9 % dan perikanan tangkap sebesar 5,3 %. Komoditas yang dikembangkan adalah komoditas yang bertumpu pada potensi yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal seperti Rumput Laut, Udang dan Bandeng.

Dalam rangka pengembangan komoditas unggulan dan komoditas lain mulai tahun 2013 - 2018 telah dilakukan berbagai upaya salah satunya yaitu penguatan

RENCANA STRATEGIS 2018 – 2023

kelembagaan, bantuan bibit, akses permodalan dan perluasan jejaring serta kemitraan. Kenaikan produksi perikanan didukung pada nilai produksi, dimana kontribusi produksi dari sektor Perikanan Budidaya sebesar 10,8 % dan Perikanan Tangkap sebesar 7,4 %. Kenaikan nilai produksi perikanan sangat dipengaruhi oleh nilai produksi rumput laut, dimana kontribusi nilai rumput laut terhadap nilai produksi perikanan budidaya dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, yaitu tahun 2013 kontribusinya sebesar 43,6 %, 2014 sebesar 44,3 %, 2015 sebesar 48,9 %, 2016 sebesar 42,7 % dan 2017 sebesar 46,7 %. Pada tahun 2017 Kabupaten penghasil rumput laut di Sulawesi selatan antara lain Kabupaten Takalar sebesar 996.550 ton, Kabupaten Luwu sebesar 622.251,1 ton, Kabupaten Wajo sebesar 462.479 ton, kabupaten Luwu Timur sebesar 294.406 ton, Kabupaten Pangkep sebesar 280.976 ton. Sulawesi Selatan merupakan penghasil rumput laut terbesar di Indonesia. Selain rumput laut, Sulawesi selatan juga dikenal sebagai penghasil udang terutama jenis udang Vannamei dan udang Windu. Selama 5 tahun terakhir kenaikan produksi udang di Sulawesi Selatan sebesar 7,9 %. Pada tahun 2017 Kabupaten penghasil udang di Sulawesi Selatan antara lain kabupaten Pinrang sebesar 9.935,7 Ton, Kabupaten Bone sebesar 4.885,9 ton, Kabupaten Takalar sebesar 4.516 Ton, kabupaten Bulukumba sebesar 3.990,3 ton, kabupaten Barru sebesar 3.810,5 Ton, Kabupaten Pangkep sebesar 3.463 ton. Bandeng merupakan salah satu komoditi unggulan sector perikanan budidaya, dimana kenaikan rata – rata selama 5 tahun terakhir sebesar 9,6 %. Pada tahun 2017 Kabupaten penghasil Bandeng di Sulawesi Selatan antara lain kabupaten Bone sebesar 68.950,8 Ton, Kabupaten Wajo sebesar 21.640 ton, Kabupaten Pinrang sebesar 19.714,7 Ton, kabupaten Pangkep sebesar 14.893 ton, kabupaten Luwu Timur sebesar 10.4125 Ton.

Komoditas tuna dan Cakalang adalah komoditas yang berbasis pada usaha penangkapan sehingga produksi komoditas ini sepenuhnya tergantung pada tingkat upaya (effort) yang dilakukan oleh nelayan dan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang pengkapan ikan. Melalui kebijakan pengembangan sarana dan prasarana penangkapan serta peningkatan mutu hasil tangkapan, komoditas Tuna, Tongkol dan Cakalang (TTC), capaian produksi dapat dioptimalkan memberikan kontribusi nilai yang lebih baik dengan peningkatan jumlah produksi yang memiliki grade lebih tinggi pada pasar ekspor maupun lokal. Dari sisi produksi, capaian hasil komoditas Tuna, Tongkol dan Cakalang (TTC) telah terjadi kenaikan rata-rata selama 5 tahun sebesar 2,3 %.

RENCANA STRATEGIS 2018 – 2023

Tabel 2.9
Produksi Perikanan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

No	Bidang/Urusan	Sat	Tahun					Kenaikan Rata-Rata %
			2013	2014	2015	2016	2017	
a.	Jumlah produksi ikan	ton	2.495.576,20	3.377.689.6	3.786.837.2	3.941.648.8	4.262.554.7	22,9
b.	Target daerah	ton	1.416.629,00	3.146.106.0	3.349.134.6	3.517.298.7	4.145.760.6	7,8
	Produksi Perikanan	%	176,20	107.4	113.1	112.1	102.8	14
c.	Jumlah produksi perikanan tangkap	ton	259.881,50	302.191.7	310.290.4	312.380.8	359.770.1	0,3
d.	Target daerah	ton	341.632,00	295.160.0	298.111.6	301.092.7	304.103.6	2,6
	Produksi Perikanan Tangkap	%	76,07	102.4	104.1	103.7	118.3	(2,3)
e.	Jumlah produksi perikanan budidaya	ton	2.235.654,80	3.075.497.9	3.476.546.8	3.629.268.0	3.902.784.6	27,9
f.	Target Daerah	ton	1.074.997,00	2.850.946.0	3.051.023.0	3.216.206.0	3.841.657.0	9,7
	Produksi Perikanan Budidaya	%	210,83	107.9	113.9	112.8	101.6	16,9

Sumber: Statistik Dinas Kelautan & Perikanan Prov. Sul-Sel 2018

Tabel 2.10.
Volume Produksi Perikanan Budidaya
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 - 2017

Rincian	Tahun (Ton)					Kenaikan Rata-Rata %
	2013	2014	2015	2016	2017	
Udang	34,420.7	43,865	40,346.8	41,686	45,341.8	7.8
• Udang Windu	15,319.1	16,036	14,835.1	14,776.7	12,045.8	(5.4)
• Udang Vannamae	8,542.2	15,247	12,768	14,834.5	20,643.9	29.4
• Udang Lainnya	10,559.4	12,582	12,743.7	12,074.8	12,652.1	5
Rumput Laut	2,422,154.2	2,888,778.8	3,289,907.6	3,409,048.2	3,662,969.9	11
• E. Cottoni	1,661,334.5	2,059,892	2,409,022.4	2,357,244.7	2,667,719.4	13

RENCANA STRATEGIS 2018 – 2023

• Gracilaria Sp	760,819.7	828,886.8	880,885.2	1,051,803.5	995,250.5	7.3
• Bandeng	119,887.1	123,933.6	126,226.6	155,762.4	170,135.9	9.5
• Patin	30.9	28.8	55.5	36.4	41	16
• Lele	1,588.6	1,922.9	2,172.1	2,365.6	2,409.9	11.2
• Nila	3,320.1	3,927.6	4,139.8	5,711.2	7,058.6	21.3
• Kerapu	8.9	5.9	22.1	15.6	9.9	43.7
• Kakap	1.6	2.3	10.4	11.9	3.2	84.3
• Gurame	16	12.2	13.7	11.9	14.7	(0.3)
• Mas	7,294.2	9,289	9,291	9,829.5	9,792.3	8.2
• Ikan Lainnya	3,046.8	3,731.8	4,358.7	4,789.5	5,006.2	13.4
Jumlah	2,591,769.1	3,075,497.9	3,476,546.8	3,629,268	3,902,783.4	10.9

Sumber: Statistik Dinas Kelautan & Perikanan Prov. Sul-Sel 2018

Tabel. 2.11
Volume Produksi Perikanan Tangkap
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 - 2017

NO	Kab/Kota	2013		JUMLAH	2014		JUMLAH	2015		JUMLAH	2016		JUMLAH	2017		JUMLAH
		Perikanan Tangkap	Perairan Umum		Perikanan Tangkap	Perairan Umum		Perikanan Tangkap	Perairan Umum		Perikanan Tangkap	Perairan Umum		Perikanan Tangkap	Perairan Umum	
1	SELAYAR	28,572.9	-	28,572.9	28,960.6	-	28,960.6	24,155.8	-	24,155.8	24,092.6	-	24,092.6	20,152.2	-	20,152.2
2	BULUKUMBA	53,555.3	-	53,555.3	53,555.3	-	53,555.3	52,888.4	-	52,888.4	50,693.7	-	50,693.7	53,392.8	-	53,392.8
3	BANTAENG	4,805.4	-	4,805.4	5,034.7	-	5,034.7	5,186.6	-	5,186.6	5,446.2	-	5,446.2	5,706	-	5,706
4	JENEPONTO	16,682.5	-	16,682.5	16,799.9	-	16,799.9	16,459	-	16,459	16,450.8	-	16,450.8	16,700.3	-	16,700.3
5	TAKALAR	13,627.1	-	13,627.1	13,431.4	-	13,431.4	11,444.2	-	11,444.2	10,614.8	-	10,614.8	11,444.2	-	11,444.2
6	SINJAI	27,126	-	27,126	23,504	-	23,504	39,972.1	-	39,972.1	36,882.5	-	36,882.5	38,165.9	-	38,165.9
7	MAROS	14,510.6	446.8	14,957.4	14,714	502.8	15,216.8	14,788.6	451.5	15,240.1	14,872.1	497.6	15,369.7	15,259.6	523.2	15,782.8
8	PANGKEP	8,766.3	-	8,766.3	8,793.8	-	8,793.8	7,733.8	-	7,733.8	6,389.4	-	6,389.4	15,110.9	-	15,110.9
9	BARRU	17,180.4	-	17,180.4	17,879.2	-	17,879.2	18,244.8	-	18,244.8	18,117.9	-	18,117.9	18,439.2	-	18,439.2
10	BONE	25,073.4	113.9	25,187.3	33,504	137.2	33,641.2	34,710.5	72.9	34,783.4	36,658.5	70.5	36,729	44,539.6	83.1	44,622.7
11	WAJO	10,853.9	6,436.7	17,290.6	6,415.4	5,241	11,656.4	4,255.1	8,647.3	12,902.4	6,306.6	6,356.3	12,662.9	15,942	19,413.5	35,355.5
12	PINRANG	11,806.1	276.8	12,082.9	12,823	306.8	13,129.8	12,943.9	280.5	13,224.4	13,171.9	255.1	13,427	13,404	285.7	13,689.7
13	LUWU	7,076	405.7	7,481.7	12,105.2	359.6	12,464.8	12,486.2	8.6	12,494.8	14,311.8	8.4	14,320.2	16,390	8.5	16,398.5
14	LUWU UTARA	4,751	42.7	4,793.7	4,143.6	24.6	4,168.2	1,570.9	64.9	1,635.8	1,646.5	64.9	1,711.4	1,716.5	181.5	1,898
15	LUWU TIMUR	8,606.6	243.6	8,850.2	8,649.8	402.7	9,052.5	8,659.9	328.7	8,988.6	9,328.2	328.7	9,656.9	8,471	334.4	8,805.4
16	MAKASSAR	12,378.9	-	12,378.9	12,480.2	-	12,480.2	12,740.8	-	12,740.8	12,989.3	-	12,989.3	13,462.8	-	13,462.8
17	PARE-PARE	3,341.9	-	3,341.9	4,281.5	-	4,281.5	4,313	-	4,313	4,571.9	-	4,571.9	4,629.7	-	4,629.7
18	PALOPO	9,179.7	-	9,179.7	10,821.5	-	10,821.5	12,685.6	-	12,685.6	14,861.6	-	14,861.6	16,951.9	-	16,951.9
19	SIDRAP	-	2,790.6	2,790.6	-	3,102.2	3,102.2	-	2,319	2,319	-	2,319	2,319	-	3,275.9	3,275.9
20	SOPPENG	-	3,033.8	3,033.8	-	3,610.1	3,610.1	-	2,101.3	2,101.3	-	4,318.6	4,318.6	-	4,526.2	4,526.2
21	ENREKANG	-	11.9	11.9	-	9.2	9.2	-	11.2	11.2	-	11.2	11.2	-	20.1	20.1
22	TATOR	-	15	15	-	12.8	12.8	-	13.6	13.6	-	13.6	13.6	-	13.8	13.8
23	TORUT	-	21.2	21.2	-	22.4	22.4	-	23.9	23.9	-	22.4	22.4	-	27.9	27.9
24	GOWA	-	504.9	504.9	-	563.3	563.3	-	727.8	727.8	-	708.2	708.2	623.4	574.3	1,197.7
Jumlah		277,894.00	14,300.90	319,237.60	287,897.10	14,294.70	302,191.80	295,239.20	15,051.20	310,290.40	297,406.30	14,974.50	312,380.80	330,502.00	29,268.10	359,770.10

Sumber: Statistik Dinas Kelautan & Perikanan Prov. Sul-Sel 2018

Tabel 2.12
Volume Produksi Garam

Kabupaten/ Kota	Sat	2013	2014	2015	2016	2017	Rata- rata %
Jeneponto	Ton	22,873.7	56,208.3	65,816	11,558.1	19,818.5	-2,83
Takalar	Ton	7,739.8	15,957.1	14,252.7	1,421.5	13,943.6	12,49
Pangkep	Ton	11,499.4	54,143.9	34,694.2	1,002.04	5,475.3	-13,79
Selayar	Ton	-	762,1	762	7,0	22.5	-17,81
Jumlah Total		42,112.9	127,071.4	115,524.9	13,988.6	39,259.9	-1,39

Sumber: Statistik Dinas Kelautan & Perikanan Prov. Sul-Sel 2018

Produksi perikanan tangkap dan budidaya menjadi pasokan dalam proses produksi ikan olahan. Selama kurun waktu 2013 – 2017, volume produk olahan meningkat dari 42,112.9. Ton pada tahun 2013 menjadi 39,259.9 Ton pada tahun 2017. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya ragam produk olahan bernilai tambah yang dihasilkan unit pengolahan ikan (UPI), baik skala besar maupun UMKM dalam upaya preferensi konsumen terhadap diversifikasi produk perikanan bermutu, aman dikonsumsi dan memiliki nilai tambah.

Tabel. 2.13.
Volume Produksi Olahan
Provinsi Sulawesi Selatan 2013-2018

Rincian	Tahun (Ton)					Kenaikan Rata-Rata %
	2013	2014	2015	2016	2017	
• Volume Produk Olahan (Ton)	18.729	19.884	22.969	23.997	24,424,4	2.8%

Sumber: Statistik Dinas Kelautan & Perikanan Prov. Sul-Sel 2018

Adapun jumlah Unit Pengolahan Ikan (UPI) di Sulawesi Selatan yaitu Unit Pengolahan Ikan sebanyak 86 Unit . Berdasarkan jenis pengolahan dan penanganan :

- a. Produk Beku : 36 Unit
- b. Kering dan Ikan Lainnya : 22 Unit
- c. Eksportir Rumput Laut : 28 Unit

Sedangkan jumlah UKM di Sulawesi Selatan yaitu sebanyak UKM dengan jenis olahan yang berupa :

- a. Bakso (ikan /rumput laut)

RENCANA STRATEGIS 2018 – 2023

- b. Kerupuk & Kripik (ikan /rumpuk laut)
- c. Sirup , dodol rumput lau
- d. Bandeng tanpa duri
- e. Abon Ikan
- f. Nugget Ikan
- h. Ikan asap
- i. Pengolahan rajungan
- j. dll

b. Konsumsi Ikan

Dalam periode 2013-2017 telah terjadi peningkatan konsumsi ikan dengan capaian rata-rata 3,2% pertahun yaitu 44,3 kg/kap pada tahun 2013, menjadi 46,8 kg/kap pada tahun 2014, menjadi 49,7 kg/kap pada tahun 2015, menjadi 52,5 kg/kap pada tahun 2016, hingga sampai pada tahun 2017 telah mencapai 51,7 kg/kap. Sedangkan pencapaian konsumsi ikan nasional pada tahun 2016 telah mencapai 43,9 kg/kap (Data Susenas) dan KKP menargetkan pencapaian konsumsi ikan untuk tahun 2017 sebesar 47,12 kg/kap .

Hal ini menggambarkan bahwa produk perikanan untuk dikonsumsi tersedia dan cukup baik yang berasal dari kegiatan penangkapan ikan maupun budidaya. Selain itu, peningkatan capaian rata-rata konsumsi ikan perkapita Sulawesi Selatan tersebut juga menggambarkan bahwa pelaksanaan kebijakan dan kampanye Gemar Makan Ikan memberikan hasil yang signifikan.

Tabel 2.14
Konsumsi Ikan Kab/kota tahun 2013-2017

No	Kabupaten/Kota	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-Rata pertumbuhan %
1	SELAYAR	-	-	49,45	53,45	53,45	2,61
2	BULUKUMBA	42	43,05	45	44,18	45,2	1,48
3	BANTAENG	25	29	30,7	30,9	33,63	6,11
4	JENEPONTO	38,8	39,2	39,7	39,9	40,5	0,86
5	TAKALAR	52,27	54,69	54,69	54,25	55,55	1,22
6	SINJAI	45	45	45	45	46	0,44
7	MAROS	36	38,8	39,7	40,03	40,4	2,33
8	PANGKEP	43	45	39,31	47,6	47	1,79
9	BARRU	43	43,94	45,32	45,32	45,43	1,11
10	BONE	45,5	52,7	56,25	57,88	56,86	4,56
11	WAJO	79,26	73,14	78,56	65,92	63,47	-4,53
12	PINRANG	41,82	42,57	43,24	44,05	44,05	1,04

RENCANA STRATEGIS 2018 – 2023

No	Kabupaten/Kota	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-Rata pertumbuhan %
13	LUWU	47.38	47.85	48.05	50.32	52.00	1.88
14	LUWU UTARA	55.46	56.04	56.61	57.18	57.75	0.81
15	LUWU TIMUR	39.04	42.80	43.23	43.86	44.9	2.84
16	MAKASSAR	34.76	35.47	57.72	57.8	58.66	11.03
17	PARE-PARE	33.60	33.68	31.30	32.75	28.28	-3.39
18	PALOPO	47.53	55.44	49.83	49.53	54.43	2.75
19	SIDRAP	40.32	40.15	40.08	40.00	40.08	-0.12
20	SOPPENG	27.65	27.76	29.56	33.48	33.58	3.96
21	ENREKANG	12	13.15	16.62	20.13	21	11.84
22	TANA TORAJA	21	22	23	23	14.59	-7.02
23	TORAJA UTARA	18	18	18.50	19	19	1.09
24	GOWA	39.8	41.8	46.4	45.7	47.41	3.56
Jumlah							

Sumber: Data Olahan Statistik Dinas Kelautan & Perikanan Prov. Sul-Sel 2018

Tabel 2.15
Konsumsi Ikan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Bidang/Urusan	Sat	Tahun					Kenaikan Rata-Rata %
		2013	2014	2015	2016	2017	
Jumlah Konsumsi Ikan	(Kg)	44.3	46.8	49.7	52.5	55.2	5.7
Target Daerah	(Kg)	43.9	44.7	45.2	45.6	46.1	1.2
Konsumsi Ikan	%	100.9	104.7	110.0	115.1	119.7	4.4

c. Cakupan Bina Kelompok Nelayan

Jumlah Kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan selama 5 tahun terakhir sekitar 452 kelompok dengan jenis bantuan sarana dan prasarana alat tangkap sesuai permohonan proposal yang diajukan oleh kelompok. Tahun 2013 hanya 33 kelompok yang mendapatkan bantuan sedangkan tahun yang paling banyak mendapatkan bantuan pemerintah daerah adalah tahun 2016 yaitu sebesar 193 kelompok. Kemudian di tahun 2017 kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan sebanyak 78 kelompok. Cakupan bina kelompok nelayan diarahkan untuk kontribusi terhadap ketahanan pangan.

Tabel.2.16
Cakupan Bina Kelompok Nelayan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Bidang/Urusan	Sat	Tahun					Kenaikan Rata-Rata %
		2013	2014	2015	2016	2017	
Jumlah Kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan pemda tahun n	klp	33	59	89	193	78	46.7
n Jumlah kelompok nelayan	klp	131	168	295	333	358	31.1
Cakupan Bina Kelompok Nelayan	%	25.2	35.1	30.2	58.0	21.8	13.8

d. Produksi Perikanan Kelompok Nelayan

Dalam rangka meningkatkan produksi dan produktivitas perikanan tangkap pemerintah provinsi telah memberikan bantuan sarana dan prasarana bagi kelompok nelayan. Produksi kelompok nelayan selama 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi peningkatan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 dimana produksi kelompok nelayan pada tahun 2013 sebesar 70.001.5 ton meningkat sampai tahun 2016 sebesar 172.376,69 ton dan mengalami penurunan pada tahun 2017 sebesar 72.016.39 ton. Produksi kontribusi hasil kelompok nelayan didapatkan berdasarkan data kelompok yang menerima bantuan pemerintah provinsi berdasarkan usulan yang diajukan oleh Dinas KP Pemerintah kab/kota dan pemangku kepentingan .

Tabel. 2.17
Produksi Perikanan Kelompok Nelayan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Bidang/Urusan	Sat	Tahun					Kenaikan Rata- Rata %
		2013	2014	2015	2016	2017	
Jumlah produksi ikan kontribusi hasil kelompok nelayan	ton	70,001.50	101,109.43	89,073.67	172,376.69	72,016.39	17.0
Jumlah produksi ikan di daerah	ton	292237.6	302191.7	310290.4	312380.8	359770.1	5.5
Produksi Perikanan Kelompok Nelayan	%	24.0	33.46	28.71	55.18	20.02	13.5

e. Proporsi Tangkap Ikan yang berada dalam batasan Biologis yang Aman

Dari tahun 2013 sampai saat ini, proporsi tangkapan ikan di Sulawesi Selatan berada dalam batasan biologis yang aman. Dalam kerangka menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan pada pembangunan nasional, proporsi tangkapan ikan harus dipertahankan untuk berada dalam batasan biologis yang aman.

Tabel. 2.18
Proporsi Tangkap Ikan yang berada dalam batasan
Biologis yang Aman
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Bidang/Urusan	Sat	Tahun					Kenaikan Rata-Rata %
		2013	2014	2015	2016	2017	
Jumlah tangkapan ikan	ton	292.237,6	302.191,7	310.290,4	312.380,8	359.770,10	7.0
80% dari tangkapan maksimum lestari	ton	743.776,0	743.776,0	743.776,0	743.776,0	743.776,0	5.5
Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	%	39,3	40,63	41,72	42,00	48,37	12.5

Tahun 2013, proporsi tangkapan ikan sebesar 39,30% kemudian tahun 2017 mencapai 48,37% dan sampai tahun 2018 mencapai 48,92%. Walaupun proporsi tersebut mengalami kenaikan, namun masih dapat dikendalikan untuk tidak melebihi 100 persen dari jumlah tangkapan yang diperbolehkan (Total Allowable Catch/TAC). Potensi lestari (Maximum Sustainable Yield/MSY) sumber daya perikanan tangkap tahun 2011 untuk nasional diperkirakan 6,4 juta ton per tahun dan untuk provinsi Sulawesi Selatan dengan potensi 929,7 ribu ton per tahun, sedangkan potensi yang dapat dimanfaatkan (Total Allowable Catch/jumlah tangkapan yang diperbolehkan/JTB) adalah 80 persen dari MSY atau sebesar 5,12 juta ton untuk nasional dan untuk provinsi sebesar 743.800 ton. Jumlah total hasil tangkapan ikan dari laut adalah penjumlahan dari produksi ikan dari seluruh kabupaten/kota. Jumlah tangkapan yang diperbolehkan adalah 80% dari jumlah tangkapan lestari (maksimum sustainable yield – MSY). Data MSY ini diperoleh dari Komisi Nasional Pengkajian Ikan. Batasan biologis aman adalah proporsi tangkapan

RENCANA STRATEGIS 2018 – 2023

ikan < 100%. Manfaat Indikator ini digunakan untuk memantau kelestarian sumberdaya ikan dan kelangsungan usaha penangkapan ikan.

f. Rasio Kawasan Lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial

Luas kawasan konservasi perairan di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2012 sebesar 762.055,12 Ha. Dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan dan sumberdaya kelautan dan perikanan maka pada periode tahun 2013-2016 telah dikelola seluas 76.205,7 Ha pada tahun 2013, kemudian meningkat pada tahun 2014 telah dikelola sebesar 91.446,7 Ha, dengan melakukan upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan secara berkelanjutan pada tingkat ekosistem, jenis dan genetik termasuk penguatan fungsi otoritas pengelolaan konservasi sumberdaya ikan maka pada tahun 2015 pengelolaan meningkat menjadi 92.557,1 Ha hingga pada tahun 2016 dengan adanya kewenangan pengelolaan yang diatur dalam UU 23/2014 sehingga pengelolaan kawasan konservasi berdasarkan kewenangan Provinsi Sulawesi Selatan telah mencapai 95.241 Ha, dan hingga tahun 2017 pengelolaan kawasan konservasi sebesar 95.752,1 Ha sehingga total pengelolaan luas kawasan konservasi dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 seluas 355.450 Ha hampir 50% dari luas kawasan konservasi perairan di Provinsi Sulawesi Selatan yang telah dikelola.

Tabel. 2.19
Rasio Kawasan Lindung perairan terhadap total luas perairan territorial Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Bidang/Urusan	Sat	Tahun					Kenaikan Rata-Rata %
		2013	2014	2015	2016	2017	
Kawasan lindung perairan	Ha	76,205.7	91,446.8	92,557.1	95,241.0	95,752.10	6.2
Total Luas perairan territorial	Ha	43,047,900.0	43,047,900.0	43,047,900.0	43,047,900.0	43,047,900.0	0.0
Rasio Kawasan Lindung perairan terhadap total luas perairan territorial	%	0.18	0.21	0.22	0.22	0.22	6.2

g. Nilai Tukar Nelayan

Pendapatan nelayan dan pembudidaya ikan diidentifikasi dengan mengukur Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya (NTN). Nilai tukar digunakan untuk mempertimbangkan seluruh penerimaan (revenue) dan seluruh pengeluaran (expenditure) keluarga nelayan dan pembudidaya ikan. Selain itu, juga digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat nelayan secara relatif dan merupakan ukuran kemampuan keluarga nelayan dan pembudidaya ikan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan keluarga nelayan dan pembudidaya ikan telah memenuhi kebutuhan keluarganya. Selama periode 2013-2017 rata-rata pendapatan nelayan dan pembudidaya telah mengalami laju pertumbuhan untuk nelayan telah mencapai 22,8% pertahun sedangkan pembudidaya 13,3% pertahun.

Berdasarkan hasil perhitungan BPS, NTN tahun 2014 telah dibagi menjadi dua yaitu Nilai Tukar Nelayan dan Nilai Tukar Pembudidaya, hal ini disebabkan karena Tahun dasar perhitungan NTN telah mengalami perubahan dari tahun dasar 2007 menjadi tahun dasar 2012 sehingga Nilai Tukar NTN Tahun 2013 masih di gabung Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya dengan pencapaian Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya sebesar 111,45 dan Tahun 2014 Nilai Tukar Nelayan sebesar 106,40 dan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan sebesar 106,47. Kemudian pada tahun 2015 rata-rata Nilai Tukar Nelayan sebesar 107,1 dan Nilai Tukar Pembudidaya sebesar 102,1 pada tahun 2016 Nilai Tukar Nelayan telah mencapai 103,5 dan Nilai Tukar Pembudidaya sebesar 99,1 , hingga tahun 2017 Nilai Tukar Nelayan telah mencapai 107,6 dan Nilai Tukar Pembudidaya sebesar 97,9. Menurunnya angka nilai tukar pembudidaya disebabkan beberapa faktor selain faktor alam, faktor harga pakan dan pupuk yang cukup tinggi sehingga dibutuhkan modal awal yang cukup besar untuk melakukan usaha budidaya.

Tabel. 2.20
Nilai Tukar Nelayan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Bidang/Urusan	Sat	Tahun					Kenaikan Rata-Rata %
		2013	2014	2015	2016	2017	
Indeks yang diterima nelayan	ton	153.1	117.4	107.8	156.7	186.80	0.3
Indeks yang dibayar nelayan	ton	130.1	135.6	140.9	143.7	128.1	0.2
Nilai Tukar Nelayan	%	117.68	86.58	76.51	109.05	145.82	0.3

Sedangkan capaian kinerja antara Renstra dan RPJMD periode sebelumnya yaitu :

1. Kontribusi PDRB Perikanan terhadap PDRB Sulawesi Selatan

Laju pertumbuhan PDRB Sektor Perikanan terhadap PDRB sulawesi Selatan dalam 8 tahun terakhir telah mencapai rata-rata 7,814 % terlihat pada pencapaian PDRB Perikanan setiap tahun seperti berikut :

Tabel. 2.21
Kontribusi PDRB Perikanan terhadap PDRB Sulsel

No.	Tahun	Kontribusi PDRB (%)	Nilai PDRB SulSel (Rp)	Nilai PDRB Perikanan (Rp)
1.	2010	8,2	113,7 T	7.71 T
2.	2011	7,5	137,4 T	9.09 T
3.	2012	8,4	159,4 T	10.94 T
4.	2013	6,9	258,7 T	17.91 T
5.	2014	7,6	300,1 T	22.83 T
6.	2015	7,9	341.7 T	27.33 T
7.	2016	8,2	379,2 T	30.95 T
8.	2017	8,3	418.9 T	34,9 T

1. Produksi dan Nilai Hasil Perikanan

RENCANA STRATEGIS 2018 – 2023

Produksi perikanan Sulawesi Selatan selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup besar yaitu 10,3 %, dimana produksi perikanan pada tahun 2013 hanya sebesar 2.884.006,7 ton meningkat sebesar 4,262,554.7 ton. Kenaikan produksi perikanan ini didukung dengan produksi perikanan budidaya yang juga mengalami kenaikan sebesar 10,9 % dan perikanan tangkap sebesar 5,3 %.

Tabel. 2.22

Peningkatan Produksi dan Nilai Hasil Perikanan

No	Rincian	Tahun					Kenaikan Rata-Rata 2013-2017
		2013	2014	2015	2016	2017	
1	Produksi Perikanan (Ton)	2,884,006.7	3,377,689.6	3,786,837.2	3,941,648.8	4,262,554.7	10,3
	* Perikanan Tangkap	292,237.6	302,191.7	310,290.4	312,380.8	359,770.1	5,3
	* Perikanan Budidaya	2,591,769.1	3,075,497.9	3,476,546.8	3,629,268.0	3,902,784.6	10,9
2	Nilai Produksi (Rp.Trilyun)	11,80	13,96	15,78	15,60	16,90	9,1
	* Perikanan Tangkap	4,34	5,12	6,60	6,41	5,82	7,4
	* Perikanan Budidaya	7,46	8,84	9,18	9,19	11,08	10,8
3	Produksi Komoditi Unggulan (Ton)						
	• Rumput Laut	2,422,154.2	2,888,778.8	3,289,907.6	3,409,048.2	3,662,970.4	12,3
	• Udang	34,420.7	43,865.0	40,346.8	41,686.0	45,342.4	7,9
	• Bandeng	119,887.1	123,933.6	126,226.6	155,761.2	170,135.8	9,6
	• Tuna Cakalang Tongkol	54,047	56,774	60,706.1	57,273.3	59,075	2,3
4	Nilai Prod Komoditi Unggulan (Rp.Trilyun)						
	• Rumput Laut	3,25	3,92	4,49	3,92	5,18	13,6
	• Udang	2,13	2,66	2,41	2,51	2,36	3,4
	• Bandeng	1,79	1,86	1,89	2,34	2,93	13,8
	• Tuna Cakalang Tongkol	0,92	1,03	1,85	1,39	0,97	5,7

Kenaikan produksi perikanan didukung pada nilai produksi, dimana kontribusi produksi dari sektor Perikanan Budidaya sebesar 10,8 % dan Perikanan Tangkap sebesar 7,4 %. Kenaikan nilai produksi perikanan sangat dipengaruhi oleh nilai produksi rumput laut, dimana kontribusi nilai rumput laut terhadap nilai produksi perikanan budidaya dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, yaitu tahun 2013 kontribusinya sebesar 43,6 %, 2014 sebesar 44,3 %, 2015 sebesar 48,9 %, 2016 sebesar 42,7 % dan 2017 sebesar 46,7 %. Data produksi Rumput Laut per kabupaten kota dapat dilihat pada tabel 2.23.

RENCANA STRATEGIS 2018 – 2023

Tabel. 2.24

Produksi Rumput Laut per Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan 2013-2017

NO	KAB/ KOTA	KOMODITAS RUMPUT LAUT																		
		2013			2014				2015				2016				2017			
		COTTO NII	GRACIL ARIA	TOTAL RL	COTTO NII	GRACI LARIA	SPINO SUM	TOTAL RL	COTTO NII	GRACI LARIA	SPIN OSU M	TOTAL RL	COTTO NII	GRACI LARIA	SPIN OSU M	TOT AL RL	COTTO NII	GRACI LARIA	SPIN OSU M	TOT AL RL
1	Luwu	289,32 7.3	255,235 .8	544,563.1	356,3 85.5	271.5 50.1	-	627,9 35.6	392,0 24.1	285,1 27.6	-	677,1 51.7	244,9 45.5	295,6 37.5	-	540, 583. 0	318,4 99.4	303,7 51.7	-	622, 251. 1
2	Luwu Utara	30,545 .0	152,744 .6	183,289.6	33,155. 5	147,19 0.8	-	180,34 6.3	31,441. 6	147,99 0.6	-	179,43 2.2	33,930. 8	149,84 9.6	-	183,7 80.4	34,969. 6	155,28 5.0	-	190,2 54.7
3	Wajo	129,40 1.5	1,020.0	130,421.5	138,50 4.0	13,205. 0	-	151,70 9.0	262,96 5.0	13,309. 0	194.0	276,46 8.0	237,90 0.0	151,72 6.0	-	389,6 26.0	386,99 8.0	75,481. 0	-	462,4 79.0
4	Bone	100,01 5.8	62,899. 0	162,914.8	125,01 9.8	75,499. 8	-	200,51 9.6	126,12 8.2	75,725. 0	-	201,85 3.2	128,20 4.1	87,397. 8	-	215,6 01.9	149,32 8.0	97,850. 0	-	247,1 78.0
5	Sinjai	8,820. 0	11,580. 0	20,400.0	-	16,964. 0	12,112. 0	29,076. 0	-	11,520. 0	7,680 .0	19,200. 0	-	17,980. 0	12,22 0.0	30,20 0.0	-	20,742. 8	19,46 5.3	40,20 8.1
6	Bulukum ba	108,38 3.8	1,115.0	109,498.8	128,36 0.0	700.0	-	129,06 0.0	157,92 0.0	960.0	-	158,88 0.0	158,44 0.0	659.9	-	159,0 99.9	167,85 0.0	866.5	-	168,7 16.5
7	Selayar	10,566 .8		10,566.8	7,655.8	-	-	7,655.8	164.4	-	120.5	284.9	88.7	-	81.5	170.2	333.9	-	-	333.9
8	Bantaeng	104,42 1.8		104,421.8	85,416. 0	-	1,061.7	86,477. 7	75,865. 8	-	9,483 .0	85,348. 8	80,112. 2	-	2,515 .8	82,62 8.0	67,986. 5	-	15,46 8.0	83,45 4.4
9	Jenepont o	132,94 0.9		132,940.9	120,97 9.0	-	-	120,97 9.0	125,74 9.4	-	12,33 1.3	138,08 0.7	136,35 9.4	-	13,52 5.7	149,8 85.1	136,99 8.5	-	13,51 1.2	150,5 09.7
10	Takalar	506,51 8.0	73,876. 4	580,394.4	623,72 0.0	76,848. 4	110,25 2.0	810,82 0.4	636,19 5.0	103,99 5.0	210,2 00.0	950,39 0.0	702,88 4.0	110,47 3.0	220,9 48.0	1,034 305. 0	760,72 6.0	105,13 0.0	130,6 94.0	996,5 50.0
11	Makassar	35.0		35.0	-	-	-	-	-	187.0	-	187.0	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Maros	-	60.7	60.7	8.3	7.2	-	15.5	-	71.0	-	71.0	-	117.9	-	117.9	-	124.9	-	124.9
13	Pangkep	124,79 0.0	501.3	125,291.3	148,65 2.0	3,582.6	-	152,23 4.6	179,60 3.0	5,719.0	-	185,32 2.0	202,55 2.0	5,950.0	-	208,5 02.0	273,13 5.0	7,841.0	-	280,9 76.0
14	Pinrang	4,625. 0	162.8	4,787.8	3,582.3	130.3	-	3,712.6	6,754.2	350.1	-	7,104.3	9,027.4	370.9	-	9,398. 3	10,417. 4	638.5	-	11,05 5.9
15	Barro	664.5		664.5	798.0	-	-	798.0	788.0	-	-	788.0	891.6	-	-	891.6	936.2	-	-	936.2
16	Pare-Pare	-	1.5	1.5	-	-	-	-	27.6	-	-	27.6	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Palopo	13,450 .1	56,030. 2	69,480.3	31,123. 1	84,406. 6	-	115,52 9.7	31,589. 3	84,569. 9	-	116,15 9.2	27,519. 0	76,771. 9	-	104,2 90.9	30,311. 0	83,225. 1	-	113,5 36.0
18	Luwu Timur	96,829 .0	145,592 .4	242,421.4	133,10 7.0	138,80 2.0	-	271,90 9.0	141,79 8.0	151,36 1.0	-	293,15 9.0	145,09 9.0	154,86 9.0	-	299,9 68.0	150,09 2.0	144,31 4.0	-	294,4 06.0
TOTAL		1,661, 334.5	760,819 .7	2,422,154 .2	1,936,4 66.3	828,88 6.8	123,42 5.7	2,888,7 78.8	2,169,0 13.6	880,88 5.2	240,0 08.8	3,289,9 07.6	2,107,9 53.7	1,051,8 03.5	249,2 91.0	3,409 048. 2	2,488,5 81.5	995,25 0.5	179,1 38.5	3,662 970. 4

Rumput laut jenis E.Cottoni SP banyak diproduksi di kabupaten Takalar, Luwu, Wajo, Pangkep, Bulukumba, Bone, Luwu Timur, Jeneponto. Sedangkan rumput laut jenis Gracilaria Sp banyak diproduksi di kabupaten Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, Takalar, Wajo, Bone, Sinjai, Palopo. Kemudian jenis Spinosum SP banyak diproduksi di Takalar, Sinjai, Bantaeng, dan Jeneponto.

2. Perkembangan pangsa pasar (industri) produk hasil kelautan dan perikanan**a. Pasar / Perdagangan Luar Negeri****Produksi dan Nilai Ekspor Perikanan**

Selama periode 2013-2017 telah terjadi peningkatan Volume Ekspor perikanan dengan capaian rata-rata 8,1 % dengan Nilai Ekspor dengan capaian rata-rata 5,6%, yaitu dari 98.275,9 ton dengan nilai ekspor US\$ 221 juta pada tahun 2013, menjadi 126.244,8 ton dengan nilai ekspor US\$ 251,8 juta pada tahun 2017.

Tabel. 2.23**Produksi Ekspor dan Kontribusi Ekspor Hasil Perikanan****Provinsi Sulawesi Selatan 2013-2017**

Bidang/Urusan	Sat	Tahun					Kenaikan Rata-Rata %
		2013	2014	2015	2016	2017	
Ekspor Perikanan Sulsel	ton	126.244,8	138.460	143.900	137.612	113.472	-2.11
Ekspor Sulsel	ton	739.580	739.580	1.830.390	1.830.390	1.266.295,2	11.36
Kontribusi Ekspor Perikanan	%	17,07	20,07	7,86	7,52	8,96	-12.09

Adapun komoditi ekspor yang menjadi primadona adalah sebagai berikut :

Komoditi Rumput Laut

Selama periode 2013-2017 telah terjadi peningkatan Volume Ekspor Rumput Laut dengan capaian rata-rata 8,1 % dengan peningkatan nilai ekspor Rumput Laut dengan capaian rata-rata 8,1 %, yaitu dari 80.895 ton dengan nilai ekspor US\$ 86,3 juta pada tahun 2013, menjadi 102.121 ton dengan nilai US\$ 98,2 juta pada tahun 2017. Adapun negara tujuan ekspor yang dominan terutama ke Cina, Chili, Hongkong, Korea Selatan dan Vietnam.

Komoditi Udang

Selama periode 2013-2017 telah terjadi peningkatan Volume Ekspor Udang dengan capaian rata-rata 2,8% dengan penurunan nilai ekspor Udang dengan

capaian rata-rata 6,5% pertahun, yaitu dari 5.255 ton dengan nilai ekspor US\$ 65,6 juta pada tahun 2013, menjadi 5.315,9 ton dengan nilai US\$ 46,8 juta pada tahun 2017. Adapun negara tujuan ekspor yang dominan yaitu Amerika Serikat, Jepang, Vietnam, Belgia dan Belanda.

Komoditi TTC (Tuna, Tongkol, Cakalang)

Selama periode 2013-2017 telah terjadi peningkatan Volume Ekspor TTC dengan capaian rata-rata 6,2 % dengan peningkatan nilai ekspor dengan capaian rata-rata 7,4 %, yaitu dari 1.903 ton dengan nilai ekspor US\$ 13,1 juta pada tahun 2013, menjadi 2.242,5 ton dengan nilai US\$ 17,0 juta pada tahun 2017. Adapun negara tujuan ekspor yang dominan yaitu Amerika Serikat, Jepang, Australia, Thailand.

Komoditi Gurita

Selama periode 2013-2017 telah terjadi peningkatan Volume Ekspor Gurita dengan capaian rata-rata 74 %, dengan peningkatan nilai eksport dengan capaian rata-rata 87,9 % yaitu dari 370,6 ton dengan nilai ekspor US\$ 1,5 juta pada tahun 2013, menjadi 2.128,7 ton dengan nilai US\$ 10,3 juta pada tahun 2017. Adapun negara tujuan ekspor yang dominan yaitu Amerika Serikat, Italia, Rusia, Thailand. Dan Yunani

3. Peningkatan kualitas lingkungan dan sumberdaya kelautan dan perikanan

Luas kawasan konservasi perairan di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2012 sebesar 762.055,12 Ha. Dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan dan sumberdaya kelautan dan perikanan maka pada periode tahun 2013-2017 telah dikelola seluas 76.205,7 Ha pada tahun 2013, kemudian meningkat pada tahun 2014 telah dikelola sebesar 91.446,7 Ha, dengan melakukan upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan secara berkelanjutan pada tingkat ekosistem, jenis dan genetik termasuk penguatan fungsi otoritas pengelolaan konservasi sumberdaya ikan maka pada tahun 2015 pengelolaan meningkat menjadi 92.557,1 Ha hingga pada tahun 2016 dengan adanya kewenangan pengelolaan yang diatur dalam

UU 23/2014 sehingga pengelolaan kawasan konservasi berdasarkan kewenangan Provinsi Sulawesi Selatan telah mencapai 95.241 Ha, dan hingga tahun 2017 pengelolaan kawasan konservasi sebesar 95.752,1 Ha sehingga total pengelolaan luas kawasan konservasi dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan seluas 355.450 Ha.

Tabel. 2.23

**Luas Kawasan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
Provinsi Sulawesi Selatan 2013-2017**

Bidang/Urusan	Sat	Tahun					Kenaikan Rata- Rata %
		2013	2014	2015	2016	2017	
Taman Nasional Perairan	Ha	583,841.50	583,841.50	583,841.50	583,841.50	583,841.50	-
Taman Wisata Perairan	Ha	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	-
Daerah Perlindungan Laut	Ha	4,280.68	4,704.68	5,170.45	5,682.32	5,682.32	0.3
Kawasan Konservasi Perairan Daerah	Ha	195,138.45	286,161	378,252.59	472,982.17	472,982.17	0.2
Cakupan Luasan Kawasan Konservasi Perairan	Ha	838,260.63	929,707.43	1,022,264.54	1,117,092.35	1,117,097.97	0.3

Kemudian dalam rangka pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan telah terbentuk Kelompok Masyarakat Pengawas yang aktif pada tahun 2013 sebanyak 119 kelompok, menjadi 146 kelompok pada tahun 2014, menjadi 131 kelompok pada tahun 2015, menjadi 150 kelompok pada tahun 2016, hingga sampai tahun 2017 telah mencapai 170 kelompok. Rasio penyelesaian kasus tindak pidana perikanan dari tahun 2013 hingga tahun 2017 yaitu 80% dari target 10 kasus sampai tahun 2018 yang berarti bahwa dari 10 kasus pelanggaran pelestarian sumberdaya yang ditargetkan sampai tahun 2018, terdapat 8 kasus yang telah sampai ke tahap penyidikan.

4. Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat

RENCANA STRATEGIS 2018 – 2023

Pendapatan nelayan dan pembudidaya ikan diidentifikasi dengan mengukur Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya (NTN). Nilai tukar digunakan untuk mempertimbangkan seluruh penerimaan (*revenue*) dan seluruh pengeluaran (*expenditure*) keluarga nelayan dan pembudidaya ikan. Selain itu, juga digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat nelayan secara relatif dan merupakan ukuran kemampuan keluarga nelayan dan pembudidaya ikan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan keluarga nelayan dan pembudidaya ikan telah memenuhi kebutuhan keluarganya. Selama periode 2008-2012 dan periode 2013-2016 rata-rata pendapatan nelayan dan pembudidaya pada periode 2008-2012 telah mengalami laju pertumbuhan untuk nelayan telah mencapai 43,2% pertahun sedangkan pembudidaya 33,8%. Kemudian pada periode 2013-2017 pendapatan untuk nelayan telah mencapai 22,8% pertahun sedangkan pembudidaya 13,3% pertahun.

Tabel. 2.24

**Nilai Tukar Nelayan, Pembudidaya dan Pengolah
Provinsi Sulawesi Selatan 2013-2017**

Bidang/Urusan	Sat	Tahun					Kenaikan Rata-Rata %
		2013	2014	2015	2016	2017	
Nilai Tukar Nelayan	%	102,8	106,4	107,1	103,5	107,6	
Nilai Tukar Pembudidaya	%	107,7	106,5	102,1	99,1	97,9	
Nilai Tukar Pengolah	%	-	-	-	-	-	
Indeks Kesejahteraan Masyarakat	%	30,5	32	35	37,5	40	

Berdasarkan hasil perhitungan BPS, NTN tahun 2014 telah dibagi menjadi dua yaitu Nilai Tukar Nelayan dan Nilai Tukar Pembudidaya, hal ini disebabkan karena Tahun dasar perhitungan NTN telah mengalami perubahan dari tahun dasar 2007 menjadi tahun dasar 2012 sehingga Nilai Tukar NTN Tahun 2013 masih di gabung Nilai Tukar Nelayan dan

Pembudidaya dengan pencapaian Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya sebesar 111,45 dan Tahun 2014 Nilai Tukar Nelayan sebesar 106,40 dan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan sebesar 106,47. Kemudian pada tahun 2015 rata-rata Nilai Tukar Nelayan sebesar 107,1 dan Nilai Tukar Pembudidaya sebesar 102,1 pada tahun 2016 Nilai Tukar Nelayan telah mencapai 103,5 dan Nilai Tukar Pembudidaya sebesar 99,1, hingga tahun 2017 Nilai Tukar Nelayan telah mencapai 107,6 dan Nilai Tukar Pembudidaya sebesar 97,9.

5. Layanan Pelabuhan Perikanan

Sesuai UU 23 tahun 2014, kewenangan pelabuhan perikanan telah menjadi kewenangan Provinsi namun dalam melaksanakan kewenangan tersebut membutuhkan proses waktu yang cukup panjang. Pada tahun 2018 setelah dilakukan sosialisasi terkait UU tersebut dan beberapa kabupaten/kota telah menyerahkan asset pelabuhan perikanan ke Provinsi. Berikut tabel 2.24 pelabuhan perikanan yang sudah melakukan P3D berdasarkan UU 23 tahun 2014.

Tabel. 2.23

**Pelabuhan Perikanan yang telah P3D
Provinsi Sulawesi Selatan**

Pelabuhan	Lokasi	Frekuensi Kunjungan Kapal	Produksi (kg)
PPI Ulo-Ulo	Luwu	1.385	1.480.033
PPI Pontap	Palopo	2.108	368.173
PPI Bonto Bahari	Bulukumba	3.389	4.157.051
PPI Lonrae	Bone	444	813.985
PPI Beba	Takalar	1.426	3.443.523
Jumlah		8.743	10.263.765

Sumber : Data SIPP Tahun 2017

6. Penghargaan atas keberhasilan yang dicapai.

Keberhasilan atas pencapaian kinerja pembangunan Kelautan dan Perikanan ditandai dengan penghargaan yang telah diterima dari pemerintah pusat dan lembaga lainnya selama periode 2013 – 2017 yaitu :

RENCANA STRATEGIS 2018 – 2023

- a. Direktorat Jendral Perikanan Budidaya Memberikan Penghargaan Kepada Provinsi Sulawesi Selatan ***Kategori Provinsi Dengan Kinerja Terbaik Bidang Perikanan Budidaya Tahun 2013.***
- b. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Memberikan Penghargaan Kepada Provinsi Sulawesi Selatan ***"Kategori Sebagai Provinsi Dengan Kinerja Terbaik III Bidang Perikanan Budidaya Tahun 2014.***
- c. Provinsi yang menerima piagam penghargaan **Adi Bakti Minabahari dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI** pada 5 kategori yaitu Kategori Pelopor POKMASWAS, Kategori UKM pengolah Hasil Perikanan terbaik skala menengah, kategori Kelompok usaha bersama Perikanan Tangkap Teladan, Kategori Hatchery Skala Rumah Tangga Jenis Usaha Pembenihan udang, Kategori POKDAKAN Rumput Laut Tingkat Nasional pada tahun 2015.
- d. ***Piagam Penghargaan Lembaga Prestasi Indonesia/Dunia Kepada Gubernur Sulsel Atas Rekor Gerakan Penebaran Benih Ikan Serentak Pada 1000 Titik Se Sulawesi Selatan Tahun 2016.***
- e. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Memberikan Penghargaan Kepada Provinsi Sulawesi Selatan ***"Kategori Sebagai Provinsi Dengan Kinerja Terbaik II Bidang Perikanan Budidaya Tahun 2017.***
- f. Provinsi yang **Masuk Top 99 dan 40 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2018** dengan judul Inovasi “ **Inovasi Sejuta Ikan**” pada **Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tahun 2018** yang diselenggarakan oleh **Deputi Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi**

Berdasarkan hasil capaian kinerja pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sulawesi Selatan baik dari segi kinerja pelayanan dan penganggaran pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.11
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
I	PENYELENGGARAAN PELAYANAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN																		
1	a. Meningkatnya produksi Kelautan dan Perikanan		Jumlah Produksi Perikanan		2.634,1	3.146,1	3.349,1	3.517,3	4.145,7	2.884,1	3.377,7	3.786,9	3.941,7	4.262,6	1,1	1,0	1,1	1,8	2,1
			(1000 ton)	Produksi Perikanan Budidaya (1000 ton)	2.371,7	2.850,9	3.051,0	3.216,2	3.841,6	2.591,8	3.075,5	3.476,6	3.629,3	3.902,8	1,1	1,1	1,2	1,2	1,3
				Produksi Perikanan Tangkap (1000 ton)	262,5	295,2	298,1	301,1	304,1	292,3	302,2	310,3	312,4	359,8	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0
2	a. Meningkatnya Konsumsi Ikan		Jumlah Konsumsi Ikan (Kg/Kap/th)		42	42,2	42,4	42,6	42,8	44,3	46,8	49,7	52,5	55,2	1,2	1,1	1,2	1,2	1,2
3	Cakupan Bina Kelompok Nelayan		Jumlah Kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan pemda tahun n		30	35	40	45	50	33	59	89	193	78	1,1	1,7	2,2	4,3	1,6
4	Produksi Perikanan Kelompok Nelayan		Jumlah produksi ikan kontribusi hasil kelompok nelayan (1000 ton)		56,9	58,2	60,4	63,7	68,7	70	101,1	89,1	172,3	72,0	1,2	1,7	1,5	2,7	1,0

Tabel 2.12.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sulawesi Selatan

Uraian	Anggaran pada Tahun ke -						Realisasi Anggaran pada Tahun ke -					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018
-1	-2	-3	-4	-5	-6		-7	-8	-9	-10	-11	-12
PENDAPATAN DAERAH	2,795,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	1,209,025,000	1,818,930,000	2,139,425,000	3,001,917,283	2,428,416,358	2,167,625,412	1,276,687,404	2,239,460,000	2,258,325,000
Pendapatan Asli Daerah	2,795,000,000	2,778,000,000	2,778,000,000	757,025,000	1,818,930,000	2,139,425,000	3,001,917,283	2,428,416,358	2,167,625,412	658,627,404	2,239,460,000	2,258,325,000
- Hasil retribusi daerah	-	50,000,000	50,000,000	100,000,000	-	-	-	44,220,000	78,285,000	272,565,000	-	-
- Lain-lain PAD yang Sah	-	172,000,000	172,000,000	352,000,000	-	-	-	169,950,000	285,310,000	345,495,000	-	-
Belanja tidak langsung	14,458,386,427	16,846,441,712	16,498,236,542	18,188,149,256	18,158,440,138	18,188,149,265	14,154,921,486	15,656,078,797	16,295,494,117	16,815,795,645	16,645,117,669	21,918,369,701
Belanja langsung	35,944,485,714	59,716,846,500	57,364,337,664	69,747,742,156	79,687,654,229	58,823,343,000	34,697,833,657	55,203,467,995	53,304,160,317	62,332,854,689	74,228,979,393	54,599,447,772
- Belanja Pegawai	-	-	-	1,528,950,000	2,292,300,000	-	-	-	-	1,448,225,000	2,215,979,393	-
- Belanja Barang dan jasa	-	-	-	62,414,948,156	65,310,331,929	47,078,527,120	-	-	-	56,282,950,189	61,169,975,573	43,825,311,092
- Belanja Modal	-	-	-	5,803,844,000	12,085,022,300	11,744,815,880	-	-	-	4,561,679,500	10,834,801,320	10,774,136,680
Total BELANJA DAERAH	53,197,872,141	79,563,288,212	76,862,574,206	89,144,916,412	99,665,024,367	79,150,917,265	51,854,672,426	73,287,963,150	71,767,279,846	80,425,337,738	93,113,557,062	78,776,142,473

Tabel 2.12.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sulawesi Selatan

URAIAN	Anggaran pada Tahun ke -						Realisasi Anggaran pada Tahun ke -					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-7	-8	-9	-10	-11	-12
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4,462,457,714	5,959,069,100	16,246,336,914	6,141,850,000	9,283,523,500	5,051,891,082	4,322,670,076	5,610,100,115	14,784,773,454	5,213,246,251	9,052,273,658	4,734,809,742
Program Peningkatan Kapasitas dan kinerja SKPD	150,000,000	490,000,000	770,000,000	7,167,261,000	7,104,861,000	3,038,610,700	149,781,000	450,732,300	756,935,250	6,755,502,132	7,391,735,848	2,799,251,546
Program Peningkatan pengembangan sistem perencanaan dan sistem evaluasi kinerja SKPD	704,060,000	894,500,000	1,235,670,000	1,739,732,772	1,994,117,929	1,460,572,680	701,911,600	893,533,200	1,210,257,035	1,722,451,875	1,954,378,009	1,444,819,661
Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir	2,312,400,000	2,712,725,000	3,318,725,000	5,423,233,000	14,651,424,000	2,903,000,000	2,306,952,100	2,505,805,380	3,176,773,920	4,690,490,620	14,213,065,640	5,425,082,360
Program pemberdayaan masyarakat pengawasan dan pengendalian	1,226,500,000	980,400,000	1,654,683,000	3,983,693,384	967,775,100	7,531,625,100	963,973,300	1,617,083,540	3,729,457,967	3,729,457,967	9,227,468,732	6,646,785,160
Program pengembangan perikanan budidaya	13,334,165,000	33,227,261,600	20,013,734,750	23,731,874,500	15,562,386,000	13,497,620,385	13,170,453,954	31,614,036,000	19,359,877,403	20,477,918,178	14,857,751,725	13,016,912,128

URAIAN	Anggaran pada Tahun ke -						Realisasi Anggaran pada Tahun ke -					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
Program pengelolaan perikanan tangkap	9,546,648,000	10,649,865,800	9,514,750,000	14,197,935,000	13,062,281,800	20,210,600,601	8,682,112,300	9,367,572,600	8,025,242,300	13,696,161,900	12,812,243,650	18,578,596,075
Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	4,208,275,000	4,803,025,000	4,610,438,000	7,362,172,500	3,829,499,000	2,154,383,772	4,180,773,127	3,767,695,100	4,393,217,415	6,047,625,766	4,720,062,131	1,953,191,100
Total	35,944,505,714	59,716,846,500	57,364,337,664	69,747,752,156	66,455,868,329	55,848,304,320	34,478,627,457	55,826,558,235	55,436,534,744	62,332,854,689	74,228,979,393	54,599,447,772

1.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan

Pengembangan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sulawesi Selatan memiliki tantangan dan peluang. Berdasarkan hasil analisis terhadap Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan RI dan Renstra Kabupaten/Kota, hasil telaahan terhadap RTRW dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi terhadap perencanaan lima tahun ke depan. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

2.4.1 Tantangan

- a. Ketergantungan masyarakat Sulawesi Selatan yang cukup tinggi terhadap SDA dan lingkungan pesisir dan laut serta belum termanfaatkannya secara optimal sumberdaya jasa kelautan.
- b. Degradasi lingkungan sensitive (mangrove, terumbu karang, dan padang lamun) dan penurunan mutu perairan.
- c. Masih maraknya penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan (destructive fishing) dan potensi konflik nelayan yang sangat tinggi.
- d. Sebahagian besar asset nelayan dan petambak tidak bersertifikat, sehingga sulit mengakses perbankan atau lembaga keuangan
- e. Pengembangan teknologi produksi relative lambat dan stagnan.
- f. Infrastruktur sektor perikanan dan kelautan (irigasi tambak, pelabuhan perikanan, sarana pengolahan dan armada penangkapan) masih terbatas.
- g. Serangan hama dan penyakit belum dapat dikendalikan secara maksimal serta masih maraknya penggunaan antibiotik dan bahan terlarang lainnya.
- h. Rendahnya aksesibilitas dan, kualitas layanan antar pulau dan pembinaan pada pulau-pulau kecil.
- i. Kesenjangan gender terhadap pembinaan dan pengembangan SDM kelompok baik di daerah pesisir maupun pada daerah pulau-pulau kecil
- j. Masih banyaknya fasilitas pemerintah yang tidak berfungsi secara optimal, misalnya TPI, PPI dll.

- k. Belum tersertifikasinya sebahagian besar sarana produksi yang ada di masyarakat seperti tambak, hatchery, cold storage, kapal nelayan dan sarana produksi lainnya
- l. Kemiskinan berkepanjangan secara struktural, kultural terutama di desa nelayan
- m. Kerusakan lingkungan yang cukup parah (kerusakan fisik habitat ekosistem pesisir, pencemaran-sedimentasi dan abrasi pantai), perubahan iklim serta ancaman bencana alam (banjir, longsor, abrasi dan instruksi air laut).
- n. Kesadaran masyarakat atas kelestarian lingkungan yang sangat rendah dan lemahnya penegakan hukum (*Law Enforcement*) serta rendahnya pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang ada.
- o. Pengetahuan dan keterampilan teknis aparat masih rendah.
- p. Lemahnya dukungan perbankan dan lembaga keuangan.
- q. Mutu produk yang masih rendah, Sistem pengendalian dan pengawasan mutu belum berjalan dengan baik.
- r. Isu perdagangan internasional seperti: Isu kualitas (ISO 9000), isu lingkungan (ISO 14000), isu Ham, isu tenaga kerja, isu responsible fisheries, isu Keamanan pangan (Food Safety Attributes) serta Potensi embargo Negara Uni Eropa, Amerika dan Jepang terhadap produk perikanan yang cukup besar.
- s. Potensi konflik pemanfaatan ruang sangat besar (konflik Institusional, konflik sosial, konflik teknologi dll).

2.4.2 Peluang

- a. Dukungan pemerintah melalui regulasi dan swasta terhadap pengembangan usaha perikanan dan kelautan semakin baik.
- b. Peluang usaha di bidang perikanan semakin terbuka.
- c. Penerapan CBIB dan CPIB serta sertifikasi tambak
- d. Dukungan permodalan oleh pemerintah, swasta dan perbankan dengan bentuk kredit murah dan pola kemitraan.
- e. Kelembagaan nelayan, pembudidaya semakin berkualitas dan berkembang.
- f. Kualitas sumberdaya manusia perikanan dan kelautan yang berbasis Gender semakin meningkat dan bertambah.
- g. Pemanfaatan dan pengawasan sumberdaya alam yang optimal dan bertanggung jawab.

RENCANA STRATEGIS 2018 - 2023

- h. Pencegahan degradasi atau kerusakan lingkungan semakin intensif.
- i. Peningkatan mutu dan keamanan produk hasil perikanan.
- j. Peningkatan kapasitas melalui inovasi teknologi, modal, pasar, penentuan kawasan dan sinkronisasi kebijakan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pembangunan Kelautan dan Perikanan yang telah dilaksanakan menggambarkan layanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan yang senantiasa menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternal merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak dapat diabaikan. Isu yang diuraikan yaitu keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan memberikan dampak yang signifikan di masa datang dan akan berpengaruh terhadap layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan diperoleh dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan di masa lima tahun mendatang. Informasi berdasarkan perumusan isu-isu strategis sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai berikut :

Tabel.3.1**Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Produktivitas dan daya saing produksi kelautan dan perikanan masih rendah	Sarana dan prasarana pendukung masih terbatas	Pengelolaan sumberdaya dan kebutuhan sarana dan prasarana tidak terstruktur
2	Nilai tambah produk olahan dan pemasaran belum optimal dan berdaya saing	Penerapan inovasi dan teknologi pada produk olahan masih terbatas	Penguatan aparatur yang terampil berinovasi dan pembinaan daya saing produk perikanan yang masih rendah
3	Masih lemahnya manajemen pelabuhan perikanan dan TPI sehingga kualitas produksi kurang	Sarana dan prasarana pelabuhan belum Optimal	Pembinaan terhadap nelayan dan petugas pelabuhan belum Optimal
4	Kualitas Kelembagaan Nelayan, Pembudidaya & Pengolah serta Kesenjangan Gender dalam kelembagaan kelompok	Kelompok nelayan masih menggunakan sarana prasarana alat tangkap tradisional dan Masih kurangnya Kelompok nelayan dalam bentuk korporasi	Kualitas SDM nelayan sebagian besar masih relatif rendah
5	Sebagian besar operasional usaha nelayan skala kecil bergantung pada Ponggawa Sawi	Kurangnya informasi akses perbankan	Akses untuk permodalan bagi pengembangan usaha perikanan terbatas
6	Masih maraknya Kegiatan Illegal, Unregulated and Unreported (IUU) Fishing	Kegiatan pengawasan belum optimal	Kurangnya sarana prasarana dan SDM penegak hukum di laut
7	Terjadinya konflik kepentingan antar sektor kelautan dan perikanan dengan sektor pertambangan khususnya di wilayah laut dan pesisir serta Padat tangkap (Overfishing) di perairan pantai	Zona pemanfaatan ruang yang berada di laut dan pesisir belum maksimal dipedomani	Dokumen RZWP3K dan rencana alokasi ruang belum dimanfaatkan
8	Kondisi terumbu karang yang persentasinya lebih besar sudah dalam keadaan	Degradasi habitat dan ekosistem pesisir dan laut	Kebijakan "limited access" belum diterapkan secara menyeluruh.

RENCANA STRATEGIS 2018 – 2023

	rusak dan Penurunan kuantitas mangrove akibat adanya eksploitasi besar-besaran		
9	Mekanisme pengumpulan data perikanan masif bersifat masif dan Belum adanya sistem pengelolaan data yang terintegrasi	Sistem data belum terkoordinasi dengan baik	Sistem pendataan dan informasi perikanan yang belum andal dan masih parsial

Berdasarkan tabel di atas, terdapat 4 aspek yang menjadi dasar penentuan permasalahan yaitu dari aspek pelayanan perangkat daerah, arahan RPJMD, arahan RTRW dan arahan KLHS. Selanjutnya analisis isu-isu strategis yang berhubungan atau mempengaruhi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan dari faktor-faktor eksternal seperti yang termuat di tabel bawah ini.

Tabel.3.2

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan

No	<i>Bidang Urusan Dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah</i>	<i>Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)</i>	<i>Permasalahan</i>	<i>Faktor –Faktor Penentu Keberhasilan</i>
8	Kelautan dan Perikanan			
8.1	Produksi perikanan	Melampaui (>)	Produk yang dijual dalam bentuk raw material	Peningkatan diversifikasi produk agar bernilai tambah,
			Kualitas dan mutu produk perikanan baik dari budidaya maupun hasil tangkapan belum optimal	Penerapan CBIB dan Cara Penanganan Ikan baik hasil tangkapan maupun budidaya
			Produksi perikanan tangkap didominasi ikan-ikan pelagis	Restrukturisasi alat tangkap ikan dari alat tangkap ikan pelagis ke alat tangkap ikan demersal
			Kurangnya akses pasar domestik	Penguatan kemitraan dan jaringan pasar,

RENCANA STRATEGIS 2018 - 2023

			dan ekspor	koordinasi lintas sektor
8.2	Konsumsi ikan	Melampaui (>)	Sistem Logistik belum lancar	Peningkatan Sarpras Logistik
8.3	Cakupan bina kelompok nelayan	Sesuai (=)	Kualitas SDM kelompok masih kurang	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat
8.4	Produksi perikanan kelompok nelayan	Sesuai (=)	Sarana dan prasarana alat tangkap yang tidak mendukung dalam pencapaian produksi kelompok nelayan	Peningkatan sarana pendukung alat tangkap
			SDM nelayan dalam mengoperasikan kapal modern masih kurang	Penguatan kelompok nelayan
			Sistem pendataan produksi kelompok masih masif	Peningkatan SDM dan Sarana pengolahan data
8.5	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial	Belum tercapai (<)	Kawasan belum teridentifikasi optimal krn terbatasnya sarpras	Peningkatan layanan infrastruktur
8.6	Nilai tukar nelayan	Sesuai (=)	Pola kehidupan masyarakat nelayan yang konsumtif	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat

Masalah utama yang dihadapi Sektor Kelautan dan Perikanan adalah tersedianya bahan baku yang cukup namun tidak ada peningkatan diversifikasi pada produk sehingga kurang bersaing pada pangsa pasar baik domestik maupun ekspor. Kemudian Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan belum optimal karena keterbatasan sarana dan prasarana untuk peningkatan pengelolaan kawasan lindung perairan.

Tabel 3.3
Permasalahan yang relevan dengan Program Kegiatan

No	Permasalahan	Program	Indikator Kinerja	Target				
				2019	2020	2021	2022	2023
1.	Produk yang dijual dalam bentuk raw material, Kualitas dan mutu produk perikanan baik dari budidaya maupun hasil tangkapan belum optimal	Program Hilirisasi Perikanan (Prioritas)	Nilai hilirisasi produksi perikanan (Rp. Trilyun)	18,85	19,79	20,78	21,82	22,95
2	Produk yang dijual dalam bentuk raw material, Kualitas dan mutu produk perikanan baik dari budidaya maupun hasil tangkapan belum optimal	Program Peningkatan Produksi Kelautan Dan Perikanan	Jumlah Produksi Garam Rakyat (ton)	91.176,69	95.735,52	100.522,30	105.548,41	110.825,83
3	Produksi perikanan tangkap didominasi ikan-ikan pelagis,		Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	4.656.858	5.088.024	5.559.907	6.076.403	6.641.782
			Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	363.835	369.365	374.981	380.743	386.644
4	Kurangnya akses pasar domestik dan ekspor, Sistem Logistik belum lancar, Kualitas SDM kelompok masih kurang	Program Penerapan Mutu, Pengembangan Usaha Dan Daya Saing	Nilai Ekspor Produk KP US\$ juta	374.429	411.872	453.059	498.365	548.

RENCANA STRATEGIS 2018 – 2023

No	Permasalahan	Program	Indikator Kinerja	Target				
				2019	2020	2021	2022	2023
			Volume Ekspor Produk KP (ton)	143.685,41	158.053,95	173.859,35	191.245,28	200.154
			Jumlah produksi olahan konsumsi dan non konsumsi (ton)	26.931,21	28.277,77	29.691,66	31.176,24	32.735,05
5	Perlindungan SDA dan keberlanjutan daya dukung lingkungan	Program pengawasan, konservasi, penataan dan rehabilitasi pesisir dan laut	Cakupan Luas Kawasan Konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan (Ha)	941.210,88	1.008.321,53	1.034.535,52	1.037.262,09	1.038.851,36
			Cakupan Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (%)	20	20	20	20	20
			Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologi yang aman	20%	20%	20%	20%	20%

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Program Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi, Misi dan Program Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun ke depan dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam rangka mewujudkan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yaitu **Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter**, dengan Misi yang diamanahkan adalah **Misi ke-5 yaitu Meningkatkan Produktifitas dan Daya Saing Produk Sumberdaya Alam yang Berkelanjutan**. Dalam pencapaian visi, misi dan sasaran di atas tentunya Dinas Kelautan dan Perikanan harus dapat mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong yang mempengaruhi dari tiap aspek kajian, baik itu dari sisi permasalahan berdasarkan pelayanan perangkat daerah, arahan RPJMD, arahan RTRW dan arahan KLHS.

Berdasarkan telaahan terhadap pelayanan perangkat daerah, maka Dinas mengidentifikasi 3 permasalahan utama, yaitu produksi, nilai tambah serta akses permodalan, sedangkan berdasarkan arahan RPJMD 2018-2023, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah konflik kepentingan antar sektor. Untuk telaahan berdasarkan arahan RTRW, maka permasalahan yang dihadapi adalah pembangunan kawasan kelautan dan perikanan yang belum optimal dan dari sisi arahan KLHS maka permasalahan yang masih dihadapi adalah proporsi penangkapan ikan dan praktek IUU Fishing. Hasil identifikasi Dinas Kelautan dan Perikanan tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan dan berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Tabel. 3.3
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan
Dinas Kelautan dan Perikanan terhadap Pencapaian Visi, Misi dan
Program Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

Visi Sulawesi Selatan : Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter				
No	Misi dan Program /Sasaran KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Misi 3 : Misi 5 : Meningkatkan produktivitas dan daya saing produk sumberdaya Alam yang berkelanjutan Sasaran 5.1: Meningkatkan produktivitas dan daya saing produk sektor perekonomian berbasis sumberdaya alam Program : Hilirisasi Perikanan Program Pendukung: 1. Peningkatan Produksi Kelautan dan Perikanan 2. Penerapan Mutu, Pengembangan Usaha dan Daya Saing, 3. Pengawasan Konservasi, Penataan, dan Rehabilitasi Pesisir dan Laut	1. Produktivitas dan daya saing produksi perikanan masih rendah	Sarana dan prasarana pendukung masih terbatas	Potensi sumberdaya yang cukup besar dan Revitalisasi Sistem Produksi
		2. Nilai tambah produk olahan dan pemasaran belum optimal dan berdaya saing	Penerapan inovasi dan teknologi pada produk olahan masih terbatas	Penerapan teknologi serta membangun jejaring bisnis dengan lintas sektor
		3. Masih lemahnya manajemen pelabuhan perikanan dan TPI sehingga kualitas produksi kurang	Sarana dan prasarana pelabuhan belum Optimal	Rekstrukturasasi prasarana, sarana dan pengembangan teknologi pada pelabuhan perikanan
		4. Kualitas Kelembagaan Nelayan, Pembudidaya & Pengolah serta Kesenjangan Gender dalam kelembagaan kelompok	Kelompok nelayan masih menggunakan sarana prasarana alat tangkap tradisional dan Masih kurangnya Kelompok nelayan dalam bentuk korporasi	Rekstrukturasasi prasarana, sarana dan pengembangan teknologi penangkapan ikan
		5. Sebagian besar operasional usaha nelayan skala kecil bergantung pada Ponggawa Sawi	Kurangnya informasi akses perbankan	Regulasi terkait Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan sehingga dapat dengan mudah akses pada perbankan
		6. Masih maraknya Kegiatan Illegal, Unregulated and Unreported (IUU) Fishing	Kegiatan pengawasan belum optimal	Regulasi Pengendalian pemanfaatan Ekosistem Laut, Perairan Umum dan Sumberdaya Ikan
		7. Terjadinya konflik kepentingan antar sektor kelautan dan perikanan dengan sektor pertambangan khususnya di wilayah laut dan pesisir serta Padat tangkap (Overfishing) di perairan pantai	Zona pemanfaatan ruang yang berada di laut dan pesisir belum maksimal dipedomani	Penyusunan RAD terkait pengelolaan dan pemanfaatan pesisir dengan mengacu pada Dokumen RZWP3K

		8. Kondisi terumbu karang yang persentasinya lebih besar sudah dalam keadaan rusak dan Penurunan kuantitas mangrove dan padang lamun akibat adanya eksploitasi besar-besaran	Degradasi habitat dan ekosistem pesisir dan laut	Penguatan dan pengelolaan kelembagaan konservasi serta rehabilitasi ekosistem pesisir
--	--	--	--	---

3.3. Telaahan Renstra K/L

Analisis Renstra K/L dan SKPD Provinsi ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk mengetahui sejauhmana tingkat capaian kinerja Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan berkontribusi pada sasaran Renstra K/L atau rata-rata Kabupaten/Kota maka dapat disampaik bahwa rata-rata pencapaian kinerja Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan telah bersinergi baik secara nasional dan regional. Namun berdasarkan hasil review terhadap Renstra K/L tahun rencana ditujukan untuk mengidentifikasi potensi, peluang dan tantangan pelayanan sebagai masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis dan pilihan/kebijakan strategis dalam Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan. Upaya yang harus ditempuh adalah mensinergikan upaya penyelesaian permasalahan yang ada, baik di tingkat Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/kota.

Tabel 3.4

Tujuan dan Sasaran Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan

No.	Uraian	Capaian 2017*	Target 2018	Target 2019 di RPJMN
1.	Memperkuat Jatidiri Sebagai Negara Maritim			
	Penyelesaian pencatatan/deposit pulau-pulau kecil ke PBB (pulau)**	17.0127*** (identifikasi 1.308 dan validasi 1.071)	1.071 (verifikasi oleh Kemendagri)	17.466
2.	Pemberantasan Tindakan Perikanan Liar			
	Meningkatnya ketaatan pelaku perikanan (%)	78,24	81,00	87

3.	Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan			
	Produksi hasil kelautan dan perikanan (juta ton)	30,36	44,13	49,60 (40-50)
	1) Produksi perikanan :	24,15	33,53	38,3
	a. Tangkap	6,93	9,45	6,98
	b. Budidaya	17,22	24,08	31,32
	- Ikan	6,66	7,91	11,78
	- Rumput Laut	10,81	16,17	19,54
	2) Produksi Garam	1,10	4,10	4,50
	3) Produksi Produk ikan olahan	5,12	6,50	6,80
	Pengembangan pelabuhan perikanan	22	23	24
	Luas kawasan konservasi laut	19,14	19,30	20,00
4.	Target lainnya :			
	Konsumsi Ikan (kg/kapita/tahun)	47,34	50,65	54,49
	Nilai ekspor hasil perikanan (USD miliar)	4,51	5,00	9,50

Tahun 2017 Sulawesi Selatan berkontribusi terhadap capaian produksi hasil kelautan dan perikanan sebesar 17,39 % yaitu sebesar 4,2 juta ton yang terdiri atas produksi perikanan tangkap dan budidaya sedangkan untuk garam hanya mampu berkontribusi sebesar 3,5% yaitu sebesar 39 ribu ton. Adapun Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan garam adalah terbatasnya sarana dan prasarana produksi serta penerapan inovasi teknologi untuk dapat memproduksi setiap bulan. Kemudian untuk pengembangan pelabuhan perikanan pada tahun 2017 sebanyak 5 unit PPI. Permasalahan yang dihadapi untuk pengembangan pelabuhan perikanan yaitu masih terkendala dalam proses P3D (Pengalihan Personil dan Prasarana Daerah).

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan. Dibandingkan dengan struktur dan pola eksisting maka SKPD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan

pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan dalam lima tahun mendatang. Sehingga rancangan program beserta targetnya dapat disusun sesuai dengan RTRW tersebut.

Tabel 3.5**Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah**

No	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan PD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan PD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pengembangan kawasan produksi	Sentra Produksi	Hilirisasi dan peningkatan Produksi	Peningkatan pendapatan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah	Sentra Produksi BD Payau : Kabupaten Pinrang, Barru, Pangkep, Bone, Luwu Timur, Jeneponto, Takalar, Bulukumba, Wajo Sentra Produksi BD Laut : Takalar, Jeneponto Bantaeng, Sinjai, Pinrang, Barru, Pangkep, Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, Selayar, Palopo Sentra Produksi BD Air Tawar : Enrekang, Sidrap, Tator, Torut, Soppeng Sentra Produksi Penangkapan Ikan : Sinjai, Bulukumba, Takalar, Bone, Palopo, Selayar
2	Pengembangan kawasan Hilirisasi	Pusat pertumbuhan	Hilirisasi	pertumbuhan ekonomi daerah	Makassar, Maros, Bantaeng
3	Pengembangan Kawasan Industri	Hinterland dan pemasaran (Outlet)	Hilirisasi, Penerapan Mutu, Pengembangan Usaha dan Daya Saing	pertumbuhan ekonomi daerah	Makassar, Maros
4	Pengembangan Kawasan Konservasi	Zonasi Wilayah Pesisir dan P3K	Pengawasan, Konservasi, Penataan Dan Rehabilitasi Pesisir Dan Laut	Keberlanjutan dan kelestarian lingkungan	Luwu Utara, Selayar, Pangkep, Makassar, Barru
5	Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus	Kawasan Strategis		pertumbuhan ekonomi daerah	Kepulauan Selayar

Dalam rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis terli-hat bahwa pola penggunaan dan pemanfaatan kawasan dititik beratkan pada konsep agribisnis perikanan yang terdiri dari sub-sistem agribisnis hulu (*up-streem*

agribusiness) berupa ragam kegiatan industri dan perdagangan sarana produksi perikanan, sub-sistem budidaya/penangkapan (*on-farm agribusiness*) yang menghasilkan komoditas perikanan, sub-sistem agribisnis hilir (*down-stream agribusiness*) berupa ragam kegiatan industri pengolahan hasil perikanan dan pemasaran, dan sub-sistem jasa penunjang (*supporting institution*) yang mendukung pengembangan semua sub-sistem, meliputi : perbankan, transportasi, penelitian dan pengembangan, kebijakan pemerintah, penyuluhan, dan lain-lain. Semua sub-sistem berada dalam simpul keterkaitan fungsional yang saling mendukung dalam eksistensi sistem yang terpadu dalam berakselerasi mensejahterakan kehidupan masyarakat.

Struktur tata ruang menentukan kualitas interkoneksi antar simpul-simpul wilayah dalam kawasan, sekaligus merupakan suatu komunitas yang utuh yang memungkinkan sebuah kawasan berartikulasi secara optimal terhadap dinamika lingkungan eksternalnya. Untuk mengintegrasikan titik-titik ruang, maka dibuat struktur ruang berdasarkan fungsinya masing-masing. Secara garis besar, rencana struktur ruang, Peran kawasan terkait dengan rencana tata ruang bagi pengembangan perekonomian, Pengembangan daya tarik kawasan (dukungan regulasi dan kemudahan investasi).

Rencana Struktur Tata Ruang menentukan interkoneksi antar simpul-simpul wilayah dalam kawasan, secara garis besar rencana struktur ruang kawasan minapolitan dikabupaten/kota terdiri atas : Pusat satuan kawasan perikanan, pusat distrik minapolitan (pusat pertumbuhan), kota minapolis (Sentra produksi), wilayah-wilayah hinterland, dan kota pemasaran (outlet). Mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029, Rencana pengembangan kawasan strategis nasional dan kawasan budidaya nasional dengan sektor unggulan Perikanan meliputi :

1. Kawasan Andalan Darat

- a. Kawasan andalan Mamminasata dan sekitarnya
- b. Kawasan andalan Palopo dan sekitarnya
- c. Kawasan andalan Bulukumba-Watampone dan sekitarnya
- d. Kawasan andalan Pare-pare dan sekitarnya

2. Kawasan Andalan Laut

- Kawasan andalan Laut Kapoposan dan sekitarnya

- Kawasan andalan Laut Teluk Bone dan sekitarnya
- Kawasan andalan Laut Singkarang – Takabonerate dan sekitarnya
- Kawasan andalan Laut Selat Makassar dan sekitarnya

3. Kawasan potensial yang merupakan Kawasan Strategis Provinsi (KSP)

Dimanfaatkan untuk budidaya unggulan meliputi

- a. Kawasan potensial budidaya Rumput Laut meliputi wilayah perairan pantai dan tambak di masing-masing kabupaten : Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Sinjai, Bone, Luwu, Palopo, Luwu Utara, dan Luwu Timur.
- b. Kawasan potensial budidaya udang bandeng meliputi tambak-tambak di masing-masing kabupaten : Pinrang, Barru, Pangkep, Bone dan Wajo
- c. Kawasan potensial perikanan tangkap meliputi Selat Makassar, Laut Flores dan Teluk Bone

4. Kawasan Wisata Bahari yang merupakan Kawasan Strategis Provinsi (KSP)

- a. Kawasan wisata bahari Mamminasata dan sekitarnya (kota Makassar, Kabupaten Gowa, Kabupaten Maros, Kabupaten Takalar dan Kabupaten Pangkep)
- b. Kawasan Wisata bahari Takabonerate (Kabupaten Kepulauan Selayar)

5. Indikasi Arah Peraturan Zonasi untuk Pola Ruang

Peraturan zonasi untuk kawasan pantai berhutan bakau disusun dengan memperhatikan :

- a. Pemanfaatan ruang untuk kegiatan pendidikan, penelitian dan wisata alam
- b. Ketentuan pelarangan pemanfaatan kayu bakar; dan
- c. Ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat mengubah mengurangi luas dan atau mencemari ekosistem bakau dan ekosistem lainnya seperti rawa pasang surut dan padang lamun.

Peraturan zonasi untuk taman nasional dan taman nasional laut disusun dengan memperhatikan :

- a. Pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa merubah bentang alam
- b. Pemanfaatan ruang kawasan untuk kegiatan budidaya hanya diizinkan bagi penduduk asli di zona penyangga dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan dan di bawah pengawasan ketat
- c. Ketentuan pelarangan kegiatan budidaya di zona inti
- d. Ketentuan pelarangan kegiatan budidaya yang berpotensi mengurangi tutupan vegetasi atau terumbu karang di zona penyangga.

Peraturan zonasi untuk terumbu karang disusun dengan memperhatikan

- a. Pemanfaatan untuk pariwisata bahari
- b. Ketentuan pelarangan kegiatan penangkapan ikan dan pengambilan terumbu karang
- c. Ketentuan pelarangan kegiatan selain yang dimaksud pada huruf b yang dapat menimbulkan pencemaran air

6. Indikasi Arahan Peraturan Zonasi untuk Kawasan Budidaya

Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukkan perikanan disusun dengan memperhatikan :

- a. Pemanfaatan ruang untuk pemukiman pembudidaya dan/atau nelayan dengan kepadatan rendah
- b. Pemanfaatan ruang untuk kawasan pemijahan dan atau kawasan hijau
- c. Pemanfaatan sumber daya perikanan agar tidak melebihi potensi lestari.

Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukkan industri disusun dengan memperhatikan :

- a. Pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri baik yang sesuai dengan kemampuan penggunaan teknologi, potensi sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia di wilayah sekitarnya
- b. Pembatasan pembangunan perumahan baru sekitar kawasan peruntukkan industri

Provinsi Sulawesi Selatan memiliki sumber daya pesisir yang cukup potensial dikembangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan daerah. Berbagai potensi tersebut seperti perikanan, pariwisata, perhotelan, kepelabuhanan, dan industri pesisir. Mengingat potensi yang besar tersebut, maka dalam pengelolaannya perlu dilakukan secara terpadu (*Integrated Coastal Management*) dengan melibatkan semua *stakeholder* terkait. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa pengelolaan wilayah pesisir belum dilaksanakan secara optimal.

Wilayah pesisir Sulsel telah membentuk budaya tradisional masyarakat yang telah berlangsung terus-menerus selama bertahun-tahun dengan mengelola sumberdaya pesisir yang mencakup berbagai jenis ikan dan kerang-kerangan sebagai sumber protein hewani, mangrove, terumbu karang, padang lamun dan estuaria.

Potensi sumber daya pesisir tersebut telah mengalami degradasi ekosistem terutama populasi ikan dan biota lainnya yang cukup terdapat didalamnya sebagai akibat dari dampak laju pertumbuhan penduduk, kegiatan pembangunan fisik, peningkatan sampah organik dan anorganik serta kegiatan-kegiatan ilegal dalam industri perikanan, pertambangan, dan pembalakan.

Peningkatan konsumsi dan pemanfaatan sumberdaya pesisir yang berlebihan, tanpa mempertimbangkan aspek pelestarian lingkungannya, akan semakin menurunkan daya lingkungan dan nilai serta keberadaan potensi sumberdaya pesisir, sehingga mengancam potensi ekonomi dan sosial budaya yang terkandung didalamnya. Hal ini tentunya akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan, karena sebagian masyarakat lokal yang berdomisili di wilayah pesisir di Sulsel bermata pencaharian sebagai nelayan yang menggantungkan kehidupannya pada sumberdaya pesisir, khususnya kegiatan perikanan sebagai sumber pendapatan utamanya.

Faktor pendorong yang diperkirakan akan mempengaruhi kecenderungan masa depan :

1. Meningkatnya degradasi ekosistem sumberdaya alam diwilayah pesisir termasuk laju degradasi mangrove semakin hari meningkat seiring dengan meningkatnya eksploitasi terutama alih fungsi (konversi) untuk tujuan lain seperti tambak dan pemukiman
2. Penangkapan ikan
3. Pencemaran laut

Perkiraan dampak negatif dan positif faktor pendorong terhadap kecendrungan masa depan dimana saat ini ekosistem dominan diwilayah pesisir Sulawesi Selatan seperti:

1. Ekosistem mangrove, rawa pasang surut, padang lamun dan terumbu karang sedang mengalami kerusakan yang sangat berat.
2. Dari total kerusakan terumbu karang sebesar 42% (29 % rusak berat, 23% rusak sedang) dan hanya 6% yang sangat baik.
3. Pada umumnya kerusakan tersebut hancur akibat masih maraknya kegiatan illegal fishing dan pola penangkapan Ikan yang tidak ramah lingkungan yang dilakukan para nelayan untuk menangkap ikan sehingga sejumlah habitat lainnya yang berada disekitar kawasan lokasi penangkapan ikanpun ikut rusak.
4. Masih terdapat terumbu karang yang dapat diselamatkan hal tersebut disebabkan karena lokasinya berada daerah pesisir yang dilindungi pemerintah sehingga akses masyarakat terbatas pada lokasi – lokasi tersebut.
5. Laju degradasi mangrove semakin hari semakin meningkat seiring dengan maraknya eksploitasi terutama alih fungsi (konversi) untuk tujuan lain seperti tambak dan pemukiman. Jumlah total hutan mangrove seluas 22.35 ha, diperkirakan 40% yang telah mengalami gangguan dan dalam proses dijadikan tambak. Hutan mangrove tersebut tersebar di 18 kab/kota.

6. Kerusakan memanjang dari wilayah pesisir pantai barat yang mencakup kabupaten Pangkep, Maros, Takalar hingga kewilayah pantai timur, mulai dari Kabupaten Sinjai hingga daerah Luwu.

Ketika hutan mangrove rusak, maka ekosistem disekitarnya juga akan rusak dan bahkan pengaruhnya bisa berakibat luas yaitu terjadi kepunahan ekosistem. Bila pemerintah setempat melakukan pembiaran dikhawatirkan keberlangsungan ekosistem laut akan punah dan kerusakan habitat laut lainnya dan diyakini akan berdampak pada kehidupan disekitarnya khususnya para nelayan. Hal ini tentunya akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan nelayan sebagai masyarakat lokal yang berdomisili di wilayah pesisir di Sulawesi Selatan yang bermata pencaharian sebagai nelayan yang menggantungkan kehidupannya pada sumberdaya pesisir khususnya kegiatan perikanan sebagai sumber pendapatan utamanya dimana 80% masyarakat pesisir adalah masyarakat miskin dengan tingkat pendidikan rendah. Disisi lain dengan semakin berkurangnya populasi ikan dikawasan pesisir mengakibatkan hasil tangkapan nelayan pun semakin berkurang dan membuat nelayan terpaksa mencari ikan pada jarak yang semakin jauh melewati wilayah laut. Semakin bertambah besar-nya biaya operasional para nelayan dikhawatirkan kondisi tersebut dapat mengakibatkan konflik antar nelayan yang saling memperebutkan lokasi penangkapan ikan. Dengan demikian diperlukan perhatian lebih dari pemerintah untuk mengatur dan mengelolah wilayah pesisir ini agar nelayan menangkap ikan tanpa merusak ekosistem lainnya dan terlibat konflik sehingga dapat meningkatkan taraf hidupnya dengan mencoba sumber mata pencaharian baru seperti pengembangan rumput laut dll.

Situasi terburuk yang diperkirakan akan terjadi jika semakin meningkatnya kegiatan illegal fishing dan pola penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan dikhawatirkan ketergantungan ekosistem laut akan punah dan kerusakan habitat lautpun diyakini akan berdampak pada kehidupan disekitarnya khususnya pada nelayan. Situasi terburuk yang diperkirakan akan terjadi jika semakin meningkatnya laju degradasi mangrove dikhawatirkan akan berdampak pada rusaknya ekosistem pesisir, hilangnya habitat satwa daratan dan lautan, hilangnya pulau, kematian dari berbagai jenis satwa dan flora serta dampak-dampak lingkungan lainnya seperti abrasi, intrusi, banjir dan kematian

organisme perairan serta mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat pesisir.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Dalam penentuan Isu-Isu Strategis, maka perlu mereview kembali faktor-faktor dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan ditinjau dari permasalahan pembangunan daerah yaitu :

1. Produktivitas dan daya saing produksi perikanan masih rendah,
2. Nilai tambah produk olahan dan pemasaran belum optimal dan berdaya saing,
3. Masih lemahnya manajemen pelabuhan perikanan dan TPI sehingga kualitas produksi kurang,
4. Kualitas Kelembagaan Nelayan, Pembudidaya & Pengolah serta Kesenjangan Gender dalam kelembagaan kelompok,
5. Sebagian besar operasional usaha nelayan skala kecil bergantung pada Ponggawa Sawi,
6. Masih maraknya Kegiatan Illegal, Unregulated and Unreported (IUU) Fishing,
7. Terjadinya konflik kepentingan antar sektor kelautan dan perikanan dengan sektor pertambangan khususnya di wilayah laut dan pesisir serta Padat tangkap (Overfishing) di perairan pantai
8. Kondisi terumbu karang yang persentasinya lebih besar sudah dalam keadaan rusak dan Penurunan kuantitas mangrove akibat adanya eksploitasi besar-besaran

Sedangkan pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam rangka menjalankan amanah berdasarkan tugas pokok dan fungsi, maka Dinas Kelautan dan Perikanan didukung oleh :

1. Bidang teknis sebanyak 4 unit kerja
-

2. Unit Pelayanan Teknis sebanyak 4 unit
3. Cabang Dinas Kelautan sebanyak 7 unit kerja

Tabel 3.6**Jumlah kebutuhan Pegawai pada Dinas Kelautan dan Perikanan**

Unit Kerja	Jumlah Pegawai (orang)	Jumlah Ideal yang dibutuhkan (Orang)
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	130	132
UPT BPMPP	8	28
UPT PBPL	7	28
UPT PELABUHAN 1	7	30
UPT PELABUHAN 2	7	30
CDK WILAYAH MAMMINASATA	7	35
CDK WILAYAH PANGKEP KEP	6	35
CDK WILAYAH SELATAN	8	35
CDK WILAYAH KEP. SELAYAR	6	35
CDK WILAYAH AJATAPPARENG	6	35
CDK WILAYAH BOSOWASI	7	35
CDK WILAYAH LUWU RAYA	5	35
JUMLAH	204	493
KEBUTUHAN PEGAWAI	B - A	289

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kinerja pelayanan yaitu berdasarkan hasil analisis peta jabatan maka Dinas Kelautan dan Perikanan masih kekurangan pegawai sebanyak 289 orang.

Kemudian untuk mencapai Sasaran Strategis pada Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan 2014-2019 dengan menitikberatkan pada Pengembangan sentra industri kelautan dan perikanan yang memiliki komoditas unggulan dan menerapkan teknologi inovatif dengan mutu dan keamanan konsumsi terjamin dengan sasaran target sampai lima tahun dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel. 3.7

Sasaran Strategis Nasional Sektor Kelautan dan Perikanan

NO	SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA	Target sampai dengan Tahun 2019
1	Indeks Kesejahteraan Masyarakat KP (indeks)	51
2	Pertumbuhan PDB Perikanan (%)	12
3	Persentase kepatuhan (<i>compliance</i>) pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku (%)	87
4	Jumlah pulau-pulau kecil yang Mandiri (pulau)	31
5	Nilai Pengelolaan wilayah KP yang berkelanjutan (%)	65
6	Nilai peningkatan ekonomi KP (%)	100
7	Produksi perikanan (juta ton)	39,97
8	Produksi garam rakyat (juta ton)	4,5
9	Nilai ekspor hasil perikanan (USD miliar)	9,54
10	Konsumsi ikan (kg/kap/thn)	54,49

Sedangkan Sasaran Jangka Menengah pada Renstra Provinsi yaitu : Meningkatkan produktivitas dan daya saing produk sektor perekonomian berbasis sumberdaya Kelautan dan Perikanan dengan fokus pada Komoditi Unggulan dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas agar dapat berdaya saing sehingga memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi daerah.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pengembangan hilirisasi berbasis kawasan, maka dikembangkan melalui :

- Mengembangkan komoditi unggulan dan komoditi penunjang melalui sistem agribisnis dengan pola klaster (*cluster*).
- Mengelompokkan dan menentukan struktur ruang berdasarkan keunggulan masing-masing wilayah dalam kawasan.
- Mengembangkan prasarana dan sarana yang dapat meningkatkan sinergitas kegiatan dalam kawasan.
- Mengelompokkan dan menentukan pola ruang kawasan berdasarkan zona-zona kawasan.

RENCANA STRATEGIS 2018 - 2023

Sesuai dengan klausul yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, diperlukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai instrumen pendukung dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. KLHS merupakan *self assesment* untuk melihat sejauh mana Kebijakan, Rencana dan/atau Program yang diusulkan oleh pemerintah daerah dengan mempertimbangkan prinsip pembangunan berkelanjutan. KLSH diperlukan karena prinsip pembangunan berkelanjutan perlu terintegrasi dalam pengambilan keputusan melalui informasi yang lebih komprehensi tentang lingkungan hidup. Fakta menunjukkan bahwa laju degradasi sumberdaya lahan dan kualitas lingkungan hidup semakin meningkat, dan umumnya bersifat kausalitas lintas wilayah dan antar sektor. Oleh karena itu, diperlukan instrumen pengelolaan lingkungan hidup yang memungkinkan penyelesaian masalah yang bersifat berjenjang (dari pusat ke daerah), lintas wilayah dan antar sektor. Salah satu sumber permasalahan degradasi sumberdaya lahan dan kualitas lingkungan hidup berawal dari proses pengambilan keputusan, sehingga perlu upaya penanggulangan degradasi sumberdaya lahan dan kualitas lingkungan hidup .

Berdasarkan dari faktor-faktor permasalahan pelayanan dan implikasi RTRW dan KLHS, maka dilakukan analisis penilaian isu strategis dengan menggunakan metode pembobotan dengan cara menentukan skor terhadap masing-masing kriteria yang telah ditetapkan.

Tabel.3.7

Pembobotan Permasalahan yang dihadapi Dinas Kelautan dan Perikanan berdasarkan Kajian

No	Permasalahan	Nilai Skala Kriteria ke						Total Skor
		1	2	3	4	5	6	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)
1	Produktivitas dan daya saing produksi perikanan masih rendah	20	10	20			15	65
2	Nilai tambah produk olahan dan pemasaran belum optimal dan berdaya saing	20	10	20			15	65
3	Masih lemahnya manajemen pelabuhan perikanan dan TPI sehingga kualitas produksi kurang	20	10		10		15	55
4	Kualitas Kelembagaan Nelayan, Pembudidaya & Pengolah serta Kesenjangan Gender dalam kelembagaan kelompok	20	10		10		15	55
5	Sebagian besar operasional usaha nelayan skala kecil bergantung pada Ponggawa Sawi	20	10		10	15		55

6	Masih maraknya Kegiatan Illegal, Unregulated and Unreported (IUU) Fishing		10	20	10			40
7	Terjadinya konflik kepentingan antar sektor kelautan dan perikanan dengan sektor pertambangan khususnya di wilayah laut dan pesisir serta Padat tangkap (Overfishing) di perairan pantai		10	20	10			40
8	Kondisi terumbu karang yang persentasinya lebih besar sudah dalam keadaan rusak dan Penurunan kuantitas mangrove akibat adanya eksploitasi besar-besaran		10	20	10			40

Tabel.3.8
Skor Kriteria penentuan isu strategis

No	Kriteria	Bobot
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran renstra K/L atau Renstra provinsi/Kabupaten/Kota	20
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab DKP Prop Sulsel	10
3	Dampak yang ditimbulkannya terhadap publik cukup besar	20
4	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah	10
5	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
6	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	15
	Total	100

Kemudian melakukan penilaian isu strategis terhadap kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan skala tersebut. Hasil pembobotan menunjukkan bahwa terdapat 2 permasalahan yang memiliki jumlah bobot tertinggi dengan nilai 65 poin yaitu permasalahan nomor 1 dan 2 dengan variasi bobot angka yang berbeda. Jika kita mengkaji lebih jauh ternyata kedua permasalahan ini dapat dijadikan satu bahasa yang lebih sederhana dan diangkat menjadi isu strategis, yaitu belum optimalnya pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan berbasis pengembangan kawasan kelautan dan perikanan secara berdaya saing.

Selanjutnya, terdapat 2 permasalahan yang memiliki jumlah bobot yang sama juga dengan nilai 55 poin, yaitu permasalahan nomor 3, nomor 4 dan nomor 5. Kembali, secara garis besar permasalahan ini dapat lebih disederhanakan dan diangkat menjadi satu isu strategis berikutnya, yaitu masih rendahnya SDM yang terampil pada pelaku aparat dan pelaku usaha perikanan serta akses permodalan bagi pelaku usaha perikanan.

Kemudian permasalahan nomor 8 memiliki bobot dengan nilai 50 dapat diangkat menjadi satu isu strategis, yaitu . Terakhir, permasalahan yang memiliki jumlah bobot terendah, yaitu 40 poin adalah permasalahan nomor 6, nomor 7 dan nomor 8. Secara lebih sederhana dapat diangkat menjadi isu strategis yang terakhir, yaitu degradasi daya dukung Lingkungan Pesisir dan Laut serta ketaatan pelaku usaha perikanan terhadap peraturan .

Secara berurutan berdasarkan pembobotan yang telah dilaksanakan seperti pada tabel di atas, maka dapat disampaikan bahwa Isu Strategis Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan pada periode 2018- 2023 adalah:

1. Belum optimalnya pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berdaya saing berbasis pengembangan kawasan akibat masih rendahnya SDM yang terampil pada aparaturnya dan pelaku usaha perikanan serta dukungan infrastruktur dan sarana prasarana perikanan.
2. Kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil masih dibawah serta kurangnya akses permodalan untuk mendukung
3. Degradasi daya dukung Lingkungan Pesisir dan Laut serta masih rendahnya ketaatan pelaku usaha perikanan terhadap peraturan

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan merefleksikan konteks pembangunan yang dihadapi Dinas Kelautan dan Perikanan dan memiliki keterkaitan dengan Visi yang ingin dicapai. Pernyataan tujuan akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sesuai dengan Tabel T-C.25 sebagaimana berikut ini.

Tabel. 4.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sulawesi Selatan tahun 2018-2023

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Kondisi Awal (Data proyeksi) 2018	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE -				
					2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatkan Akuntabilitas Perangkat Daerah		Indeks Reformasi Birokrasi OPD	-	75,00	75,15	75,30	75,45	75,60
1.1		Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah	Nilai Sakip OPD (%)	80,82	80,85	80,87	80,89	80,91	80,93
			Rata-rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah (Evaluasi Dokumen Perencanaan) (%)	95	95	95	95	95	95
			% ASN Nilai SKP Kategori minimal Baik	80	82	83	84	85	86
2	Meningkatkan produksi dan nilai tambah produk perikanan yang berdaya saing		Pertumbuhan PDRB Subsektor Perikanan (%)	9,00	10,00	11,00	12,10	13,31	14,64
2.1		Meningkatnya produksi perikanan dengan menambah jumlah faktor produksi dan produktivitas produksi	Produksi Perikanan (ton)	4.713.545,9	5.117.387,5	5.558.740,8	6.041.173,54	6.568.596,04	7.145.295,69
			Produksi perikanan kelompok nelayan (ton)	79.177,84	80.010,21	80.810,31	81.618,40	82.434,60	83.258,94
			Kontribusi PDRB Perikanan (%)	8,4	8,6	8,8	9	9,2	9,3
			Cakupan Bina Kelompok Nelayan (%)	24,94	30,18	33,20	36,51	40,17	44,18

RENCANA STRATEGIS 2018 - 2023

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN SASARAN	Kondisi Awal (Data proyeksi) 2018	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE -				
					2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.2		Meningkatnya konsumsi ikan dan daya saing produk kelautan dan perikanan	Konsumsi Ikan (kg/kap/th)	53,00	53,60	54,10	54,60	55,20	55,70
			Kontribusi Ekspor Perikanan (%)	5,37	5.63	5.92	6.21	6.52	6.85
2.3		Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pelaku usaha kelautan dan perikanan	NilaiTukar Nelayan (NTN) (%)	106,30	107.79	107.89	108	108.11	108.22
3.	Meningkatkan kelestarian dan kualitas lingkungan sumberdaya kelautan dan perikanan		Potensi Penurunan emisi GRK (Juta ton CO2eq)	-	0.67	0.68	0.69	0.69	0.70
3.1		Meningkat nya kelestarian dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya alam kelautan dan perikanan	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan territorial (%)	0,24	0,26	0,28	0,30	0,32	0,34
			Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (%)	48,85	49.10	50.60	52.10	53.6	55.10

Berdasarkan uraian atas tujuan dan sasaran dari Dinas Kelautan dan Perikanan di atas serta tujuan dan sasaran dari RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan maka dapat ditarik satu garis yang linear antara keduanya. Secara lebih jelas akan digambarkan dalam bentuk tabel di bawah ini.

Tabel 4.2

Hubungan Tujuan dan Sasaran RPJMD dengan Renstra Dinas

No	RPJMD		Renstra	
	Tujuan	Sasaran	Tujuan	Sasaran
1	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	1.1.Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan	1. Meningkatkan Akuntabilitas Perangkat Daerah	1.1 Meningkatkan akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah
2	Mengoptimalkan pengelolaan Sumberdaya alam secara berdaya saing tanpa mengabaikan kelestarian dan daya dukung lingkungan hidup	2.1.Meningkatnya produktivitas dan daya saing produk sektor perekonomian berbasis sumberdaya alam	2.Meningkatkan produksi dan nilaitambah produk perikanan yang berdaya saing	2.1. Meningkatkan produksi perikanan dengan menambah jumlah faktorproduksi dan produktivitas produksi 2.2. Meningkatkan konsumsi ikan dan daya saing produk kelautan dan perikanan 2.3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat pelaku usaha kelautan dan perikanan

RENCANA STRATEGIS 2018 – 2023

No	RPJMD		Renstra	
	Tujuan	Sasaran	Tujuan	Sasaran
		2.2.Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	2.Meningkatkan kelestarian dan kualitas lingkungan sumberdaya kelautan dan perikanan	2.1 Meningkatnya kelestarian dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya alam kelautan dan perikanan

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai maka dukungan Indikator sasaran program dapat dilihat pada tebal 4.3 berikut ini :

Tabel 4.3
Indikator Tujuan, Sasaran dan Program

NO	TUJUAN DAN SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE -				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	Tujuan : Meningkatkan Akuntabilitas Perangkat Daerah		Indeks Reformasi Birokrasi OPD	75,00	75,15	75,30	75,45	75,60
1.1	Sasaran : Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah		Ni lai Sakip OPD (%)	80.85	80.87	80.89	80.91	80.93
			Rata-rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah(Evaluasi Dokumen Perencanaan) (%)	95	95	95	95	95
			% ASN Nilai SKP Kategori minimal Baik	82	83	84	85	86
1.1.1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	% Pemenuhan administrasi perkantoran	100	100	100	100	100
1.1.2		Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	% Pemenuhan sarana prasarana perkantoran	100	100	100	100	100
1.1.3		Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja	% Keterpuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu	100	100	100	100	100
1.1.4		Program Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	% ASN berkinerja sangat baik	100	100	100	100	100
2.	Tujuan : Meningkatkan produksi dan nilai tambah produk perikanan yang berdaya saing		Pertumbuhan PDRB Subsektor Perikanan (%)	10,00	11,00	12,10	13,31	14,64
2.1	Sasaran : Meningkatnya produksi perikanan dengan menambah jumlah faktor produksi dan produktivitas produksi		Produksi Perikanan (ton)	5.117.387,52	5.558.740,89	6.041.173,54	6.568.596,04	7.145.295,69
			Produksi perikanan kelompok nelayan (ton)	80.010.21	80.810.31	81.618.41	82.434.6	83.258.94
			Kontribusi PDRB Perikanan (%)	8.6	8.8	9	9.2	9.3
			Cakupan Bina Kelompok Nelayan (%)	30,18	33,20	36,51	40,17	44,18
2.1.1		Program Hilirisasi Perikanan	Nilai hilirisasi produksi perikanan (Rp. Trilyun)	18.85	19,79	20,78	21,82	22,95

RENCANA STRATEGIS 2018 - 2023

NO	TUJUAN DAN SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE -				
				2019	2020	2021	2022	2023
2.1.2		Program Peningkatan Produk Kelautan dan Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (ton)	369.365	374.981	380.743	386.644	392.687
			Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (ton)	4.656.858	5.088.024	5.559.907	6.076.403	6.641.782
			Jumlah Produksi Garam Rakyat (ton)	91.176,69	95.735,52	100.522,30	105.548,41	110.825,83
2.2	Sasaran : Meningkatkan konsumsi ikan dan daya saing produk kelautan dan perikanan		Konsumsi Ikan kg/kap/th	53.6	54,1	54,6	55,2	55,7
			Kontribusi Ekspor Perikanan (%)	5.63	5.92	6.21	6.52	6.85
2.2.1		Program Penerapan Mutu, Pengembangan Usaha dan Daya Saing	Nilai Ekspor Produk KP US\$ juta	374.429	411.872	453.059	498.365	548.
			Volume Ekspor Produk KP (ton)	143.685,41	158.053.95	173.859.35	191.245,28	200.154
			Jumlah produksi olahan konsumsi dan non konsumsi (ton)	26.931,21	28.277,77	29.691,66	31.176,24	32.735,05
2.3	Sasaran : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat pelaku usaha kelautan dan perikanan		NilaiTukar Nelayan (NTN)	107.79	107.89	108	108.11	108.22
2.3.1		Program Pengawasan, konservasi, penataan dan rehabilitasi pesisir dan laut	Cakupan Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (%)	20	20	20	20	20
3.	Tujuan : Mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan secara berdaya saing tanpa mengabaikan kelestarian dan daya dukung lingkungan hidup		Potensi Penurunan emisi GRK (Juta ton CO ₂ eq)	0.67	0.68	0.69	0.69	0.70
3.1	Sasaran : Meningkatkan kelestarian dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya alam kelautan dan perikanan		Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan territorial (%)	0,26	0,28	0,30	0,32	0,34
			Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (%)	49.10	50.60	52.10 %	53.60	55.10
3.1.1		Program Pengawasan, konservasi, penataan dan rehabilitasi pesisir dan laut	Persentase penurunan IUU Fishing (%)	9.83	8.03	7.19	6.31	5.4
			Cakupan Luas Kawasan Konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan (Ha)	941.210,88	1.008.321,53	1.034.535,52	1.037.262,09	1.038.851,36

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1.Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan

Strategi merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif, untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka melaksanakan misi untuk mewujudkan visi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Sedangkan kebijakan merupakan arah/tindakan yang harus dipedomani Dinas Kelautan dan Perikanan, dalam melaksanakan strategi untuk mencapai tujuan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan. Strategi dan arah kebijakan merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran yang akan dicapai dijabarkan dalam serangkaian kebijakan pada tabel 5.1 sesuai tabel T-C.26.

Tabel 5.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif ,Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter			
MISI : (1) Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
(1) Meningkatkan Akuntabilitas Perangkat Daerah	(1) Meningkatnya Akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah	(1) Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah	(1) Pengelolaan dan penataan administrasi sesuai aturan serta Perencanaan yang SMART
MISI : (5) Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Sumberdaya Alam yang Berkelanjutan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan produksi dan nilai tambah produk perikanan yang berdaya saing	(1) Meningkatnya produksi perikanan dengan menambah jumlah faktor produksi dan produktivitas produksi	(1.1) Pembinaan yang Inklusif bagi pelaku usaha untuk mendorong produktivitas serta Revitalisasi Wilayah-wilayah yang pernah menjadi pusat produksi (1.2) Perbaikan dan mengganti sarana dan prasarana produksi perikanan baik pada faktor produksi maupun metode kerja serta Perbaikan standar isi dalam hal mutu dan kualitas produk dari hulu ke hilir	(1.1) Akselerasi peningkatan daya saing dan nilai tambah produk melalui kemitraan usaha (1.2) Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perikanan yang berkelanjutan

RENCANA STRATEGIS 2018 - 2023

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	(2) Meningkatnya konsumsi ikan dan daya saing produk kelautan dan perikanan (3) Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pelaku usaha kelautan dan perikanan	(2.1) Inovasi dan penerapan Standarisasi produk (2.2) Diversifikasi, perluasan usaha dan penguatan pasar (3.1) Penguatan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat pelaku usaha kelautan dan perikanan	(2.1) Pengembangan usaha pengolahan perikanan (2.2) Peningkatan volume dan nilai ekspor (3.1) Pengembangan SDM, perluasan usaha dan kemitraan
Meningkatkan kelestarian dan kualitas lingkungan sumberdaya kelautan dan perikanan	Meningkatnya kelestarian dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya alam kelautan dan perikanan	(1) Pengawasan wilayah laut, pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan (2) Rehabilitasi ekosistem, pengendalian dan konservasi kawasan pesisir dan laut (3) Penataan dan pengelolaan ruang laut (4) Koordinasi dan kerjasama, pengelolaan serta pengamanan wilayah laut dari pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan	(1) Pengelolaan kawasan konservasi perairan dan pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau serta Pelestarian dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya alam kelautan dan perikanan (2) Menjaga Ketersediaan stock ikan (3) Peningkatan luas kawasan konservasi dan penurunan emisi karbon dan gas rumah kaca (4) Penataan dan pengelolaan sektor kelautan dan perikanan sesuai Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil

Arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Penekanan prioritas kebijakan pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam RPJMD. Dengan prioritas kebijakan tersebut bukan berarti program/kegiatan pembangunan operasional SKPD di luar yang diprioritaskan tidak berjalan, ia tetap berjalan tetapi dengan penekanan strategis yang lebih rendah

RENCANA STRATEGIS 2018 – 2023

dibanding yang diprioritaskan. Kebijakan Pembangunan dengan penekanan strategis lebih rendah dimaksud adalah program-program operasional pada semua SKPD yang melaksanakan program pembangunan daerah untuk memenuhi kewajiban penyelenggaraan semua urusan pemerintahan. Rencana pelaksanaan kebijakan selama 5 tahun adalah sebagai berikut :

Tabel 5.2
Arah Kebijakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan tahun 2018-2023

VISI : “Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter”							
MISI 1 : Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif							
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan Tahun 1	Arah Kebijakan Tahun 2	Arah Kebijakan Tahun 3	Arah Kebijakan Tahun 4	Arah Kebijakan Tahun 5
Meningkatkan Akuntabilitas Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah	Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah	Pengelolaan dan penataan administrasi sesuai aturan serta Perencanaan yang SMART	Akselerasi Pengelolaan dan penataan administrasi sesuai aturan serta Perencanaan yang SMART (Penerapan Reformasi Birokrasi)	Akselerasi Pengelolaan dan penataan administrasi sesuai aturan serta Perencanaan yang SMART (Penerapan Reformasi Birokrasi)	Pemantapan Pengelolaan dan penataan administrasi sesuai aturan serta Perencanaan yang SMART (Penerapan Reformasi Birokrasi)	Pemantapan Pengelolaan dan penataan administrasi sesuai aturan serta Perencanaan yang SMART (Penerapan Reformasi Birokrasi)
MISI 5 : Meningkatkan produktivitas dan Daya Saing Produk Sumberdaya Alam yang berkelanjutan							
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan Tahun 1	Arah Kebijakan Tahun 2	Arah Kebijakan Tahun 3	Arah Kebijakan Tahun 4	Arah Kebijakan Tahun 5
Mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan secara berdaya saing tanpa mengabaikan kelestarian dan daya dukung lingkungan hidup	(1) Meningkatkan produksi perikanan dengan menambah jumlah faktor produksi dan produktivitas produksi berbasis sumberdaya alam	(1.1) Pembinaan yang Inklusif bagi pelaku usaha untuk mendorong produktivitas serta Revitalisasi Wilayah-wilayah yang pernah menjadi pusat produksi (1.2) Perbaikan dan mengganti sarana dan prasarana produksi perikanan baik pada faktor produksi maupun metode kerja serta Perbaikan standarisasi dalam hal mutu dan kualitas produk dari hulu ke hilir	Hilirisasi Pengelolaan produk berbasis sumberdaya kelautan dan perikanan	Akselerasi hilirisasi pengelolaan produk berbasis sumberdaya kelautan dan perikanan secara ekologis	Akselerasi hilirisasi pengelolaan produk berbasis sumberdaya kelautan dan perikanan secara ekologis	Pemantapan hilirisasi pengelolaan produk berbasis sumberdaya kelautan dan perikanan secara ekologis	Pemantapan hilirisasi pengelolaan produk berbasis sumberdaya kelautan dan perikanan secara ekologis

RENCANA STRATEGIS 2018 - 2023

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan Tahun 1	Arah Kebijakan Tahun 2	Arah Kebijakan Tahun 3	Arah Kebijakan Tahun 4	Arah Kebijakan Tahun 5
Mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan secara berdayasaing tanpa mengabaikan kelestarian dan daya dukung lingkungan hidup	(2) Meningkatkan konsumsi ikan dan daya saing produk kelautan dan perikanan (3) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat pelaku usaha kelautan dan perikanan	(2.1) Inovasi dan penerapan Standarisasi produk (2.2) Diversifikasi, perluasan usaha dan penguatan pasar (3.1) Penguatan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat pelaku usaha kelautan dan perikanan	(2.1) Pengembangan usahapengolahan perikanan (2.2) Pengembangan SDM, perluasan usaha dan kemitraan (3.1) Peningkatan volume dan nilai ekspor	(2.1) Akselerasi Pengembangan usahapengolahan perikanan (2.2) Akselerasi Pengembangan SDM, perluasan usaha dan kemitraan (3.1) Akselerasi Peningkatan volume dan nilai ekspor	(2.1) Akselerasi Pengembangan usahapengolahan perikanan (2.2) Akselerasi Pengembangan SDM, perluasan usaha dan kemitraan (3.1) Akselerasi Peningkatan volume dan nilai ekspor	(2.1) Pemantapan Pengembangan usahapengolahan perikanan (2.2) Pemantapan Pengembangan SDM, perluasan usaha dan kemitraan (3.1) Pemantapan Peningkatan volume dan nilai ekspor	(2.1) Pemantapan Pengembangan usahapengolahan perikanan (2.2) Pemantapan Pengembangan SDM, perluasan usaha dan kemitraan (3.1) Pemantapan Peningkatan volume dan nilai ekspor
Meningkatkan kelestarian dan kualitas lingkungan sumberdaya kelautan dan perikanan	Meningkatkan kelestarian dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya alam kelautan dan perikanan	1) Pengawasan wilayah laut, pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan 2) Rehabilitasi ekosistem, pengendalian dan konservasi kawasan pesisir dan laut 3) Penataan dan pengelolaan ruang laut 4) Koordinasi dan kerjasama, pengelolaan serta pengamanan wilayah laut dari pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan	1) Pengelolaan kawasan konservasi perairan dan pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau serta Pelestarian dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya alam kelautan dan perikanan 5) Menjaga Ketersediaan stock ikan 6) Peningkatan luas kawasan konservasi dan penurunan emisi karbon dan gas rumah kaca 7) Penataan dan pengelolaan sektor kelautan dan perikanan sesuai Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil	Pengelolaan kawasan konservasi perairan dan pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau serta Pelestarian dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya alam kelautan dan perikanan (8) Menjaga Ketersediaan stock ikan (9) Peningkatan luas kawasan konservasi dan penurunan emisi karbon dan gas rumah kaca (10) Penataan dan pengelolaan sektor kelautan dan perikanan sesuai Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil	Menjaga Ketersediaan stock ikan	Peningkatan luas kawasan konservasi dan penurunan emisi karbon dan gas rumah kaca	Penataan dan pengelolaan sektor

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari beberapa strategi dan kebijakan dalam rangka mencapai setiap misi, maka langkah operasional harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, dan misi organisasi.

Program Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program per pagu sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD, yang selanjutnya dijabarkan Dinas Kelautan dan Perikanan ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Kelautan dan Perikanan.

Sehingga dalam lima (5) tahun, arsitektur perencanaan pembangunan kelautan dan perikanan dipisahkan menjadi dua: (1) perencanaan strategik yaitu perencanaan pembangunan daerah yang menekankan pada pencapaian visi-misi kepala daerah dan wakil kepala daerah; (2) perencanaan operasional yaitu perencanaan yang menekankan pada pencapaian kinerja layanan setiap urusan. Adapun pelaksanaan Misi, Tujuan dan Sasaran yang akan dilaksanakan dengan program teknis yaitu :

- a) **Misi 5 : Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Sumberdaya Alam yang Berkelanjutan**
-

- b) **Tujuan** : Meningkatkan produksi dan nilai tambah produk perikanan yang berdaya saing
- c) **Sasaran** :
1. Meningkatnya produksi perikanan dengan menambah jumlah factor produksi dan produktivitas produksi
 2. Meningkatnya konsumsi ikan dan daya saing produk kelautan dan perikanan
 3. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pelaku usaha kelautan dan perikanan

Didukung oleh program :

1. Program Prioritas :

Program Hilirisasi Perikanan

Indikator Program :

- a. **Nilai Hilirisasi Produksi Perikanan tahun 2018 sebesar 18.85 Trilyun menjadi 22.91 Trilyun**

Program ini adalah kelompok prioritas (KP) yang diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi provinsi Sulawesi Selatan dimana indikatornya fokus pada nilai hilirisasi produk. Program ini diarahkan untuk peningkatan produksi dan optimalisasi hilirisasi produk untuk mendukung program prioritas Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 yaitu Pengembangan Hilirisasi Komoditas Unggulan dengan melakukan Diseminasi teknologi dan Inovasi baik pada pengembangan perikanan budidaya, perikanan tangkap, pengembangan usaha garam dan pengembangan usaha pengolahan sampai tahun 2018. Adapun tujuan program adalah (1) Peningkatan Pendapatan, (2) Penyerapan Tenaga Kerja melalui usaha perikanan budidaya. Selain itu komoditas udang, bandeng dan rumput laut tetap menjadi komoditas unggulan sehingga perlu digalakkan dalam rangka peningkatan produksi budidaya. Sasaran produksi yang akan dicapai pada tahun awal kondisi yakni tahun 2018, sebesar 2.371.584,2 ton dan dengan kondisi akhir tahun 2023 sebesar 3.150.040 ton. Adapun produksi komoditas unggulan pada tahun awal kondisi tahun 2013, untuk komoditi udang 33.200 ton, Bandeng 91.502,3 ton dan rumput laut 2.233.259,7 ton (*Gracillaria* spp 654.920,7 ton dan *Eucheuma* spp 1.578.339 ton). Program tersebut diarahkan untuk menumbuh kembangkan industri strategis perikanan di Sulawesi Selatan dengan prioritas usaha adalah agroindustri dan industri yang memiliki keterkaitan

industri/pasar didaerah lain termasuk luar negeri, melalui usaha ini akan memicu laju pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan. Komoditas yang dikembangkan adalah komoditas yang bertumpuh pada potensi yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal seperti Rumput Laut, Udang, Bandeng, Tuna. Dalam rangka pengembangan komoditas unggulan dan komoditas lain perlu diperhatikan berbagai upaya salah satunya yaitu penguatan kelembagaan, akses permodalan dan perluasan jejaring dan kemitraan serta mengoptimalkan hilirisasi produk yang dapat memberikan dampak perekonomian daerah. Selain pengembangan usaha perikanan budidaya juga diarahkan pada optimalisasi pengembangan usaha perikanan tangkap berkelanjutan merupakan upaya revitalisasi dan perbaikan orientasi pembangunan perikanan berkelanjutan dengan menekankan pada tiga aspek kajian yang merupakan dasar pertimbangan arahan kebijakan dalam melahirkan program dan kegiatan, meliputi:

1. Inovasi dan pengembangan teknologi penangkapan ikan ramah lingkungan,
2. Pendalaman pengetahuan dan pemahaman terhadap target tangkapan, dan
3. Pengenalan dan penguasaan karaktersitik daerah penangkapan ikan.

Ketiga aspek kajian ini merupakan ruang lingkup pengembangan dan pembangunan perikanan tangkap yang menentukan keberhasilan dan tingkat produktifitas unit usaha. Kajian teknologi penangkapan ikan (fishing technology) lebih diarahkan pada peningkatan produktifitas penangkapan sebagai target pencapaian dengan indikator kinerja diarahkan pada efektifitas dan efisiensi upaya penangkapan ikan yang dilakukan. Bagian dari ruang lingkup kajian ini meliputi:

- a) Penerapan teknologi penangkapan ikan berbasis potensi ruang dengan menetapkan komoditas unggulan sebagai target tangkapan,
- b) Pemanfaatan teknologi alat bantu penangkapan ikan seperti, penggunaan Global Position Service (GPS), cahaya, umpan, dan resonansi suara
- c) Penanganan dan pengendalian teknologi penangkapan ikan yang overfishing dan tidak ramah lingkungan (destructive fishing) melalui pengelolaan jumlah dan jenis alat tangkap, pengaturan ukuran mata jarring untuk selektifitas target tangkapan, dan pembatasan daerah operasi penangkapan ikan pada zona terlarang.

Gambaran umum potensi pembangunan perikanan tangkap Provinsi Sulawesi Selatan memiliki tiga karakteristik wilayah pesisir yang khas/spesifik, yaitu perairan wilayah pesisir Teluk Bone, wilayah pesisir Laut Flores, dan wilayah pesisir Selat Makassar. Ketiga karakteristik wilayah perairan ini seharusnya mampu dioptimalkan pemanfaatannya sebagai potensi yang sangat besar dan luar biasa dalam mengakselerasi pembangunan perikanan tangkap.

Kajian ikan target tangkapan (fish target) dan daerah penangkapan ikan (fishing ground) dititikberatkan pada analisis entitas dan potensi ruang yang ditetapkan sebagai daerah penangkapan ikan sebagai wilayah kajian dengan segala potensi sumberdaya ikan yang terkandung didalamnya. Ruang lingkup kajian target tangkapan akan mendeskripsikan produksi dan potensi sumberdaya ikan yang berada pada suatu daerah penangkapan ikan melingkupi komposisi jenis, ukuran ikan, jumlah hasil tangkapan sebagai total produksi dan jumlah stok sumberdaya ikan, ekosistem dan habitat keberadaan target tangkapan, dan tingkah laku ikan target tangkapan. Pengetahuan dan pemahaman tingkah laku ikan target tangkapan terhadap penguasaan karakteristik daerah penangkapan merupakan acuan dasar dan basis pengembangan teknologi penangkapan ikan yang ramah lingkungan. Diperlukan manajemen pengelolaan sumberdaya perikanan berkelanjutan, baik yang bersifat teknis pada teknologi penangkapan ikan maupun yang bersifat manajemen dalam pengelolaan base-line data secara sistematis dan terstruktur dari waktu ke waktu untuk memperbaiki dan mengembangkan kondisi eksisting yang telah dicapai. Peluang pengembangan perikanan tangkap dimanfaatkan seoptimal mungkin dengan melakukan pengelolaan pelabuhan perikanan yang tersebar di 19 kabupaten/kota dengan memfasilitasi pelayanan kepada nelayan baik skala besar maupun skala kecil dengan memperhatikan aspek kualitas mutu dan higienisasi sarana prasarana pelabuhan perikanan.

Pengembangan usaha garam juga menjadi prioritas pada program hilirisasi perikanan dimana input produksi memberikan dampak hasil yang cukup menjanjikan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Potensi pengembangan berada pada 4 kabupaten yaitu kabupaten Jeneponto, kabupaten Takalar, kabupaten Pangkep dan kabupaten Kepulauan Selayar. Adapun optimalisasi pengembangan dengan menyediakan fasilitas prasarana seperti gudang

garam kapasitas 1000 ton, penerapan geomembran, integrasi lahan minimum 15 Ha per lokasi PUGAR dan pemberdayaan masyarakat pengembang usaha garam.

2. Program Layanan Urusan :

Program Peningkatan Produksi Kelautan dan Perikanan

Indikator Program :

- a. **Produksi Perikanan Tangkap tahun 2018 sebesar 363.853 ton menjadi 392.687 ton tahun 2023**
- b. **Produksi Perikanan Budidaya tahun 2018 sebesar 4.656.858 ton menjadi 6.641.782 ton tahun 2023**
- c. **Produksi garam rakyat tahun 2018 sebesar 86.834,94 ton menjadi 110.825,83 ton tahun 2023**

Program ini diarahkan untuk mendukung keberhasilan program Hilirisasi Perikanan dimana dibutuhkan koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sesuai kewenangan yang diatur dalam UU 23 tahun 2014. Pemerintah provinsi selaku Pembina antar kabupaten/kota akan efektifkan fungsi koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.

Program Penerapan Mutu, Pengembangan Usaha dan Daya Saing

Indikator Program :

- a. **Volume Ekspor tahun 2018 sebesar 130.623,1 ton menjadi 200.154 ton**
- b. **Nilai Ekspor tahun 2018 sebesar 498,3 US\$ juta menjadi 548,2 US\$ juta tahun 2023**
- c. **Produksi olahan konsumsi dan non konsumsi tahun 2018 sebesar 25.648 ton menjadi 32.735,05 ton tahun 2023**

Misi 5

- a. **Meningkatkan produktivitas dan Daya Saing Produk Sumberdaya Alam yang berkelanjutan**
- b. **Tujuan :** Mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan secara berdaya saing tanpa mengabaikan kelestarian dan daya dukung lingkungan hidup
- c. **Sasaran :** Meningkatnya kelestarian dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya alam kelautan dan perikanan

Didukung oleh program :

Program Pengawasan, Konservasi, Penataan dan Rehabilitasi Pesisir Dan Laut

Indikator Program :

- a. **Cakupan luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan tahun 2018 sebesar 433.548,9 Ha menjadi 1.038.851,36 Ha tahun 2023**
- b. **Cakupan jumlah sarana dan prasarana yang tersedia di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tahun 2018 sebesar 20 % menjadi 100% tahun 2023**
- c. **Persentase penurunan tindakan IUU Fishing tahun 2018 sebesar 11,6% menjadi 5,4% tahun 2023**

Program ini diarahkan pada pengembangan pengembangan dan pengelolaan wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil yaitu program yang mendukung penanganan kemiskinan dan kesejahteraan nelayan. Perubahan social ekonomi di desa-desa pesisir dan pulau-pulau kecil atau desa nelayan telah memperjelas garis stratifikasi sosial masyarakatnya. Nelayan kecil merupakan lapisan yang paling banyak jumlahnya dimana mereka hidup dalam taraf kemiskinan dan tekanan-tekanan social ekonomi yang berakar pada faktor-faktor kompleks yang saling terkait. Adapun salah satu strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran program yaitu meningkatkan peran, akses, kontrol dan manfaat gender dalam pembangunan Kelautan dan Perikanan.

Selain itu program ini diarahkan pada upaya pelestarian, perlindungan dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta ekosistemnya agar dapat menjamin keberadaan, ketersediaan dan kesinambungan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya. Usaha tersebut sebagai perwujudan bagi Sulawesi Selatan sebagai Entitas Sosial Ekonomi yang berkeadilan. Tujuan yang dapat dicapai adalah untuk meningkatkan daya tarik wilayah terhadap investor termasuk kunjungan wisata dan sekaligus juga dapat memberi iklim yang kondusif bagi Sulawesi Selatan dalam pengembangan kegiatan konservasi sumberdaya Kelautan dan Perikanan. Program ini juga diarahkan untuk memelihara dan melindungi Sumberdaya Perikanan dan Kelautan, terutama Sumberdaya yang telah mengalami degradasi tingkat produktivitasnya. Upaya yang dapat dilakukan dalam mendukung

program yaitu melalui pemberdayaan masyarakat dalam memelihara dan melindungi sumberdaya perikanan dan kelautan dengan membentuk system pengawasan berbasis masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana pengawasan khususnya untuk pengawasan destructive fishing, illegal fishing, pengamanan sumberdaya ikan dan lingkungan, penataan dan penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana perikanan. Program ini juga diarahkan untuk penguatan kelembagaan organisasi masyarakat lokal sebagai upaya strategis dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dengan meningkatkan peran, akses, kontrol dan manfaat gender dalam pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan. Usaha yang dapat dilakukan dalam mendukung kegiatan yaitu :

1. Sosialisasi kepada pelaku usaha perikanan terhadap larangan penggunaan bahan dan alat tangkap yang dapat merusak sumberdaya perikanan.
2. Intensifikasi pengendalian dan pengawasan terhadap penggunaan bahan terlarang untuk penanganan hasil perikanan
3. Pelatihan kesadaran masyarakat dalam rangka pengendalian kerusakan lingkungan sumberdaya perikanan
4. Menumbuh kembangkan kelompok-kelompok masyarakat Pengawas Perikanan di setiap daerah
5. Himbauan dan larangan terhadap pengambilan terumbu karang dan biota - biota tertentu yang dianggap telah hampir punah.
6. Melalui usaha tersebut diatas, maka diharapkan tingkat kerusakan sumberdaya perikanan dan kelautan berkurang dan terjadi peningkatan produktivitas tangkapan ikan.

Program Sekretariat :

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Peningkatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja
4. Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Berdasarkan penetapan pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam bentuk rencana aksi untuk mendukung pencapaian visi dan misi maka indikator sasaran pembangunan kelautan dan perikanan yang hendak dicapai selama kurun waktu 5 tahun mendatang rumusan rencana program, kegiatan,

RENCANA STRATEGIS 2018 - 2023

indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada tabel 6.1. yang bersumber dari Tabel T-C.27 .

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1. Indikator Kinerja yang mengacu pada RPJMD

Indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sulawesi Selatan dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD adapun kinerja penyelenggaraan urusan yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan pemerintah daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci.

7.1.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran pembangunan daerah oleh Kepala Perangkat Daerah dalam mendukung sasaran pembangunan daerah. Pencapaian indikator tujuan dan sasaran merupakan akumulasi dari pencapaian beberapa target indikator program.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Utama Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2023

No	Sasaran Strategis dan Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2023
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9)
SS1.1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah							
1	Nilai Sakip OPD (%)	80,82	80,85	80,87	80,89	80,91	80,93	
2	Rata-rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah (Evaluasi Dokumen Perencanaan) (%)	95	95	95	95	95	95	
3	% ASN Nilai SKP Kategori Baik	80	82	83	84	85	86	
SS2.1	Meningkatnya produksi perikanan dengan menambah jumlah faktor produksi dan produktivitas produksi							
1	Produksi Perikanan (ton)	4.713.545,90	5.117.387,50	5.558.740,80	6.041.173,54	6.568.596,04	7.145.295,69	
2	Produksi perikanan kelompok nelayan (ton)	79.177,84	80.010,21	80.810,31	81.618,40	82.434,60	83.258,94	
3	Kontribusi PDRB Perikanan (%)	8,4	8,6	8,8	9,0	9,2	9,3	
4	Cakupan Bina Kelompok Nelayan (%)	24,94	30,18	33,20	36,51	40,17	44,18	
SS2.2	Meningkatnya konsumsi ikan dan daya saing produk kelautan dan perikanan							
1	Konsumsi Ikan (kg/kap/th)	53,00	53,60	54,10	54,60	55,20	55,70	
2	Kontribusi Ekspor Perikanan (%)	5,37	5,63	5,92	6,21	6,52	6,85	
SS2.3	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pelaku usaha kelautan dan perikanan							
1	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	106,30	107,79	107,89	108	108,11	108,22	
SS3.1	Meningkatnya kelestarian dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya alam kelautan dan perikanan							
1	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial (%)	0,24	0,26	0,28	0,30	0,32	0,34	
2	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (%)	48,85	49,10	50,60	52,10	53,6	55,10	

7.1.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah untuk sektor kelautan dan perikanan merupakan indikator yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada masa jabatan pemerintah daerah 2018 - 2023. Indikator Kinerja Kunci disusun sesuai dengan urusan penyelenggaraan pemerintah dan kewenangan

RENCANA STRATEGIS 2018 – 2023

pemerintah provinsi. Penetapan indikator kinerja kunci untuk sektor kelautan dan perikanan selanjutnya disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Kunci (IKK)
Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sulawesi Selatan yang
Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2018 – 2023

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
B	Layanan Urusan Pilihan							
8	Kelautan dan Perikanan							
1	Produksi Perikanan (%)	97.98	104.34	105.84	107.34	108.84	110.34	
2	Konsumsi Ikan (%)	120.2	120.40	120.60	120.80	121	121.20	
3	Cakupan bina kelompok nelayan (%)	24,94	30,18	33.20	36.51	40,17	44,18	
4	Produksi perikanan kelompok nelayan (%)	20.22	20.32	21.82	23.32	24.82	26.32	
5	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (%)	48.85	49.66	50.60	52.10	53.60	55.10	
6	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial (%)	0.24	0.26	0.28	0.3	0.32	0.34	
7	Nilai Tukar Nelayan (NTN) (%)	104.2	107.79	107.89	108	108.11	108.22	

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan dalam pembangunan Kelautan dan Perikanan yang diimplementasikan pada tugas penyelenggaraan pemerintah, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan. dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan dari tahun 2018-2023.

Dengan melaksanakan Renstra ini sangat diperlukan adanya partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan karena akan menentukan suatu keberhasilan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Dengan demikian Renstra ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansi merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders dan merupakan suatu tujuan yang hendak dicapai.

Akhir kata semoga Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan berkesinambungan

Tabel T-C.27
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
Dinas Kelautan dan Perikanan
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

Table T-C.27 (Verifikasi Akhir)

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
										Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Meningkatkan Akuntabilitas Perangkat Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah	Nilai Sakip OPD	0.00	00	50		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	% Pemenuhan administrasi perkantoran	100%	100 %	9,296,678,218.00	100 %	9,295,189,774.54	100 %	9,328,160,891.43	100 %	9,387,355,196.90	100 %	9,459,368,209.86	100 %	46,766,752,290.73
			0.00	00	50	001	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah biaya tagihan telepon, air dan listrik	bulan	12 Bulan	1,212,000,000.00	12 Bulan	1,251,129,556.54	12 Bulan	1,252,360,891.43	12 Bulan	1,239,555,196.90	12 Bulan	1,239,568,209.86	60 Bulan	6,194,613,854.73
			0.00	00	50	002	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 4 yang terbayarkan	Unit	24 Unit	96,000,000.00	24 Unit	96,000,000.00	24 Unit	96,000,000.00	24 Unit	96,000,000.00	24 Unit	96,000,000.00	120 Unit	480,000,000.00
							Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 2 yang terbayarkan	Unit	24 Unit	24 Unit	24 Unit	24 Unit	24 Unit	24 Unit	24 Unit	24 Unit	24 Unit	24 Unit	24 Unit	120 Unit	480,000,000.00
			0.00	00	50	003	Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS	Jumlah Jasa Tenaga Non PNS	150 orang	148 Orang	3,148,800,000.00	148 Orang	3,148,800,000.00	148 Orang	3,148,800,000.00	148 Orang	3,148,800,000.00	148 Orang	3,148,800,000.00	740 Orang	15,744,000,000.00
			0.00	00	50	005	Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah ATK yang tersedia	Jenis ATK	30 Jenis ATK	1,290,260,218.00	30 Jenis ATK	1,290,260,218.00	30 Jenis ATK	1,300,000,000.00	30 Jenis ATK	1,350,000,000.00	30 Jenis ATK	1,400,000,000.00	150 Jenis ATK	6,630,520,436.00
			0.00	00	50	006	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	Unit	240 Unit	128,513,000.00	0 Unit	0.00	0 Unit	0.00	0 Unit	0.00	0 Unit	0.00	240 Unit	128,513,000.00
			0.00	00	50	008	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah biaya jamuan makan dan minum yang tersedia		2 Jenis	2,066,105,000.00	2 Jenis	2,068,000,000.00	2 Jenis	2,070,000,000.00	2 Jenis	2,072,000,000.00	2 Jenis	2,074,000,000.00	10 Jenis	10,350,105,000.00
			0.00	00	50	009	Pelaksanaan dan Keikutsertaan Pameran	Jumlah Keikutsertaan dalam Pameran		4 Pameran	180,000,000.00	4 Pameran	240,000,000.00	4 Pameran	260,000,000.00	4 Pameran	280,000,000.00	4 Pameran	300,000,000.00	20 Pameran	1,260,000,000.00
			0.00	00	50	010	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas	Kali	133 Kali	1,175,000,000.00	133 Kali	1,201,000,000.00	133 Kali	1,201,000,000.00	133 Kali	1,201,000,000.00	133 Kali	1,201,000,000.00	665 Kali	5,979,000,000.00
Meningkatkan Akuntabilitas Perangkat Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah	Nilai Sakip OPD	0.00	00	51		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	% Pemenuhan sarana prasarana perkantoran	100%	100 %	3,752,357,000.00	100 %	3,576,757,000.00	100 %	3,674,881,000.00	100 %	3,722,467,000.00	100 %	3,742,467,000.00	100 %	18,468,929,000.00
			0.00	00	51	002	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan / Rumah Dinas	Jumlah Unit rumah jabatan/rumah dinas yang dipelihara	unit	2 Unit	125,000,000.00	2 Unit	125,000,000.00	2 Unit	125,000,000.00	2 Unit	125,000,000.00	2 Unit	125,000,000.00	10 Unit	625,000,000.00
			0.00	00	51	004	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor / Asrama	Jumlah Unit gedung kantor/asrama yang dipelihara	unit	7 Unit	1,507,954,000.00	7 Unit	1,507,954,000.00	7 Unit	1,507,954,000.00	7 Unit	1,507,954,000.00	7 Unit	1,507,954,000.00	35 Unit	7,539,770,000.00

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
										Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			0.00	00	51	006	Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Jabatan/Dinas	Jumlah kendaraan jabatan/dinas yang dipelihara	Unit	14 Unit	920,565,000.00	14 Unit	979,495,000.00	14 Unit	979,495,000.00	14 Unit	979,495,000.00	14 Unit	979,495,000.00	70 Unit	4,838,545,000.00
			0.00	00	51	007	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah perlengkapan dan peralatan rumah jabatan/dinas yang tersedia	unit	20 Unit	93,550,000.00	20 Unit	94,020,000.00	20 Unit	136,050,000.00	20 Unit	136,050,000.00	20 Unit	136,050,000.00	100 Unit	595,720,000.00
			0.00	00	51	008	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah perlengkapan dan peralatan rumah jabatan/dinas yang dipelihara	unit	2 Unit	15,000,000.00	2 Unit	15,000,000.00	2 Unit	15,000,000.00	2 Unit	15,000,000.00	2 Unit	15,000,000.00	10 Unit	75,000,000.00
			0.00	00	51	009	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang tersedia	unit	60 Unit	1,030,788,000.00	60 Unit	775,288,000.00	60 Unit	825,288,000.00	60 Unit	872,874,000.00	60 Unit	872,874,000.00	300 Unit	4,377,112,000.00
			0.00	00	51	010	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara	unit	10 Unit	59,500,000.00	10 Unit	60,000,000.00	10 Unit	66,094,000.00	10 Unit	66,094,000.00	10 Unit	86,094,000.00	50 Unit	337,782,000.00
			0.00	00	51	012	Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi/Aplikasi/Website	Jumlah Sistem Informasi/Aplikasi yang dipelihara dan dikembangkan Jumlah Berita/Informasi yang diposting di Website	0 Sistem Informasi/Aplikasi 0 Berita/Informasi	0.00 	1 Sistem Informasi/Aplikasi 70 Berita/Informasi	20,000,000.00 	1 Sistem Informasi/Apl ikasi 70 Berita/Inform asi	20,000,000.00 	1 Sistem Informasi/Aplikasi 70 Berita/Informasi	20,000,000.00 	1 Sistem Informasi/Aplikasi 70 Berita/Informasi	20,000,000.00 	4 Sistem Informasi/Aplikasi 280 Berita/Informasi	80,000,000.00	
Meningkatkan Akuntabilitas Perangkat Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah (Evaluasi Dokumen Perencanaan)	0.00	00	52		PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA	% Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu	100%	100 %	1,677,550,600.00	100 %	1,590,000,000.00	100 %	1,600,000,000.00	100 %	1,610,000,000.00	100 %	1,724,000,000.00	100 %	8,201,550,600.00
			0.00	00	52	001	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah	Jumlah Peserta yang mengikuti Forum Perangkat Daerah	Orang	85 Orang	11,650,000.00	0 Orang	0.00	0 Orang	0.00	0 Orang	0.00	0 Orang	0.00	85 Orang	11,650,000.00
			0.00	00	52	002	Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA dan DPA baik Pokok dan Perubahan yang tersusun Jumlah Dokumen Renja dan Perubahan Renja yang disusun dan ditetapkan Jumlah Dokumen Renstra PD yang disusun dan ditetapkan Jumlah Dokumen Evaluasi PD yang tersusun dan dilaporkan Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	4 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 4 Dokumen 1 Dokumen	4 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 4 Dokumen 0 Dokumen	0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 5 Dokumen	850,000,000.00 	0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 5 Dokumen	850,000,000.00 	0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 5 Dokumen	850,000,000.00 	0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 5 Dokumen	850,000,000.00 	4 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 40 Dokumen 20 Dokumen	4,085,108,900.00	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
										Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			0.00	00	52	003	Penyusunan Usulan dan Pelaporan Dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan DAK	Jumlah usulan kegiatan dana dekonsentrasi, tugas pembantuan dan DAK	Usulan Kegiatan	50 Usulan Kegiatan	216,866,700.00	0 Usulan Kegiatan	0.00	0 Usulan Kegiatan	0.00	0 Usulan Kegiatan	0.00	0 Usulan Kegiatan	0.00	50 Usulan Kegiatan	216,866,700.00
			0.00	00	52	004	Pengumpulan dan Publikasi Data dan Informasi OPD	Jumlah Laporan Data & Informasi yang dikumpulkan Jumlah Data dan Informasi yang terpublikasi	Laporan Jenis	2 Laporan 6 Jenis	500,000,000.00	2 Laporan 6 Jenis	500,000,000.00	2 Laporan 6 Jenis	500,000,000.00	2 Laporan 6 Jenis	500,000,000.00	2 Laporan 6 Jenis	600,000,000.00	10 Laporan 30 Jenis	2,600,000,000.00
			0.00	00	52	005	Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	Jenis Laporan	6 Laporan	252,000,000.00	6 Laporan	240,000,000.00	6 Laporan	250,000,000.00	6 Laporan	260,000,000.00	6 Laporan	274,000,000.00	30 Laporan	1,276,000,000.00
			0.00	00	52	006	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan semesteran dan akhir tahun yang disusun	Laporan	2 Laporan	11,925,000.00	0 Laporan	0.00	0 Laporan	0.00	0 Laporan	0.00	0 Laporan	0.00	2 Laporan	11,925,000.00
Meningkatkan Akuntabilitas Perangkat Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah	% ASN Nilai SKP Kategori Baik	0.00	00	53		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	% ASN berkinerja sangat baik	100%	100 %	279,700,000.00	100 %	303,000,000.00	100 %	313,000,000.00	100 %	323,000,000.00	100 %	328,000,000.00	100 %	1,546,700,000.00
			0.00	00	53	001	Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Aparat OPD yang kelola administrasi kepegawaiannya Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang disusun	Orang Laporan	210 Orang 8 Laporan	6,700,000.00	210 Orang 8 Laporan	30,000,000.00	201 Orang 8 Laporan	40,000,000.00	210 Orang 8 Laporan	50,000,000.00	210 Orang 8 Laporan	55,000,000.00	1050 Orang 40 Laporan	181,700,000.00
			0.00	00	53	002	Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya yang tersedia		210 Pasang	273,000,000.00	210 Pasang	273,000,000.00	210 Pasang	273,000,000.00	210 Pasang	273,000,000.00	210 Pasang	273,000,000.00	1050 Pasang	1,365,000,000.00

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
										Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Meningkatkan produksi dan nilai tambah produk perikanan yang berdaya saing	Meningkatnya produksi perikanan dengan menambah jumlah faktor produksi dan produktivitas produksi	Kontribusi PDRB Perikanan	2.00	08	01		PROGRAM HILIRISASI PERIKANAN (Prioritas)	Nilai Hilirisasi Produksi Perikanan (Prioritas)	Rp.17.953.535.596.200	18.851.212.376.010 Rp	47,368,673,650.00	19.793.772.994.810 Rp	43,608,000,000.00	20.783.461.644.551 Rp	45,732,000,000.00	21.822.634.726.778 Rp	47,052,000,000.00	22.913.766.463.117 Rp	49,043,000,000.00	22.913.766.463.117 Rp	232,803,673,650.00
			2.00	08	01	001	Diseminasi Inovasi Teknologi Budidaya Udang Windu Berbasis Kawasan (SITTO BANGKIT)	Jumlah Inovasi Teknologi Budidaya Udang Windu Berbasis Kawasan	unit	100 Unit	4,855,000,000.00	100 Unit	5,000,000,000.00	100 Unit	5,000,000,000.00	100 Unit	5,000,000,000.00	100 Unit	5,000,000,000.00	500 Unit	24,855,000,000.00
			2.00	08	01	006	Inovasi Teknologi Usaha Perikanan Budidaya dalam rangka Pengembangan komoditas unggulan dan komoditas perikanan lainnya	Jumlah inovasi teknologi usaha perikanan budidaya komoditas Unggulan dan komoditas perikanan lainnya	unit	20 unit	1,548,100,000.00	120 unit	7,840,000,000.00	120 unit	7,840,000,000.00	120 unit	7,840,000,000.00	120 unit	7,840,000,000.00	500 unit	32,908,100,000.00
			2.00	08	01	009	Inovasi Teknologi pengembangan usaha Garam	Jumlah Inovasi Teknologi pengembangan usaha garam	unit	40 unit	324,250,000.00	35 unit	1,934,000,000.00	35 unit	2,508,000,000.00	35 unit	2,528,000,000.00	35 unit	2,519,000,000.00	180 unit	9,813,250,000.00
			2.00	08	01	013	Pembangunan/Rehabilitasi sarana dan prasarana fasilitas pokok dan fasilitas fungsional Pelabuhan Perikanan (UPT Provinsi) (DAK)	Jumlah sarana dan prasarana pelabuhan yang terbangun	4 unit PPI	5 unit	5,002,550,000.00	5 unit	9,000,000,000.00	5 unit	9,000,000,000.00	5 unit	9,000,000,000.00	5 unit	9,000,000,000.00	25 unit	41,002,550,000.00
			2.00	08	01	016	Pembangunan/Rehabilitasi Unit Perbenihan (UPTD-Provinsi) dan Percontohan Budidaya Laut (DAK)	Jumlah sarana dan prasarana pokok unit budidaya yang terbangun Jumlah percontohan budidaya laut	unit unit	8 unit 0 unit	2,272,920,300.00	0 unit 40 unit	2,000,000,000.00	0 unit 40 unit	2,000,000,000.00	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	0 unit 40 unit	1,500,000,000.00	8 unit 160 unit	9,272,920,300.00
			2.00	08	01	018	Pengadaan sarana dan prasarana usaha garam (DAK)	Jumlah sarana dan prasarana usaha garam yang dibangun	8 unit	1 unit	1,674,000,000.00	16 unit	2,450,000,000.00	16 unit	2,450,000,000.00	16 unit	2,450,000,000.00	16 unit	2,450,000,000.00	65 unit	11,474,000,000.00
			2.00	08	01	019	Penyediaan Sarana Dan Prasarana Peningkatan Kapasitas Nelayan	Jumlah kapal yang dibangun Jumlah sarana dan prasarana alat tangkap Jumlah alat bantu tangkap	unit unit unit	57 unit 155 unit 1800 piece	18,355,800,000.00	15 unit 150 unit 100 piece	9,450,000,000.00	15 unit 150 unit 100 piece	11,000,000,000.00	150 unit 100 piece	11,000,000,000.00	150 unit 100 piece	13,000,000,000.00	117 unit 755 unit 2200 piece	62,805,800,000.00
			2.00	08	01	023	Penguatan pola kemitraan dan promosi produk	Jumlah promosi yang diikuti Jumlah kerjasama pada Mitra Usaha Perikanan dalam memasarkan dan menggunakan produk perikanan	3 kegiatan promosi Mou	5 kegiatan promosi 3 Mou	128,396,750.00	2 kegiatan promosi 1 Mou	200,000,000.00	2 kegiatan promosi 1 Mou	200,000,000.00	2 kegiatan promosi 1 Mou	2,000,000,000.00	2 kegiatan promosi 1 Mou	2,000,000,000.00	13 kegiatan promosi 7 Mou	4,528,396,750.00
			2.00	08	01	026	Inovasi Teknologi Produk Olahan Hasil Kelautan dan Perikanan konsumsi dan non konsumsi	Jumlah inovasi teknologi produk olahan hasil KP konsumsi dan non konsumsi	unit	1 unit	344,000,000.00	50 unit	1,000,000,000.00	50 unit	1,000,000,000.00	50 unit	1,000,000,000.00	50 unit	1,000,000,000.00	201 unit	4,344,000,000.00

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			2.000801032	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan dan Pengolahan Hasil Perikanan	Jumlah usaha pengolahan yang mendapatkan pengawasan Jumlah usaha pembudidaya yang mendapatkan pengawasan	unit usaha unit usaha	20 unit usaha 100 unit usaha	146,098,000.00	20 unit usaha 100 unit usaha	300,000,000.00	20 unit usaha 100 unit usaha	300,000,000.00	20 unit usaha 100 unit usaha	300,000,000.00	20 unit usaha 100 unit usaha	300,000,000.00	100 unit usaha 500 unit usaha	1,346,098,000.00
			2.000801033	Rehabilitasi sarana dan prasarana pengolahan Hasil Perikanan (DAK)	Jumlah bantuan peralatan pengolahan Jumlah perbaikan bangunan pengolahan unit pengolahan ikan skala mikro dan skala kecil Jumlah pabrik es yang direhabilitasi	Unit Unit Unit	0 Unit 0 Unit 0 unit	0.00	10 Unit 10 Unit 5 unit	3,960,000,000.00	10 Unit 10 Unit 5 unit	3,960,000,000.00	10 Unit 10 Unit 5 unit	3,960,000,000.00	10 Unit 10 Unit 5 unit	3,960,000,000.00	40 Unit 40 Unit 20 unit	15,840,000,000.00
			2.000801034	Pengelolaan unit perbenihan yang sesuai standar mutu	Jumlah pengendalian kualitas lingkungan perikanan budidaya perbenihan Jumlah sarana dan prasarana perbenihan yang dioperasikan Jumlah induk unggul yang untuk menghasilkan benih	Unit Unit Ekor	0 Unit 0 Unit 0 Ekor	0.00	8 Unit 8 Unit 750 Ekor	474,000,000.00	8 Unit 8 Unit 750 Ekor	474,000,000.00	8 Unit 8 Unit 750 Ekor	474,000,000.00	8 Unit 8 Unit 750 Ekor	474,000,000.00	40 Unit 32 Unit 3750 Ekor	1,896,000,000.00
Meningkatkan produksi dan nilai tambah produk perikanan yang berdaya saing	Meningkatnya produksi perikanan dengan menambah jumlah faktor produksi dan produktivitas produksi	Produksi perikanan kelompok nelayan Produksi Perikanan Cakupan Bina Kelompok Nelayan	2.000802	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI KELAUTAN DAN PERIKANAN	Jumlah produksi perikanan tangkap Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Jumlah produksi garam rakyat	363.853 Ton 3.531.233.6 Ton 86.834.94 Ton	369365 Ton 4656858 Ton 91176.69 Ton	1,652,742,400.00	374981 Ton 5088024 Ton 95735.52 Ton	2,398,000,000.00	380743 Ton 5559907 Ton 100522.3 Ton	2,598,000,000.00	386644 Ton 6076403 Ton 105548.41 Ton	2,899,000,000.00	392318 Ton 6641782 Ton 110825.83 Ton	2,999,000,000.00	392318 Ton 6641782 Ton 110825.83 Ton	12,546,742,400.00
			2.000802024	Pengelolaan pelabuhan perikanan dalam rangka optimalisasi produksi	Jumlah Layanan Operasional di pelabuhan perikanan wilayah 2 Jumlah Layanan Operasional pelabuhan perikanan wilayah 1	Unit Unit	0 Unit 0 Unit	0.00	5 Unit 5 Unit	1,000,000,000.00	7 Unit 7 Unit	1,200,000,000.00	9 Unit 9 Unit	1,400,000,000.00	10 Unit 10 Unit	1,500,000,000.00	600 Unit 600 Unit	5,100,000,000.00
				Koordinasi dan	Jumlah peserta koordinasi dan pembinaan teknis peningkatan produksi Garam Jumlah peserta koordinasi dan pembinaan teknis peningkatan produksi olahan	Orang Orang	0 Orang 0 Orang		720 Orang 1260 Orang		720 Orang 1260 Orang		720 Orang 1260 Orang		720 Orang 1260 Orang		2880 Orang 5040 Orang	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												
										Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
			2.00	08	02	025	koordinasi dan pembinaan teknis peningkatan produksi Kelautan dan Perikanan	Jumlah peserta koordinasi dan pembinaan teknis peningkatan produksi perikanan budidaya Jumlah peserta koordinasi dan pembinaan teknis peningkatan produksi perikanan tangkap	Orang Orang	0 Orang 0 Orang		1260 Orang 1260 Orang	1,398,000,000.00 	1260 Orang 1260 Orang	1,398,000,000.00 	1,499,000,000.00 	1260 Orang 1260 Orang	1,499,000,000.00 	5040 Orang 5040 Orang	5,794,000,000.00 		
Meningkatkan produksi dan nilai tambah produk perikanan yang berdaya saing	Meningkatnya konsumsi ikan dan daya saing produk kelautan dan perikanan	Kontribusi Ekspor Perikanan Kontribusi Ekspor Perikanan Konsumsi Ikan	2.00	08		03	PROGRAM PENERAPAN MUTU, PENGEMBANGAN USAHA DAN DAYA SAING	Volume ekspor produk KP Nilai ekspor produk KP Jumlah Produksi Olahan Konsumsi dan Non Konsumsi	130.623.1 Ton 340.390.4 US\$ Juta 25.648.77 Ton	143685.41 Ton 374429.44 US\$ Juta 26931.21 Ton	302,860,000.00	158053.95 Ton 411872.38 US\$ Juta 28277.77 Ton	3,270,000,000.00	173859.35 Ton 453059.62 US\$ Juta 29691.66 Ton	3,370,000,000.00	191245.28 Ton 498365.58 US\$ Juta 31176.24 Ton	3,470,000,000.00	200154 Ton 548202.14 US\$ Juta 32735.05 Ton	3,670,000,000.00	200154 Ton 548202.14 US\$ Juta 32735.05 Ton	14,082,860,000.00	
			2.00	08		03	005	Layanan pengujian Laboratorium dalam rangka pemenuhan standar mutu produk dan pemasaran	Jumlah sampel Produk Yang dilakukan pengujian mutu Jumlah layanan pemenuhan standar mutu	Hasil Uji Mutu UPI	0 Hasil uji mutu 0 UPI	0.00	100 Hasil uji mutu 100 UPI	100 Hasil uji mutu 100 UPI	2,100,000,000.00	100 Hasil uji mutu 100 UPI	2,200,000,000.00	100 Hasil uji mutu 100 UPI	2,400,000,000.00	400 Hasil uji mutu 400 UPI	8,700,000,000.00	
			2.00	08		03	007	Pembinaan Daya Saing Hasil Kelautan dan Perikanan yang Inovatif, Produktif dan Kompetitif serta Sertifikasi Kelayakan Pengolah	Jumlah unit usaha pengolah yang mendapatkan pembinaan daya saing	Unit Usaha	0 Unit Usaha	0.00	70 Unit Usaha	70,000,000.00	70 Unit Usaha	70,000,000.00	70 Unit Usaha	70,000,000.00	70 Unit Usaha	70,000,000.00	280 Unit Usaha	280,000,000.00
			2.00	08		03	010	Penetapan standar produk perikanan untuk memenuhi persyaratan ekspor	Dukungan Fasilitasi Persyaratan sertifikasi produk hasil perikanan Dukungan Fasilitasi Persyaratan sertifikasi perikanan tangkap Dukungan Fasilitasi Persyaratan sertifikasi perikanan budidaya	Unit Usaha Unit Usaha Unit Usaha	0 Unit Usaha 0 Unit Usaha 0 Unit Usaha	0.00	70 Unit Usaha 25 Unit Usaha 25 Unit Usaha	 1,200,000,000.00	70 Unit Usaha 25 Unit Usaha 25 Unit Usaha	 1,200,000,000.00	70 Unit Usaha 25 Unit Usaha 25 Unit Usaha	 1,200,000,000.00	280 Unit Usaha 100 Unit Usaha 100 Unit Usaha	 4,800,000,000.00		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												
										Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
Meningkatkan kelestarian dan kualitas lingkungan sumberdaya kelautan dan perikanan	Meningkatnya kelestarian dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya alam kelautan dan perikanan	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (					PROGRAM PENGAWASAN, KONSERVASI, PENATAAN DAN REHABILITASI PESISIR DAN LAUT	Cakupan luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan	101.437 Ha	941210.88 Ha	1008321.53 Ha		1034535.52 Ha		1037262.09 Ha		1038850.36 Ha		1038850.36 Ha		1038850.36 Ha	
Meningkatkan produksi dan nilai tambah produk perikanan yang berdaya saing	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pelaku usaha kelautan dan perikanan	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial	2.00	08	04			% Penurunan tindakan IUU Fishing	11.6%	9.83 %	11,099,415,500.00	8.03 %	11,560,000,000.00	7.19 %	11,787,000,000.00	6.31 %	10,960,000,000.00	5.4 %	11,245,000,000.00	5.4 %	56,651,415,500.00	
		Nilai Tukar Nelayan (NTN)						Cakupan Jumlah Sarana dan Prasarana Yang Tersedia di Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil	2%	20 %		40 %		60 %		80 %		100 %		100 %		
				2.00	08	04	001	Pengadaan sarana dan prasarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (DAK)	Jumlah sarana dan prasarana Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	unit	7 unit	4,191,000,000.00	5 unit	3,600,000,000.00	5 unit	3,827,000,000.00	5 unit	3,000,000,000.00	5 unit	3,285,000,000.00	37 unit	17,903,000,000.00
				2.00	08	04	002	Pembangunan/Rehabilitasi prasarana Kawasan Konservasi Perairan atau Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan prasarana di Pulau-	Jumlah sarana dan prasarana Kawasan Konservasi Perairan daerah jumlah prasarana pulau-	unit	2 unit	1,646,754,700.00	5 unit	1,700,000,000.00	5 unit	1,700,000,000.00	5 unit	1,700,000,000.00	5 unit	1,700,000,000.00	22 unit	8,446,754,700.00
									unit	2 unit	6 unit		6 unit		6 unit		6 unit		6 unit		26 unit	
				2.00	08	04	031	Pengawasan Terpadu SDKP	Jumlah Peserta Koordinasi teknis Pengawasan dan pengendalian SDKP Jumlah Pokmasas yang diberdayakan Jumlah Pengawasan Biota Laut yang dilindungi Jumlah Lokasi Pengawasan Terpadu	Orang Kelompok Jenis Kali Pengawasan	0 Orang 0 Kelompok 0 Jenis 4 Kali Pengawasan	120 Orang 30 Kelompok 3 Jenis 0 Kali Pengawasan		120 Orang 30 Kelompok 3 Jenis 0 Kali Pengawasan		120 Orang 30 Kelompok 3 Jenis 0 Kali Pengawasan		120 Orang 30 Kelompok 3 Jenis 0 Kali Pengawasan		480 Orang 120 Kelompok 12 Jenis 4 Kali Pengawasan		1,664,000,000.00
				2.00	08	04	038	Pengelolaan kawasan konservasi,perairan P3K dan Pemanfaatan Ekosistem Perikanan	Jumlah rehabilitasi ekosistem sumberdaya KP Jumlah pengelolaan dan pembinaan pantai berseri Jumlah Tambatan Perahu didaerah pesisir yang dibangun	Ha Wilayah Unit	0 Ha 0 Wilayah 0 Unit	42 Ha 7 Wilayah 5 Unit		42 Ha 7 Wilayah 5 Unit		42 Ha 7 Wilayah 5 Unit		42 Ha 7 Wilayah 5 Unit		168 Ha 28 Wilayah 20 Unit		8,400,000,000.00
									Jumlah Peserta koordinasi teknis konservasi kawasan dan penataan ruang laut pesisir dan p3k	Orang	0 Orang	120 Orang		120 Orang		120 Orang		120 Orang		480 Orang		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
										Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			2.00	08	04	039	Penataan dan penyusunan rencana pengelolaan kawasan konservasi dan penataan ruang laut dan pulau-pulau kecil	Jumlah penetapan pencadangan kawasan konservasi Jumlah regulasi konservasi dan penataan ruang laut pesisir dan pulau-pulau kecil Jumlah dokumen rencana pengelolaan dan rencana aksi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	Kawasan Regulasi Dokumen	0 Kawasan 0 Regulasi 0 Dokumen	0.00 <										

Tabel T-C.27
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
Dinas Kelautan dan Perikanan
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

Table T-C.27 (Verifikasi Akhir)

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan	
					Tahun 2019	
					TARGET	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatkan Akuntabilitas Perangkat Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah	Nilai Sakip OPD	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	% Pemenuhan administrasi perkantoran	100 %	9,296,678,218.00
Meningkatkan Akuntabilitas Perangkat Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah	Nilai Sakip OPD	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	% Pemenuhan sarana prasarana perkantoran	100 %	3,752,357,000.00
Meningkatkan Akuntabilitas Perangkat Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah (Evaluasi Dokumen Perencanaan)	PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA	% Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu	100 %	1,677,550,600.00
Meningkatkan Akuntabilitas Perangkat Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah	% ASN Nilai SKP Kategori Baik	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	% ASN berkinerja sangat baik	100 %	279,700,000.00
Meningkatkan produksi dan nilai tambah produk perikanan yang berdaya saing	Meningkatnya produksi perikanan dengan menambah jumlah faktor produksi dan produktivitas produksi	Kontribusi PDRB Perikanan	PROGRAM HILIRISASI PERIKANAN (Prioritas)	Nilai Hilirisasi Produksi Perikanan (Prioritas)	Rp.18.851.212.376.010	Rp.18.851.212.376.010
Meningkatkan produksi dan nilai tambah produk perikanan yang berdaya saing	Meningkatnya produksi perikanan dengan menambah jumlah faktor produksi dan produktivitas produksi	Produksi perikanan kelompok nelayan Produksi Perikanan Cakupan Bina Kelompok Nelayan	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI KELAUTAN DAN PERIKANAN	Jumlah produksi perikanan tangkap Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Jumlah produksi garam rakyat	369365 Ton 4656858 Ton 91176.69 Ton	1,652,742,400.00
Meningkatkan produksi dan nilai tambah produk perikanan yang berdaya saing	Meningkatnya konsumsi ikan dan daya saing produk kelautan dan perikanan	Kontribusi Ekspor Perikanan Konsumsi Ikan	PROGRAM PENERAPAN MUTU, PENGEMBANGAN USAHA DAN DAYA SAING	Volume ekspor produk KP Nilai ekspor produk KP Jumlah Produksi Olahan Konsumsi dan Non Konsumsi	143.685.41 Ton 374429.44 US\$ Juta 26931.21 Ton	302,860,000.00
Meningkatkan kelestarian dan kualitas lingkungan sumberdaya kelautan dan perikanan	Meningkatnya kelestarian dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya alam kelautan dan perikanan	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (	PROGRAM PENGAWASAN, KONSERVASI, PENATAAN DAN REHABILITASI PESISIR DAN LAUT	Cakupan luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan	941.210.88 Ha	11,099,415,500.00
Meningkatkan produksi dan nilai tambah produk perikanan yang berdaya saing	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pelaku usaha kelautan dan perikanan	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial		% Penurunan tindakan IUU Fishing	9.83 %	
		Nilai Tukar Nelayan (NTN)		Cakupan Jumlah Sarana dan Prasarana Yang Tersedia di Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil	20 %	
Grandtotal						75,429,977,368.00

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan	
		Tahun 2019	
		TARGET	REALISASI*)
(1)	(2)	(3)	(4)
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	% Pemenuhan administrasi perkantoran	100 %	87,92%
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	% Pemenuhan sarana prasarana perkantoran	100 %	94,06%
PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA	% Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu	100 %	95,42%
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	% ASN berkinerja sangat baik	100 %	DATA BLM MSK
PROGRAM HILIRISASI PERIKANAN (Prioritas)	Nilai Hilirisasi Produksi Perikanan (Prioritas)	Rp.18.851.212.376.010	Rp.18.851.212.376.010
PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI KELAUTAN DAN PERIKANAN	Jumlah produksi perikanan tangkap	369.365 Ton	430.762.1 Ton
	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	4.656.858 Ton	3.719.873.6 Ton
	Jumlah produksi garam rakyat	91.176.69 Ton	126.923 Ton
PROGRAM PENERAPAN MUTU, PENGEMBANGAN USAHA DAN DAYA SAING	Volume ekspor produk KP	143.685.41 Ton	143.685.41 Ton
	Nilai ekspor produk KP	374429.44 US\$ Juta	374.429.44 US\$ Juta
	Jumlah Produksi Olahan Konsumsi dan Non Konsumsi	26.931.21 Ton	DATA BLM MSK
PROGRAM PENGAWASAN, KONSERVASI, PENATAAN DAN REHABILITASI PESISIR DAN LAUT	Cakupan luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan	941.210.88 Ha	1.001.941,71 Ha
	% Penurunan tindakan IUU Fishing	9.83 %	DATA BLM MSK
	Cakupan Jumlah Sarana dan Prasarana Yang Tersedia di Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil	20 %	15 %

Tabel T-C.27
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
Dinas Kelautan dan Perikanan
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

Table T-C.27 (Verifikasi Akhir)

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	RENCANA ANGGARAN		PD Penanggung Jawab
									Tahun 2020		
									Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(10)	(11)	(20)
Meningkatkan Akuntabilitas Perangkat Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah	Nilai Sakip OPD	0.00	00	50		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	% Pemenuhan administrasi perkantoran	100 %	9,295,189,774.54	SEKRETARIAT
Meningkatkan Akuntabilitas Perangkat Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah	% ASN Nilai SKP Kategori Baik	0.00	00	53		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	% ASN berkinerja sangat baik	100 %	303,000,000.00	SEKRETARIAT
Meningkatkan produksi dan nilai tambah produk perikanan yang berdaya saing	Meningkatnya produksi perikanan dengan menambah jumlah faktor produksi dan produktivitas produksi	Kontribusi PDRB Perikanan	2.00	08	01		PROGRAM HILIRISASI PERIKANAN (Prioritas)	Nilai Hilirisasi Produksi Perikanan (Prioritas)	19793772994810 Rp	43,608,000,000.00	SEKRETARIAT
Meningkatkan produksi dan nilai tambah produk perikanan yang berdaya saing	Meningkatnya produksi perikanan dengan menambah jumlah faktor produksi dan produktivitas produksi	Produksi perikanan kelompok nelayan Produksi Perikanan Cakupan Bina Kelompok Nelayan	2.00	08	02		PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI KELAUTAN DAN PERIKANAN	Jumlah produksi perikanan tangkap Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Jumlah produksi garam rakyat	374981 Ton 5088024 Ton 95735.52 Ton	2,398,000,000.00	Dinas Kelautan dan Perikanan
Meningkatkan produksi dan nilai tambah produk perikanan yang berdaya saing	Meningkatnya konsumsi ikan dan daya saing produk kelautan dan perikanan	Kontribusi Ekspor Perikanan Konsumsi Ikan	2.00	08	03		PROGRAM PENERAPAN MUTU, PENGEMBANGAN USAHA DAN DAYA SAING	Volume ekspor produk KP Nilai ekspor produk KP Jumlah Produksi Olahan Konsumsi dan Non Konsumsi	158.053.95 Ton 411872.38 US\$ Juta 28277.77 Ton	3,270,000,000.00	Dinas Kelautan dan Perikanan
Meningkatkan kelestarian dan kualitas lingkungan sumberdaya kelautan dan perikanan Meningkatkan produksi dan nilai tambah produk perikanan yang berdaya saing	Meningkatnya kelestarian dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya alam kelautan dan perikanan Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pelaku usaha kelautan dan perikanan	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (Rasio kawasan lindung masyarakat pelaku usaha kelautan dan teritorial Nilai Tukar Nelayan (NTN)	2.00	08	04		PROGRAM PENGAWASAN, KONSERVASI, PENATAAN DAN REHABILITASI PESISIR DAN LAUT	Cakupan luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan % Penurunan tindakan IUU Fishing Cakupan Jumlah Sarana dan Prasarana Yang Tersedia di Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil	1.008.321.53 Ha 8.03 % 40 %	11,560,000,000.00	Dinas Kelautan dan Perikanan
Grandtotal									75,600,946,774.54		

Tabel T-C.27
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
Dinas Kelautan dan Perikanan
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

Table T-C.27 (Verifikasi Akhir)

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	RENCANA ANGGARAN		PD Penanggung Jawab
									Tahun 2020		
									Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(10)	(11)	(20)
Meningkatkan Akuntabilitas Perangkat Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah	Nilai Sakip OPD	0.00	00	50		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	% Pemenuhan administrasi perkantoran	100 %	9,295,189,774.54	SEKRETARIAT
Meningkatkan Akuntabilitas Perangkat Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah	% ASN Nilai SKP Kategori Baik	0.00	00	53		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	% ASN berkinerja sangat baik	100 %	303,000,000.00	SEKRETARIAT
Meningkatkan produksi dan nilai tambah produk perikanan yang berdaya saing	Meningkatnya produksi perikanan dengan menambah jumlah faktor produksi dan produktivitas produksi	Kontribusi PDRB Perikanan	2.00	08	01		PROGRAM HILIRISASI PERIKANAN (Prioritas)	Nilai Hilirisasi Produksi Perikanan (Prioritas)	19793772994810 Rp	43,608,000,000.00	SEKRETARIAT
Meningkatkan produksi dan nilai tambah produk perikanan yang berdaya saing	Meningkatnya produksi perikanan dengan menambah jumlah faktor produksi dan produktivitas produksi	Produksi perikanan kelompok nelayan Produksi Perikanan Cakupan Bina Kelompok Nelayan	2.00	08	02		PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI KELAUTAN DAN PERIKANAN	Jumlah produksi perikanan tangkap Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Jumlah produksi garam rakyat	374981 Ton 5088024 Ton 95735.52 Ton	2,398,000,000.00	Dinas Kelautan dan Perikanan
Meningkatkan produksi dan nilai tambah produk perikanan yang berdaya saing	Meningkatnya konsumsi ikan dan daya saing produk kelautan dan perikanan	Kontribusi Ekspor Perikanan Konsumsi Ikan	2.00	08	03		PROGRAM PENERAPAN MUTU, PENGEMBANGAN USAHA DAN DAYA SAING	Volume ekspor produk KP Nilai ekspor produk KP Jumlah Produksi Olahan Konsumsi dan Non Konsumsi	158.053.95 Ton 411872.38 US\$ Juta 28277.77 Ton	3,270,000,000.00	Dinas Kelautan dan Perikanan
Meningkatkan kelestarian dan kualitas lingkungan sumberdaya kelautan dan perikanan Meningkatkan produksi dan nilai tambah produk perikanan yang berdaya saing	Meningkatnya kelestarian dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya alam kelautan dan perikanan Meningkatkan kesejahteraan masyarakat pelaku usaha kelautan dan perikanan	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (Rasio kawasan lindung masyarakat pelaku usaha kelautan dan teritorial Nilai Tukar Nelayan (NTN)	2.00	08	04		PROGRAM PENGAWASAN, KONSERVASI, PENATAAN DAN REHABILITASI PESISIR DAN LAUT	Cakupan luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan % Penurunan tindakan IUU Fishing Cakupan Jumlah Sarana dan Prasarana Yang Tersedia di Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil	1.008.321.53 Ha 8.03 % 40 %	11,560,000,000.00	Dinas Kelautan dan Perikanan
Grandtotal									75,600,946,774.54		

Tabel T-C.27

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Dinas Kelautan dan Perikanan

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

Table T-C.27 (Verifikasi Akhir)

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pen						
										Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Ta
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Meningkatkan Akuntabilitas Perangkat Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah	Nilai Sakip OPD	0.00	00	50		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	% Pemenuhan administrasi perkantoran	100%	100 %	9,296,678,218.00	100 %	9,295,189,774.54	100 %	9,328,160,891.43	100 %
Meningkatkan Akuntabilitas Perangkat Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah	Nilai Sakip OPD	0.00	00	51		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	% Pemenuhan sarana prasarana perkantoran	100%	100 %	3,752,357,000.00	100 %	3,576,757,000.00	100 %	3,674,881,000.00	100 %
Meningkatkan Akuntabilitas Perangkat Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah (Evaluasi Dokumen Perencanaan)	0.00	00	52		PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA	% Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu	100%	100 %	1,677,550,600.00	100 %	1,590,000,000.00	100 %	1,600,000,000.00	100 %
Meningkatkan Akuntabilitas Perangkat Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah	% ASN Nilai SKP Kategori Baik	0.00	00	53		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	% ASN berkinerja sangat baik	100%	100 %	279,700,000.00	100 %	303,000,000.00	100 %	313,000,000.00	100 %
Meningkatkan produksi dan nilai tambah produk perikanan yang berdaya saing	Meningkatnya produksi perikanan dengan menambah jumlah faktor produksi dan produktivitas produksi	Kontribusi PDRB Perikanan	2.00	08	01		PROGRAM HILIRISASI PERIKANAN (Prioritas)	Nilai Hilirisasi Produksi Perikanan (Prioritas)	Rp.17.953.535.596.200	18.851.212.376.010 Rp	47,368,673,650.00	19.793.772.994.810 Rp	43,608,000,000.00	20.783.461.644.551 Rp	45,732,000,000.00	21822634726778 Rp
Meningkatkan produksi dan nilai tambah produk perikanan yang berdaya saing	Meningkatnya produksi perikanan dengan menambah jumlah faktor produksi dan produktivitas produksi	Produksi perikanan kelompok nelayan	2.00	08	02		PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI KELAUTAN DAN PERIKANAN	Jumlah produksi perikanan tangkap	363.853 Ton	369365 Ton	1,652,742,400.00	374981 Ton	2,398,000,000.00	380743 Ton	2,598,000,000.00	386644 Ton
		Produksi Perikanan						Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	3.531.233.6 Ton	4656858 Ton		5088024 Ton		5559907 Ton		6076403 Ton
		Cakupan Bina Kelompok Nelayan						Jumlah produksi garam rakyat	86.834.94 Ton	91176.69 Ton		95735.52 Ton		100522.3 Ton		105548.41 Ton

Meningkatkan produksi dan nilai tambah produk perikanan yang berdaya saing	Meningkatnya konsumsi ikan dan daya saing produk kelautan dan perikanan	Kontribusi Ekspor Perikanan	2.00	08	03		PROGRAM PENERAPAN MUTU, PENGEMBANGAN USAHA DAN DAYA SAING	Volume ekspor produk KP Nilai ekspor produk KP Jumlah Produksi Olahan Konsumsi dan Non Konsumsi	130.623.1 Ton 340.390.4 US\$ Juta 25.648.77 Ton	143.685.41 Ton 374429.44 US\$ Juta 26931.21 Ton	302,860,000.00	158.053.95 Ton 411872.38 US\$ Juta 28277.77 Ton	3,270,000,000.00	173.859.35 Ton 453059.62 US\$ Juta 29691.66 Ton	3,370,000,000.00	191.245.28 Ton 498365.58 US\$ Juta 31176.24 Ton
Meningkatkan kelestarian dan kualitas lingkungan sumberdaya kelautan dan perikanan	Meningkatnya kelestarian dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya alam kelautan dan perikanan	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (						Cakupan luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan	674.119 Ha	941.210.88 Ha		1.008.321.53 Ha		1.034.535.52 Ha		1.037.262.09 Ha
Meningkatkan produksi dan nilai tambah produk perikanan yang berdaya saing	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pelaku usaha kelautan dan perikanan	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial	2.00	08	04		PROGRAM PENGAWASAN, KONSERVASI, PENATAAN DAN REHABILITASI PESISIR DAN LAUT	% Penurunan tindakan IUU Fishing	11.6%	9.83 %	11,099,415,500.00	8.03 %	11,560,000,000.00	7.19 %	11,787,000,000.00	6.31 %
		Nilai Tukar Nelayan (NTN)						Cakupan Jumlah Sarana dan Prasarana Yang Tersedia di Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil	2%	20 %		40 %		60 %		80 %
Grandtotal											75,429,977,368.00		75,600,946,774.54		78,403,041,891.43	

danaan					PD Penanggung Jawab
ahun 2022	Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		
Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
9,387,355,196.90	100 %	9,459,368,209.86	100 %	46,766,752,290.73	Dinas Kelautan dan Perikanan
3,722,467,000.00	100 %	3,742,467,000.00	100 %	18,468,929,000.00	Dinas Kelautan dan Perikanan
1,610,000,000.00	100 %	1,724,000,000.00	100 %	8,201,550,600.00	Dinas Kelautan dan Perikanan
323,000,000.00	100 %	328,000,000.00	100 %	1,546,700,000.00	Dinas Kelautan dan Perikanan
47,052,000,000.00	22913766463117 Rp	49,043,000,000.00	22913766463117 Rp	232,803,673,650.00	Dinas Kelautan dan Perikanan
2,899,000,000.00	392318 Ton 6641782 Ton 110825.83 Ton	2,999,000,000.00	392318 Ton 6641782 Ton 110825.83 Ton	12,546,742,400.00	Dinas Kelautan dan Perikanan

3,470,000,000.00	200.154 Ton 548202.14 US\$ Juta 32735.05 Ton	3,670,000,000.00	200.154 Ton 548202.14 US\$ Juta 32735.05 Ton	14,082,860,000.00	Dinas Kelautan dan Perikanan
10,960,000,000.00	1.038.850.36 Ha 5.4 % 100 %	11,245,000,000.00	1.038.850.36 Ha 5.4 % 100 %	56,651,415,500.00	Dinas Kelautan dan Perikanan
79,423,822,196.90	82,210,835,209.86		391,068,623,440.73		

Tabel T-C.27
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
Dinas Kelautan dan Perikanan
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

Table T-C.27 (Verifikasi Akhir)																						
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD Penanggung Jawab	
									Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD			
									Target (8)	Rp (9)	Target (10)	Rp (11)	Target (12)	Rp (13)	Target (14)	Rp (15)	Target (16)	Rp (17)	Target (18)	Rp (19)		(20)
Meningkatkan Akuntabilitas Perangkat Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah	Nilai Sakip OPD	0.00	00	50	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	% Pemenuhan administrasi perkantoran	100%	100 %	9,296,678,218.00	100 %	9,295,189,774.54	100 %	9,328,160,891.43	100 %	9,387,355,196.90	100 %	9,459,368,209.86	100 %	46,766,752,290.73	Dinas Kelautan dan Perikanan	
			0.00	00	50	001	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah biaya tagihan telepon, air dan listrik	bulan	12 Bulan	1,212,000,000.00	12 Bulan	1,251,129,556.54	12 Bulan	1,252,360,891.43	12 Bulan	1,239,555,196.90	12 Bulan	1,239,568,209.86	60 Bulan	6,194,613,854.73	Dinas Kelautan dan Perikanan
			0.00	00	50	002	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pajak kendaraan dinas/operasi al Roda 4 yang terbayarkan Jumlah pajak kendaraan dinas/operasi al Roda 2 yang terbayarkan	Unit Unit	24 Unit 24 Unit	96,000,000.00	24 Unit	96,000,000.00	24 Unit	96,000,000.00	24 Unit	96,000,000.00	24 Unit	96,000,000.00	120 Unit 120 Unit	480,000,000.00	Dinas Kelautan dan Perikanan
			0.00	00	50	003	Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS	Jumlah Jasa Tenaga Non PNS	150 orang	148 Orang	3,148,800,000.00	148 Orang	3,148,800,000.00	148 Orang	3,148,800,000.00	148 Orang	3,148,800,000.00	148 Orang	3,148,800,000.00	740 Orang	15,744,000,000.00	Dinas Kelautan dan Perikanan
			0.00	00	50	005	Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah ATK yang tersedia	Jenis ATK	30 Jenis ATK	1,290,260,218.00	30 Jenis ATK	1,290,260,218.00	30 Jenis ATK	1,300,000,000.00	30 Jenis ATK	1,350,000,000.00	30 Jenis ATK	1,400,000,000.00	150 Jenis ATK	6,630,520,436.00	Dinas Kelautan dan Perikanan
			0.00	00	50	006	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	Unit	240 Unit	128,513,000.00	0 Unit	0.00	0 Unit	0.00	0 Unit	0.00	0 Unit	0.00	240 Unit	128,513,000.00	Dinas Kelautan dan Perikanan
			0.00	00	50	008	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah biaya jamuan makan dan minum yang tersedia		2 Jenis	2,066,105,000.00	2 Jenis	2,068,000,000.00	2 Jenis	2,070,000,000.00	2 Jenis	2,072,000,000.00	2 Jenis	2,074,000,000.00	10 Jenis	10,350,105,000.00	Dinas Kelautan dan Perikanan
			0.00	00	50	009	Pelaksanaan dan Keikutsertaan Pameran	Jumlah Keikutsertaan dalam Pameran		4 Pameran	180,000,000.00	4 Pameran	240,000,000.00	4 Pameran	260,000,000.00	4 Pameran	280,000,000.00	4 Pameran	300,000,000.00	20 Pameran	1,260,000,000.00	Dinas Kelautan dan Perikanan
			0.00	00	50	010	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas	Kali	133 Kali	1,175,000,000.00	133 Kali	1,201,000,000.00	133 Kali	1,201,000,000.00	133 Kali	1,201,000,000.00	133 Kali	1,201,000,000.00	665 Kali	5,979,000,000.00	Dinas Kelautan dan Perikanan
Meningkatkan Akuntabilitas Perangkat Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah	Nilai Sakip OPD	0.00	00	51	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	% Pemenuhan sarana prasarana perkantoran	100%	100 %	3,752,357,000.00	100 %	3,576,757,000.00	100 %	3,674,881,000.00	100 %	3,722,467,000.00	100 %	3,742,467,000.00	100 %	18,468,929,000.00	Dinas Kelautan dan Perikanan	
			0.00	00	51	002	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan / Rumah Dinas	Jumlah Unit rumah jabatan/ rumah dinas yang dipelihara	unit	2 Unit	125,000,000.00	2 Unit	125,000,000.00	2 Unit	125,000,000.00	2 Unit	125,000,000.00	2 Unit	125,000,000.00	10 Unit	625,000,000.00	Dinas Kelautan dan Perikanan
			0.00	00	51	004	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor / Asrama	Jumlah Unit gedung kantor/asrama yang dipelihara	unit	7 Unit	1,507,954,000.00	7 Unit	1,507,954,000.00	7 Unit	1,507,954,000.00	7 Unit	1,507,954,000.00	7 Unit	1,507,954,000.00	35 Unit	7,539,770,000.00	Dinas Kelautan dan Perikanan
			0.00	00	51	006	Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Jabatan/Dinas	Jumlah kendaraan jabatan/dinas yang dipelihara	Unit	14 Unit	920,565,000.00	14 Unit	979,495,000.00	14 Unit	979,495,000.00	14 Unit	979,495,000.00	14 Unit	979,495,000.00	70 Unit	4,838,545,000.00	Dinas Kelautan dan Perikanan
			0.00	00	51	007	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah perlengkapan dan peralatan rumah jabatan/dinas yang tersedia	unit	20 Unit	93,550,000.00	20 Unit	94,020,000.00	20 Unit	136,050,000.00	20 Unit	136,050,000.00	20 Unit	136,050,000.00	100 Unit	595,720,000.00	Dinas Kelautan dan Perikanan
			0.00	00	51	008	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah perlengkapan dan peralatan rumah jabatan/dinas yang dipelihara	unit	2 Unit	15,000,000.00	2 Unit	15,000,000.00	2 Unit	15,000,000.00	2 Unit	15,000,000.00	2 Unit	15,000,000.00	10 Unit	75,000,000.00	Dinas Kelautan dan Perikanan
			0.00	00	51	009	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang tersedia	unit	60 Unit	1,030,788,000.00	60 Unit	775,288,000.00	60 Unit	825,288,000.00	60 Unit	872,874,000.00	60 Unit	872,874,000.00	300 Unit	4,377,112,000.00	Dinas Kelautan dan Perikanan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD Penanggung Jawab		
										Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			0.00	00	51	010	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah perengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara	unit	10 Unit	59,500,000.00	10 Unit	60,000,000.00	10 Unit	66,094,000.00	10 Unit	66,094,000.00	10 Unit	86,094,000.00	50 Unit	337,782,000.00	Dinas Kelautan dan Perikanan
			0.00	00	51	012	Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi/Aplikasi/Website	Jumlah Sistem Informasi/Aplikasi yang dipelihara dan dikembangkan Jumlah Berita/Informasi yang diposting di Website		0 Sistem Informasi/Aplikasi 0 Berita/Informasi	0.00	1 Sistem Informasi/Aplikasi 70 Berita/Informasi	20,000,000.00	1 Sistem Informasi/Aplikasi 70 Berita/Informasi	20,000,000.00	1 Sistem Informasi/Aplikasi 70 Berita/Informasi	20,000,000.00	1 Sistem Informasi/Aplikasi 70 Berita/Informasi	20,000,000.00	4 Sistem Informasi/Aplikasi 280 Berita/Informasi	80,000,000.00	Dinas Kelautan dan Perikanan
Meningkatkan Akuntabilitas Perangkat Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah (Evaluasi Dokumen Perencanaan)	0.00	00	52		PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA	Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat	100%	100 %	1,677,550,600.00	100 %	1,590,000,000.00	100 %	1,600,000,000.00	100 %	1,610,000,000.00	100 %	1,724,000,000.00	100 %	8,201,550,600.00	Dinas Kelautan dan Perikanan
			0.00	00	52	001	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah	Jumlah peserta yang mengikuti Forum Perangkat Daerah	Orang	85 Orang	11,650,000.00	0 Orang	0.00	0 Orang	0.00	0 Orang	0.00	0 Orang	0.00	85 Orang	11,650,000.00	Dinas Kelautan dan Perikanan
			0.00	00	52	002	Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	Dokumen RKA dan DPA baik Pokok dan Perubahan yang dinilai Dokumen Renja dan Perubahan Renja yang disusun dan dinilai Dokumen "Jumian" Dokumen Renstra PD yang disusun dan dinilai Dokumen Evaluasi PD yang tersusun Jumlah dokumen perencanaan	4 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 4 Dokumen 1 Dokumen	4 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 4 Dokumen 0 Dokumen	0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 5 Dokumen	0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 5 Dokumen	0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 5 Dokumen	0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 5 Dokumen	0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 5 Dokumen	0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 5 Dokumen	0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 5 Dokumen	4 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 40 Dokumen 20 Dokumen	4,085,108,900.00	Dinas Kelautan dan Perikanan		
			0.00	00	52	003	Penyusunan Usulan dan Pelaporan Dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan DAK	Jumlah usulan kegiatan dana dekonsentrasi, tugas pembantuan dan DAK	Usulan Kegiatan	50 Usulan Kegiatan	216,866,700.00	0 Usulan Kegiatan	0.00	0 Usulan Kegiatan	0.00	0 Usulan Kegiatan	0.00	0 Usulan Kegiatan	0.00	50 Usulan Kegiatan	216,866,700.00	Dinas Kelautan dan Perikanan
			0.00	00	52	004	Pengumpulan dan Publikasi Data dan Informasi OPD	Jumlah Laporan Data & Informasi yang dikumpulkan Jumlah Data dan Informasi yang terpublikasi	Laporan Jenis	2 Laporan 6 Jenis	500,000,000.00	2 Laporan 6 Jenis	500,000,000.00	2 Laporan 6 Jenis	500,000,000.00	2 Laporan 6 Jenis	500,000,000.00	2 Laporan 6 Jenis	600,000,000.00	10 Laporan 30 Jenis	2,600,000,000.00	Dinas Kelautan dan Perikanan
			0.00	00	52	005	Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	Jenis Laporan	6 Laporan	252,000,000.00	6 Laporan	240,000,000.00	6 Laporan	250,000,000.00	6 Laporan	260,000,000.00	6 Laporan	274,000,000.00	30 Laporan	1,276,000,000.00	Dinas Kelautan dan Perikanan
			0.00	00	52	006	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan semesteran dan akhir tahun yang disusun	Laporan	2 Laporan	11,925,000.00	0 Laporan	0.00	0 Laporan	0.00	0 Laporan	0.00	0 Laporan	0.00	2 Laporan	11,925,000.00	Dinas Kelautan dan Perikanan
Meningkatkan Akuntabilitas Perangkat Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah	% ASN Nilai SKP Kategori Baik	0.00	00	53		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	% ASN berkinerja sangat baik	100%	100 %	279,700,000.00	100 %	303,000,000.00	100 %	313,000,000.00	100 %	323,000,000.00	100 %	328,000,000.00	100 %	1,546,700,000.00	Dinas Kelautan dan Perikanan
			0.00	00	53	001	Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawalan	Jumlah Aparat OPD yang kelola administrasi kepegawatannya Jumlah laporan administrasi kepegawalan yang disusun	Orang Laporan	210 Orang 8 Laporan	6,700,000.00	210 Orang 8 Laporan	30,000,000.00	201 Orang 8 Laporan	40,000,000.00	210 Orang 8 Laporan	50,000,000.00	210 Orang 8 Laporan	55,000,000.00	1050 Orang 40 Laporan	181,700,000.00	Dinas Kelautan dan Perikanan
			0.00	00	53	002	Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya yang tersedia		210 Pasang	273,000,000.00	210 Pasang	273,000,000.00	210 Pasang	273,000,000.00	210 Pasang	273,000,000.00	210 Pasang	273,000,000.00	1050 Pasang	1,365,000,000.00	Dinas Kelautan dan Perikanan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											PD Penanggung Jawab	
									Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Meningkatkan produksi dan nilai tambah produk perikanan yang berdaya saing	Meningkatnya produksi perikanan dengan menambah jumlah faktor produksi dan produktivitas produksi	Kontribusi PDRB Perikanan	2.00	08	01	PROGRAM HILIRISASI PERIKANAN (Prioritas)	Nilai Hilirisasi Produk Perikanan (Prioritas)	Rp.17.953.535.596.200	18.851.212.376.010 Rp	47,368,673,650.00	19.793.772.994.810 Rp	43,608,000,000.00	20.783.461.644.551 Rp	45,732,000,000.00	21.822.634.726.778 Rp	47,052,000,000.00	22.913.766.463.117 Rp	49,043,000,000.00	22.913.766.463.117 Rp	232,803,673,650.00	Dinas Kelautan dan Perikanan
			2.00	08	01	001	Diseminasi Inovasi Teknologi Budidaya Udang Windu Berbasis Kawasan (SITTO BANGKIT)	unit	100 Unit	4,855,000,000.00	100 Unit	5,000,000,000.00	100 Unit	5,000,000,000.00	100 Unit	5,000,000,000.00	100 Unit	5,000,000,000.00	500 Unit	24,855,000,000.00	Dinas Kelautan dan Perikanan
			2.00	08	01	002	Diseminasi Inovasi Teknologi Kebun Bibit Rumput Laut	unit	6 unit	370,000,000.00	0 unit	0.00	0 unit	0.00	0 unit	0.00	0 unit	0.00	6 unit	370,000,000.00	Dinas Kelautan dan Perikanan
			2.00	08	01	003	Inovasi Teknologi pengembangan budidaya Rumput Laut	unit	1000 unit	2,337,000,000.00	0 unit	0.00	0 unit	0.00	0 unit	0.00	0 unit	0.00	1000 unit	2,337,000,000.00	Dinas Kelautan dan Perikanan
			2.00	08	01	004	Penerapan Standar Budidaya perikanan untuk memenuhi persyaratan ekspor	unit	1 unit	80,000,000.00	0 unit	0.00	0 unit	0.00	0 unit	0.00	0 unit	0.00	1 unit	80,000,000.00	Dinas Kelautan dan Perikanan
			2.00	08	01	005	Pengendalian penggunaan Pakan dan Obat-obatan	unit	30 Laporan	30,000,000.00	0 Laporan	0.00	0 Laporan	0.00	0 Laporan	0.00	0 Laporan	0.00	30 Laporan	30,000,000.00	Dinas Kelautan dan Perikanan
			2.00	08	01	006	Inovasi Teknologi Usaha Perikanan Budidaya dalam rangka Pengembangan Komoditas unggulan dan komoditas perikanan lainnya	unit	20 unit	1,548,100,000.00	120 unit	7,840,000,000.00	120 unit	7,840,000,000.00	120 unit	7,840,000,000.00	120 unit	7,840,000,000.00	500 unit	32,908,100,000.00	Dinas Kelautan dan Perikanan
			2.00	08	01	007	Penyediaan dan Pembesaran Induk Unggul berkualitas pada budidaya payau dan laut		840000 ekor	3,669,954,000.00	0 ekor	0.00	0 ekor	0.00	0 ekor	0.00	0 ekor	0.00	840000 ekor	3,669,954,000.00	Dinas Kelautan dan Perikanan
			2.00	08	01	008	Pengelolaan Sistem Kesehatan Ikan dan analisis manajemen resiko usaha budidaya	unit	10 Dokumen 4 Laporan 11 unit	 60,000,000.00	0 Dokumen 0 Laporan 0 unit	 0.00	0 Dokumen 0 Laporan 0 unit	 0.00	0 Dokumen 0 Laporan 0 unit	0 Dokumen 0.00	0 Laporan 0 unit	0.00 0.00	10 Dokumen 4 Laporan 11 unit	 60,000,000.00	Dinas Kelautan dan Perikanan
			2.00	08	01	009	Inovasi Teknologi pengembangan usaha Garam	unit	40 unit	324,250,000.00	35 unit	1,934,000,000.00	35 unit	2,508,000,000.00	35 unit	2,528,000,000.00	35 unit	2,519,000,000.00	180 unit	9,813,250,000.00	Dinas Kelautan dan Perikanan
			2.00	08	01	010	Pengelolaan saluran tambak garam	3 unit	2 unit	410,000,000.00	0 unit	0.00	0 unit	0.00	0 unit	0.00	0 unit	0.00	2 unit	410,000,000.00	Dinas Kelautan dan Perikanan
			2.00	08	01	012	Pembinaan Teknis Penanganan Hasil Tangkapan Ikan di Atas Kapal	orang	150 orang	268,624,500.00	0 orang	0.00	0 orang	0.00	0 orang	0.00	0 orang	0.00	150 orang	268,624,500.00	Dinas Kelautan dan Perikanan
			2.00	08	01	013	Pembangunan/Rehabilitasi sarana dan prasarana fasilitas pokok dan fasilitas fungsional Pelabuhan Perikanan (UPT Provinsi) (DAK)	4 unit PPI	5 unit	5,002,550,000.00	5 unit	9,000,000,000.00	5 unit	9,000,000,000.00	5 unit	9,000,000,000.00	5 unit	9,000,000,000.00	25 unit	41,002,550,000.00	Dinas Kelautan dan Perikanan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD Penanggung Jawab	
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD			
							Target (8)	Rp (9)	Target (10)	Rp (11)	Target (12)	Rp (13)	Target (14)	Rp (15)	Target (16)	Rp (17)	Target (18)	Rp (19)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
			2.00	08	01	014	Pembinaan Teknis Usaha perikanan budidaya dalam rangka pengembangan Komoditas Unggulan (Perencanaan Bisnis, Perbaikan Pencatatan Produksi dan Penataan organisasi kelompok)	Jumlah pembudidaya yang mendapatkan pembinaan teknis dalam rangka pengembangan Komoditas Unggulan	orang	100 orang	838,130,100.00	0 orang	0.00	0 orang	0.00	0 orang	0.00	100 orang	838,130,100.00	Dinas Kelautan dan Perikanan
			2.00	08	01	015	Sertifikasi Usaha Perikanan Budidaya	Jumlah unit usaha perikanan budidaya yang mendapatkan sertifikasi usaha budidaya	unit usaha	100 unit usaha	115,600,000.00	0 unit usaha	0.00	0 unit usaha	0.00	0 unit usaha	0.00	100 unit usaha	115,600,000.00	Dinas Kelautan dan Perikanan
			2.00	08	01	016	Pembangunan/Rehabilitasi Unit Perbenihan (UPTD-Provinsi) dan Percontohan Budidaya Laut (DAK)	Jumlah sarana dan prasarana pokok unit budidaya yang terbangun Jumlah percontohan budidaya laut	unit unit	8 unit 0 unit	2,272,920,300.00	0 unit 40 unit	2,000,000,000.00 40 unit	0 unit 40 unit	1,500,000,000.00 40 unit	0 unit 40 unit	1,500,000,000.00 160 unit	8 unit 160 unit	9,272,920,300.00	Dinas Kelautan dan Perikanan
			2.00	08	01	017	Pemberdayaan Kelompok Usaha Garam	Jumlah sarana pemberdayaan kelompok usaha garam yang diberdayakan	Kelompok	145 unit	933,000,000.00	0 unit	0.00	0 unit	0.00	0 unit	0.00	145 unit	933,000,000.00	Dinas Kelautan dan Perikanan
			2.00	08	01	018	Pengadaan sarana dan prasarana usaha garam (DAK)	Jumlah sarana dan prasarana usaha garam yang dibangun	8 unit	1 unit	1,674,000,000.00	16 unit	2,450,000,000.00	16 unit	2,450,000,000.00	16 unit	2,450,000,000.00	65 unit	11,474,000,000.00	Dinas Kelautan dan Perikanan
			2.00	08	01	019	Penyediaan Sarana Dan Prasarana Peningkatan Kapasitas Nelayan	Jumlah kapal yang dibangun Jumlah sarana dan prasarana alat tangkap Jumlah alat bantu tangkap	unit unit unit	57 unit 155 unit 1800 piece	18,355,800,000.00	150 unit 100 piece	9,450,000,000.00 100 piece	150 unit 100 piece	11,000,000,000.00 100 piece	150 unit 100 piece	13,000,000,000.00 2200 piece	755 unit 2200 piece	62,805,800,000.00	Dinas Kelautan dan Perikanan
			2.00	08	01	020	Penyediaan sarana dan prasarana pemasaran ikan higienis dan distribusi ikan di Pelabuhan Perikanan Wilayah 1	Jumlah sarana dan prasarana distribusi ikan Jumlah sarana dan prasarana pemasaran ikan higienis	unit unit	7 unit 100 unit	1,059,000,000.00	0 unit 0 unit	0.00 0.00	0 unit 0 unit	0.00 0.00	0 unit 0 unit	7 unit 100 unit	1,059,000,000.00	Dinas Kelautan dan Perikanan	
			2.00	08	01	021	Inovasi sistem olahan rumput laut	Jumlah inovasi sistem olahan produk	inovasi	2 Inovasi	41,900,000.00	0 inovasi	0.00	0 inovasi	0.00	0 inovasi	0.00	2 inovasi	41,900,000.00	Dinas Kelautan dan Perikanan
			2.00	08	01	023	Penguatan pola kemitraan dan promosi produk	Jumlah promosi yang diikuti mitra kerjasama pada Mitra Usaha Perikanan dalam memasarkan dan	3 kegiatan promosi Mou	5 kegiatan promosi 3 Mou	128,396,750.00	2 kegiatan promosi 1 Mou	200,000,000.00 1 Mou	2 kegiatan promosi 1 Mou	200,000,000.00 1 Mou	2 kegiatan promosi 1 Mou	13 kegiatan promosi 7 Mou	4,528,396,750.00	Dinas Kelautan dan Perikanan	
			2.00	08	01	024	Inovasi pengolahan garam bahan baku industri, bahan baku farmasi dan garam konsumsi	Jumlah inovasi pengolahan garam bahan baku industri, farmasi, dan	unit	1 unit	43,800,000.00	0 unit	0.00	0 unit	0.00	0 unit	0.00	1 unit	43,800,000.00	Dinas Kelautan dan Perikanan
			2.00	08	01	025	Penyediaan sarana dan prasarana pemasaran ikan higienis dan distribusi ikan di Pelabuhan Perikanan Wilayah 2	Jumlah sarana dan prasarana distribusi ikan Jumlah sarana dan prasarana pemasaran ikan higienis	unit unit	4 unit 100 unit	550,000,000.00	0 unit 0 unit	0.00 0.00	0 unit 0 unit	0.00 0.00	0 unit 0 unit	4 unit 100 unit	550,000,000.00	Dinas Kelautan dan Perikanan	
			2.00	08	01	026	Inovasi Teknologi Produk Olahan Hasil Kelautan dan Perikanan konsumsi dan non konsumsi	Jumlah inovasi teknologi produk olahan hasil KP konsumsi dan non konsumsi	unit	1 unit	344,000,000.00	50 unit	1,000,000,000.00	50 unit	1,000,000,000.00	50 unit	1,000,000,000.00	201 unit	4,344,000,000.00	Dinas Kelautan dan Perikanan
			2.00	08	01	027	Pembinaan Daya Saing Hasil Kelautan dan Perikanan yang Inovatif, Produktif dan Kompetitif serta Sertifikasi Kelayakan Pengolah	Jumlah unit usaha pengolahan yang mendapatkan pembinaan daya saing Jumlah Sertifikat Kelayakan	unit usaha SKP	70 unit usaha 70 SKP	266,425,000.00	0 unit usaha 0 SKP	0.00 0 SKP	0 unit usaha 0 SKP	0.00 0 SKP	0 unit usaha 0 SKP	70 unit usaha 70 SKP	266,425,000.00	Dinas Kelautan dan Perikanan	
			2.00	08	01	028	Layanan pengujian Laboratorium dalam rangka pemenuhan standar mutu produk dan pemasaran	Jumlah hasil uji Sampel Yang dilakukan pengujian mutu	hasil uji mutu	70 hasil uji mutu	1,500,000,000.00	0 hasil uji mutu	0.00	0 hasil uji mutu	0.00	0 hasil uji mutu	0.00	70 hasil uji mutu	1,500,000,000.00	Dinas Kelautan dan Perikanan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD Penanggung Jawab	
									Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
			2.00	08	01	029	Pengelolaan Kemitraan dalam rangka peningkatan Daya Saing dan Pemasaran	Jumlah pemasok dan distributor kemitraan	unit	10 unit	95,525,000.00	0 unit	0.00	0 unit	0.00	0 unit	0.00	0 unit	0.00	10 unit	95,525,000.00	Dinas Kelautan dan Perikanan
			2.00	08	01	030	Koordinasi lintas sektor dalam rangka peningkatan Daya Saing dan Kerjasama Tata Niaga Pemasaran	Jumlah peserta koordinasi	orang	60 orang	48,600,000.00	0 orang	0.00	0 orang	0.00	0 orang	0.00	0 orang	0.00	60 orang	48,600,000.00	Dinas Kelautan dan Perikanan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											PD Penanggung Jawab		
									Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
			2.00	08	01	032	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan dan Pengolahan Hasil Perikanan	Jumlah usaha pengolahan yang mendapatkan Pembudidayaan Ikan dan Pengolahan Hasil Perikanan yang mendapatkan pengawasan	unit usaha	20 unit usaha		20 unit usaha	20 unit usaha		20 unit usaha		20 unit usaha		20 unit usaha	100 unit usaha		Dinas Kelautan dan Perikanan
										146,098,000.00		300,000,000.00	300,000,000.00		300,000,000.00		300,000,000.00		300,000,000.00		1,346,098,000.00	
										100 unit usaha		100 unit usaha	100 unit usaha		100 unit usaha		100 unit usaha		100 unit usaha	500 unit usaha		
			2.00	08	01	033	Rehabilitasi sarana dan prasarana pengolahan Hasil Perikanan (DAK)	Jumlah bantuan peralatan pengolahan Jumlah perbaikan bangunan pengolahan unit pengolahan ikan skala mikro dan skala kecil Jumlah pabrik es yang direhabilitasi	Unit	0 Unit		10 Unit	10 Unit		10 Unit		10 Unit		10 Unit	40 Unit		Dinas Kelautan dan Perikanan
										0.00		10 Unit	3,960,000,000.00	10 Unit	3,960,000,000.00		10 Unit		3,960,000,000.00	40 Unit		15,840,000,000.00
										0 unit		5 unit	5 unit		5 unit		5 unit		5 unit	20 unit		
			2.00	08	01	034	Pengelolaan unit perbenihan yang sesuai standar mutu	Jumlah pengendalian kualitas lingkungan perikanan budidaya perbenihan sarana dan prasarana perbenihan yang direhabilitasi Jumlah induk unggul yang menghasilkan benih	Unit	0 Unit		8 Unit	8 Unit		8 Unit		8 Unit		8 Unit	40 Unit		Dinas Kelautan dan Perikanan
										0 Unit		8 Unit	8 Unit		8 Unit		8 Unit		8 Unit	32 Unit		1,896,000,000.00
										0 Ekor		750 Ekor	750 Ekor		750 Ekor		750 Ekor		750 Ekor	3750 Ekor		
Meningkatkan produksi dan nilai tambah produk perikanan yang berdaya saing	Meningkatnya produksi perikanan dengan menambah jumlah faktor produksi dan produktivitas produksi	Produksi perikanan kelompok nelayan Produksi Perikanan Cakupan Bina Kelompok Nelayan	2.00	08	02		PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI KELAUTAN DAN PERIKANAN	Jumlah produksi perikanan tangkap Produksi Perikanan Jumlah produksi garam rakyat	363.853 Ton	369365 Ton		374981 Ton	380743 Ton		386644 Ton		392318 Ton		392318 Ton			Dinas Kelautan dan Perikanan
									3.531.233.6 Ton	4656858 Ton	1,652,742,400.00	5088024 Ton	2,398,000,000.00	5559907 Ton	2,598,000,000.00	6076403 Ton	2,899,000,000.00	6641782 Ton	2,999,000,000.00	6641782 Ton	12,546,742,400.00	
									86.834.94 Ton	91176.69 Ton		95735.52 Ton		100522.3 Ton	105548.41 Ton		110825.83 Ton		110825.83 Ton			
			2.00	08	02	001	Penyusunan Standarisasi Fasilitas Pelabuhan Perikanan Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen standarisasi fasilitas Pelabuhan Perikanan Kewenangan	dokumen	1 dokumen	52,450,000.00	0 dokumen	0.00	0 dokumen	0.00	0 dokumen	0.00	0 dokumen	0.00	1 dokumen	52,450,000.00	Dinas Kelautan dan Perikanan
			2.00	08	02	002	Pemantauan Penerapan CPIB dan pembinaan UPR serta panti benih	Jumlah unit usaha perbenihan yang melakukan penerapan CPIB	unit usaha perbenihan	70 Unit Usaha Perbenihan	261,257,400.00	0 Unit Usaha Perbenihan	0.00	0 Unit Usaha Perbenihan	0.00	0 Unit Usaha Perbenihan	0.00	0 Unit Usaha Perbenihan	0.00	70 Unit Usaha Perbenihan	261,257,400.00	Dinas Kelautan dan Perikanan
			2.00	08	02	003	Verifikasi data pendukung Rekomendasi Teknis Pelabuhan Perikanan Wilayah 1	Jumlah capaian verifikasi data pendukung penerbitan rekomendasi teknis pelabuhan	Laporan per triwulan	4 Laporan per Triwulan	26,000,000.00	0 Laporan per Triwulan	0.00	0 Laporan per Triwulan	0.00	0 Laporan per Triwulan	0.00	0 Laporan per Triwulan	0.00	4 Laporan per Triwulan	26,000,000.00	Dinas Kelautan dan Perikanan
			2.00	08	02	004	Verifikasi data pendukung Rekomendasi Teknis Pelabuhan Perikanan Wilayah 2	Jumlah Laporan verifikasi data pendukung untuk pelayanan rekomendasi teknis di pelabuhan perikanan	Laporan Triwulan	4 Laporan Triwulan	75,000,000.00	0 Laporan Triwulan	0.00	0 Laporan Triwulan	0.00	0 Laporan Triwulan	0.00	0 Laporan Triwulan	0.00	4 Laporan Triwulan	75,000,000.00	Dinas Kelautan dan Perikanan
			2.00	08	02	005	Penyediaan dan pembesaran induk Unggul Ikan Air Tawar beserta pakan (Instalasi Lajoa)	Jumlah calon induk yang dibesarkan	ekor	200000 ekor	574,100,000.00	0 ekor	0.00	0 ekor	0.00	0 ekor	0.00	0 ekor	0.00	200000 ekor	574,100,000.00	Dinas Kelautan dan Perikanan
			2.00	08	02	007	Pembinaan Teknis Operasional Pelabuhan dan kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Wilayah 2	Jumlah pengelola pelabuhan perikanan yang mendapatkan pembinaan teknis operasional pelabuhan dan kesyahbandaran pelabuhan perikanan	unit syahbandar	12 unit syahbandar	93,750,000.00	0 unit syahbandar	0.00	0 unit syahbandar	0.00	0 unit syahbandar	0.00	0 unit syahbandar	0.00	12 unit syahbandar	93,750,000.00	Dinas Kelautan dan Perikanan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD Penanggung Jawab
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		
							Target (8)	Rp (9)	Target (10)	Rp (11)	Target (12)	Rp (13)	Target (14)	Rp (15)	Target (16)	Rp (17)	Target (18)	Rp (19)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			2.000802010	Koordinasi Teknis Pengelolaan Perikanan Budidaya (Penerapan dan Surveilens CIBB)	Jumlah peserta koordinasi teknis pengelola Perikanan Budidaya	orang	60 orang	77,660,000.00	0 orang	0.00	0 orang	0.00	0 orang	0.00	0 orang	0.00	60 orang	77,660,000.00	Dinas Kelautan dan Perikanan
			2.000802011	Koordinasi Teknis Pengelolaan Perikanan Tangkap	koordinasi teknis pengelolaan perikanan	orang	60 orang	36,275,000.00	0 orang	0.00	0 orang	0.00	0 orang	0.00	0 orang	0.00	60 orang	36,275,000.00	Dinas Kelautan dan Perikanan
			2.000802013	Pembinaan teknis tata kelola dan layanan pelabuhan perikanan wilayah 1	Jumlah pengelola pelabuhan perikanan yang mendapatkan pembinaan teknis	unit pengelola PP	2 unit pengelola PP	82,850,000.00	0 unit pengelola PP	0.00	0 unit pengelola PP	0.00	0 unit pengelola PP	0.00	0 unit pengelola PP	0.00	2 unit pengelola PP	82,850,000.00	Dinas Kelautan dan Perikanan
			2.000802014	Pembinaan teknis tata kelola dan layanan pelabuhan perikanan wilayah 2	Jumlah pengelola pelabuhan perikanan yang mendapatkan pembinaan teknis	Unit pengelola PP	3 Unit pengelola PP	113,800,000.00	0 Unit pengelola PP	0.00	0 Unit pengelola PP	0.00	0 Unit pengelola PP	0.00	0 Unit pengelola PP	0.00	3 Unit pengelola PP	113,800,000.00	Dinas Kelautan dan Perikanan
			2.000802017	Verifikasi data dukung penerbitan rekomendasi teknis perizinan usaha perikanan tangkap	Jumlah laporan verifikasi data dukung penerbitan rekomendasi teknis perizinan usaha perikanan tangkap	laporan	2700 laporan	30,000,000.00	0 laporan	0.00	0 laporan	0.00	0 laporan	0.00	0 laporan	0.00	2700 laporan	30,000,000.00	Dinas Kelautan dan Perikanan
			2.000802018	Koordinasi Teknis Tata Kelola Pelabuhan Perikanan	Jumlah peserta koordinasi teknis tata kelola pelabuhan perikanan	orang	60 orang	14,350,000.00	0 orang	0.00	0 orang	0.00	0 orang	0.00	0 orang	0.00	60 orang	14,350,000.00	Dinas Kelautan dan Perikanan
			2.000802019	Perlindungan dan Fasilitas Akses Usaha Pembudidaya	Jumlah usaha pembudidaya yang terdata dan terfasilitasi perlindungan dan akses usaha modal	orang	60 orang	124,000,000.00	0 orang	0.00	0 orang	0.00	0 orang	0.00	0 orang	0.00	60 orang	124,000,000.00	Dinas Kelautan dan Perikanan
			2.000802021	Identifikasi Dan Monitoring Penerapan LogBook Kapal Perikanan dan Data Keragaan Kapal Perikanan	Jumlah laporan identifikasi dan monitoring	laporan	4 laporan	51,250,000.00	0 laporan	0.00	0 laporan	0.00	0 laporan	0.00	0 laporan	0.00	4 laporan	51,250,000.00	Dinas Kelautan dan Perikanan
			2.000802023	Perlindungan dan Fasilitas Akses Usaha Nelayan	Jumlah usaha nelayan yang terdata dan terfasilitasi perlindungan dan akses usaha modal	orang	60 orang	40,000,000.00	0 orang	0.00	0 orang	0.00	0 orang	0.00	0 orang	0.00	60 orang	40,000,000.00	Dinas Kelautan dan Perikanan
			2.000802024	Pengelolaan pelabuhan perikanan dalam rangka optimalisasi produksi	Jumlah Layanan Operasional di pelabuhan perikanan wilayah 2 Jumlah Layanan Operasional pelabuhan perikanan wilayah 1	Unit Unit	0 Unit 0 Unit	0.00	5 Unit 5 Unit	1,000,000,000.00	7 Unit 7 Unit	1,200,000,000.00	9 Unit 9 Unit	1,400,000,000.00	10 Unit 10 Unit	1,500,000,000.00	600 Unit 600 Unit	5,100,000,000.00	Dinas Kelautan dan Perikanan
			2.000802025	Koordinasi dan pembinaan teknis peningkatan produksi Kelautan dan Perikanan	Jumlah peserta koordinasi dan pembinaan teknis peningkatan produksi Garam Jumlah peserta koordinasi dan pembinaan teknis peningkatan produksi olahan Jumlah peserta koordinasi dan pembinaan teknis peningkatan produksi perikanan budidaya	Orang Orang Orang	0 Orang 0 Orang 0 Orang	0.00	720 Orang 1260 Orang 1260 Orang	1,398,000,000.00	720 Orang 1260 Orang 1260 Orang	1,398,000,000.00	720 Orang 1260 Orang 1260 Orang	1,499,000,000.00	720 Orang 1260 Orang 1260 Orang	1,499,000,000.00	2880 Orang 5040 Orang 5040 Orang	5,794,000,000.00	Dinas Kelautan dan Perikanan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD Penanggung Jawab
									Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		
									Target (8)	Rp (9)	Target (10)	Rp (11)	Target (12)	Rp (13)	Target (14)	Rp (15)	Target (16)	Rp (17)	Target (18)	Rp (19)	
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
							Jumlah peserta koordinasi dan pembinaan teknis peningkatan produksi perikanan tangkap	Orang	0 Orang		1260 Orang		1260 Orang		1260 Orang		1260 Orang		5040 Orang		
Meningkatkan produksi dan nilai tambah produk perikanan yang berdaya saing	Meningkatnya konsumsi ikan dan daya saing produk kelautan dan perikanan	Kontribusi Ekspor Perikanan Kontribusi Ekspor Perikanan Konsumsi Ikan	2.00	08	03	PROGRAM PENERAPAN MUTU, PENGEMBANGAN USAHA DAN DAYA SAING	Volume ekspor produk KP Nilai ekspor produk KP Produksi Olahan Konsumsi dan Jumlah peserta usaha yang menerapkan cara penanganan	130.623.1 Ton 340.390.4 US\$ Juta 25.648.77 Ton	143685.41 Ton 374429.44 US\$ Juta 26931.21 Ton	302,860,000.00	158053.95 Ton 411872.38 US\$ Juta 28277.77 Ton	3,270,000,000.00	173859.35 Ton 453059.62 US\$ Juta 29691.66 Ton	3,370,000,000.00	191245.28 Ton 498365.58 US\$ Juta 31176.24 Ton	3,470,000,000.00	200154 Ton 548202.14 US\$ Juta 32735.05 Ton	3,670,000,000.00	200154 Ton 548202.14 US\$ Juta 32735.05 Ton	14,082,860,000.00	Dinas Kelautan dan Perikanan
			2.00	08	03	001	Penanganan Mutu di pelabuhan perikanan Wilayah 1	orang	30 orang	108,600,000.00	0 orang	0.00	0 orang	0.00	0 orang	0.00	0 orang	0.00	30 orang	108,600,000.00	Dinas Kelautan dan Perikanan
			2.00	08	03	002	Penanganan Mutu di pelabuhan perikanan Wilayah 2	orang	30 orang	106,600,000.00	0 orang	0.00	0 orang	0.00	0 orang	0.00	0 orang	0.00	30 orang	106,600,000.00	Dinas Kelautan dan Perikanan
			2.00	08	03	003	Perlindungan dan fasilitasi akses usaha pengolahan hasil kelautan dan perikanan	orang	629 orang	57,660,000.00	0 orang	0.00	0 orang	0.00	0 orang	0.00	0 orang	0.00	629 orang	57,660,000.00	Dinas Kelautan dan Perikanan
			2.00	08	03	004	Verifikasi data dukung penerbitan rekomendasi teknis perizinan usaha pengolahan dan pemasar	laporan	100 laporan	30,000,000.00	0 laporan	0.00	0 laporan	0.00	0 laporan	0.00	0 laporan	0.00	100 laporan	30,000,000.00	Dinas Kelautan dan Perikanan
			2.00	08	03	005	Layanan pengujian Laboratorium dalam rangka pemenuhan standar mutu produk dan pemasaran	Hasil Uji Mutu UPI	0 Hasil uji mutu 0 UPI	0.00	100 Hasil uji mutu 100 UPI	2,000,000,000.00	100 Hasil uji mutu 100 UPI	2,100,000,000.00	100 Hasil uji mutu 100 UPI	2,200,000,000.00	100 Hasil uji mutu 100 UPI	2,400,000,000.00	400 Hasil uji mutu 400 UPI	8,700,000,000.00	Dinas Kelautan dan Perikanan
			2.00	08	03	007	Pembinaan Daya Saing Hasil Kelautan dan Perikanan yang Inovatif, Produktif dan Kompetitif serta Sertifikasi Kelayakan Pengolah	Unit Usaha	0 Unit Usaha	0.00	70 Unit Usaha	70,000,000.00	70 Unit Usaha	70,000,000.00	70 Unit Usaha	70,000,000.00	70 Unit Usaha	70,000,000.00	280 Unit Usaha	280,000,000.00	Dinas Kelautan dan Perikanan
			2.00	08	03	010	Penetapan standar produk perikanan untuk memenuhi persyaratan ekspor	Dukungan Fasilitasi Persyaratan sertifikasi produk hasil perikanan Dukungan Fasilitasi Persyaratan sertifikasi perikanan tangkap Dukungan Fasilitasi Persyaratan sertifikasi perikanan budidaya	Unit Usaha Unit Usaha Unit Usaha	0 Unit Usaha 0 Unit Usaha 0 Unit Usaha	70 Unit Usaha 25 Unit Usaha 25 Unit Usaha	70 Unit Usaha 1,200,000,000.00 25 Unit Usaha	70 Unit Usaha 25 Unit Usaha 25 Unit Usaha	70 Unit Usaha 1,200,000,000.00 25 Unit Usaha	70 Unit Usaha 1,200,000,000.00 25 Unit Usaha	70 Unit Usaha 1,200,000,000.00 25 Unit Usaha	280 Unit Usaha 100 Unit Usaha 100 Unit Usaha	4,800,000,000.00		Dinas Kelautan dan Perikanan	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											PD Penanggung Jawab	
									Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Meningkatkan kelestarian dan kualitas lingkungan sumberdaya kelautan dan perikanan	Meningkatnya kelestarian dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya alam kelautan dan perikanan	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (				PROGRAM PENGAWASAN, KONSERVASI, PENATAAN DAN REHABILITASI PESISIR DAN LAUT	Cakupan luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan	101.437 Ha	941210.88 Ha		1008321.53 Ha		1034535.52 Ha		1037262.09 Ha		1038850.36 Ha		1038850.36 Ha		
Meningkatkan produksi dan nilai tambah produk perikanan yang berdaya saing	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pelaku usaha kelautan dan perikanan	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial	2.00	08	04		% Penurunan tindakan IUU Fishing	11.6%	9.83 %	11,099,415,500.00	8.03 %	11,560,000,000.00	7.19 %	11,787,000,000.00	6.31 %	10,960,000,000.00	5.4 %	11,245,000,000.00	5.4 %	56,651,415,500.00	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Nilai Tukar Nelayan (NTN)					Lakapan Jumlah Sarana dan Prasarana Yang Tersedia di Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil	2%	20 %		40 %		60 %		80 %		100 %		100 %		
			2.00	08	04	001	Pengadaan sarana dan prasarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (DAK)	unit	7 unit	4,191,000,000.00	5 unit	3,600,000,000.00	5 unit	3,827,000,000.00	5 unit	3,000,000,000.00	5 unit	3,285,000,000.00	37 unit	17,903,000,000.00	Dinas Kelautan dan Perikanan
			2.00	08	04	002	Pembangunan/Rehabilitasi prasarana Kawasan Konservasi Perairan atau Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan prasarana di Pulau-Pulau Kecil	unit	2 unit	1,646,754,700.00	5 unit	1,700,000,000.00	5 unit	1,700,000,000.00	5 unit	1,700,000,000.00	5 unit	1,700,000,000.00	22 unit	8,446,754,700.00	Dinas Kelautan dan Perikanan
			2.00	08	04	003	Pengelolaan Kawasan Perairan dan Pesisir, Pulau-Pulau Kecil Wilayah Kepulauan Selayar	unit	1 unit	100,000,000.00	0 unit	0.00	0 unit	0.00	0 unit	0.00	0 unit	0.00	1 unit	100,000,000.00	Dinas Kelautan dan Perikanan
			2.00	08	04	004	Pengelolaan Kawasan Perairan dan Pesisir, Pulau-Pulau Kecil Wilayah Mamminasata	unit	1 unit	111,581,500.00	0 unit	0.00	0 unit	0.00	0 unit	0.00	0 unit	0.00	1 unit	111,581,500.00	Dinas Kelautan dan Perikanan
			2.00	08	04	005	Pengelolaan Kawasan Perairan dan Pesisir, Pulau-Pulau Kecil Wilayah Pangkep	unit	1 unit	160,000,000.00	0 unit	0.00	0 unit	0.00	0 unit	0.00	0 unit	0.00	1 unit	160,000,000.00	Dinas Kelautan dan Perikanan
			2.00	08	04	006	Pengelolaan Kawasan Perairan dan Pesisir, Pulau-Pulau Kecil Wilayah Ajatappareng	unit	1 unit	138,145,000.00	0 unit	0.00	0 unit	0.00	0 unit	0.00	0 unit	0.00	10 unit	138,145,000.00	Dinas Kelautan dan Perikanan
			2.00	08	04	007	Pengelolaan Kawasan Perairan dan Pesisir, Pulau-Pulau Kecil Wilayah Bosowasi	unit	1 unit	100,000,000.00	0 unit	0.00	0 unit	0.00	0 unit	0.00	0 unit	0.00	1 unit	100,000,000.00	Dinas Kelautan dan Perikanan
			2.00	08	04	008	Pengelolaan Kawasan Perairan dan Pesisir, Pulau-Pulau Kecil Wilayah Luwu Raya	unit	1 unit	400,000,000.00	0 unit	0.00	0 unit	0.00	0 unit	0.00	0 unit	0.00	1 unit	400,000,000.00	Dinas Kelautan dan Perikanan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD Penanggung Jawab			
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
			2.00	08	04	009	Penyusunan Dokumen Rencana Pengelolaan dan Rencana Aksi WP3K Prov. Sulsel	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan dan Rencana Aksi Wilayah Pesisir dan Pulau -	dokumen	1 dokumen	146,640,000.00	0 dokumen	0.00	0 dokumen	0.00	0 dokumen	0.00	0 dokumen	0.00	1 dokumen	146,640,000.00	Dinas Kelautan dan Perikanan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD Penanggung Jawab		
									Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD	
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			2.00	08	04	010	Penyusunan Regulasi Pengelolaan kawasan Konservasi dan Penataan Ruang Laut, pesisir dan Pulau - Pulau Kecil	regulasi	1 regulasi	174,350,000.00	0 regulasi	0.00	0 regulasi	0.00	0 regulasi	0.00	0 regulasi	0.00	1 regulasi	174,350,000.00	Dinas Kelautan dan Perikanan
			2.00	08	04	011	Pelestarian Biota Laut yang di lindungi	jenis	1 jenis	63,760,000.00	0 jenis	0.00	0 jenis	0.00	0 jenis	0.00	0 jenis	0.00	1 jenis	63,760,000.00	Dinas Kelautan dan Perikanan
			2.00	08	04	012	Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Pemanfaatan Ekosistem Perikanan Wilayah Mamminasata	Jumlah luasan rehabilitasi ekosistem mangrove	Ha	2 Ha	0 Ha		0 Ha		0 Ha		0 Ha		2 Ha		Dinas Kelautan dan Perikanan
							Jumlah luasan rehabilitasi ekosistem terumbu karang	Ha	1 Ha	380,000,000.00	0 Ha	0.00	0 Ha	0.00	0 Ha	0.00	0 Ha	0.00	1 Ha	380,000,000.00	
							Jumlah luasan rehabilitasi ekosistem padang lamun	Ha	2 Ha		0 Ha		0 Ha		0 Ha		0 Ha		2 Ha		
			2.00	08	04	013	Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Pemanfaatan Ekosistem Perikanan Wilayah Selatan	Jumlah luasan rehabilitasi ekosistem mangrove	Ha	2 Ha	0 Ha		0 Ha		0 Ha		0 Ha		2 Ha		Dinas Kelautan dan Perikanan
							Jumlah luasan rehabilitasi ekosistem terumbu karang	Ha	1 Ha	264,300,000.00	0 Ha	0.00	0 Ha	0.00	0 Ha	0.00	0 Ha	0.00	1 Ha	264,300,000.00	
							Jumlah luasan rehabilitasi ekosistem padang lamun	Ha	2 Ha		0 Ha		0 Ha		0 Ha		0 Ha		2 Ha		
			2.00	08	04	014	Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Pemanfaatan Ekosistem Perikanan Wilayah Kepulauan Selayar	Jumlah luasan rehabilitasi ekosistem mangrove	Ha	2 Ha	0 Ha		0 Ha		0 Ha		0 Ha		2 Ha		Dinas Kelautan dan Perikanan
							Jumlah luasan rehabilitasi ekosistem terumbu karang	Ha	1 Ha	105,000,000.00	0 Ha	0.00	0 Ha	0.00	0 Ha	0.00	0 Ha	0.00	1 Ha	105,000,000.00	
							Jumlah luasan rehabilitasi ekosistem padang lamun	Ha	2 Ha		0 Ha		0 Ha		0 Ha		0 Ha		2 Ha		
			2.00	08	04	015	Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Pemanfaatan Ekosistem Perikanan Wilayah Pangkep	Jumlah luasan rehabilitasi ekosistem mangrove	Ha	2 Ha	0 Ha		0 Ha		0 Ha		0 Ha		2 Ha		Dinas Kelautan dan Perikanan
							Jumlah luasan rehabilitasi ekosistem terumbu karang	Ha	1 Ha	110,000,000.00	0 Ha	0.00	0 Ha	0.00	0 Ha	0.00	0 Ha	0.00	1 Ha	110,000,000.00	
							Jumlah luasan rehabilitasi ekosistem padang lamun	Ha	2 Ha		0 Ha		0 Ha		0 Ha		0 Ha		2 Ha		
			2.00	08	04	016	Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Pemanfaatan Ekosistem Perikanan Wilayah Ajatappareng	Jumlah luasan rehabilitasi ekosistem mangrove	Ha	2 Ha	0 Ha		0 Ha		0 Ha		0 Ha		2 Ha		Dinas Kelautan dan Perikanan
							Jumlah luasan rehabilitasi ekosistem terumbu karang	Ha	1 Ha	268,280,000.00	0 Ha	0.00	0 Ha	0.00	0 Ha	0.00	0 Ha	0.00	1 Ha	268,280,000.00	
							Jumlah luasan rehabilitasi ekosistem padang lamun	Ha	2 Ha		0 Ha		0 Ha		0 Ha		0 Ha		2 Ha		
			2.00	08	04	017	Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Pemanfaatan Ekosistem Perikanan Wilayah Bosowasi	Jumlah luasan rehabilitasi ekosistem mangrove	Ha	2 Ha	0 Ha		0 Ha		0 Ha		0 Ha		2 Ha		Dinas Kelautan dan Perikanan
							Jumlah luasan rehabilitasi ekosistem padang lamun	Ha	2 Ha	135,000,000.00	0 Ha	0.00	0 Ha	0.00	0 Ha	0.00	0 Ha	0.00	2 Ha	135,000,000.00	
							Jumlah luasan rehabilitasi ekosistem terumbu karang	Ha	1 Ha		0 Ha		0 Ha		0 Ha		0 Ha		1 Ha		
			2.00	08	04	018	Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Pemanfaatan Ekosistem Perikanan Wilayah Luwu Raya	Jumlah luasan rehabilitasi ekosistem mangrove	Ha	2 Ha	0 Ha		0 Ha		0 Ha		0 Ha		2 Ha		Dinas Kelautan dan Perikanan
							Jumlah luasan rehabilitasi ekosistem padang lamun	Ha	2 Ha	183,000,000.00	0 Ha	0.00	0 Ha	0.00	0 Ha	0.00	0 Ha	0.00	2 Ha	183,000,000.00	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD Penanggung Jawab	
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
					Jumlah luasan rehabilitasi ekosistem terumbu karang	Ha	1 Ha		0 Ha		0 Ha		0 Ha		0 Ha		1 Ha			
			2.00	08	04	019	Pengawasan IUU Fishing dan pemantauan kapal perikanan Wilayah Mamminasata	Jumlah pengawasan IUU Fishing dan pemantauan kapal perikanan	6 kali pengawasan	161,229,900.00	0 kali pengawasan	0.00	0 kali pengawasan	0.00	0 kali pengawasan	0.00	6 kali pengawasan	161,229,900.00	Dinas Kelautan dan Perikanan	
			2.00	08	04	020	Pengawasan IUU Fishing dan pemantauan kapal perikanan Wilayah Selatan	Jumlah lokasi pengawasan IUU Fishing dan pemantauan kapal perikanan	10 kali pengawasan	205,000,000.00	0 kali pengawasan	0.00	0 kali pengawasan	0.00	0 kali pengawasan	0.00	10 kali pengawasan	205,000,000.00	Dinas Kelautan dan Perikanan	
			2.00	08	04	021	Pengawasan IUU Fishing dan pemantauan kapal perikanan Wilayah Kepulauan Selayar	Jumlah lokasi pengawasan IUU Fishing dan pemantauan kapal perikanan	6 kali pengawasan	257,260,000.00	0 kali pengawasan	0.00	0 kali pengawasan	0.00	0 kali pengawasan	0.00	6 kali pengawasan	257,260,000.00	Dinas Kelautan dan Perikanan	
			2.00	08	04	022	Pengawasan IUU Fishing dan pemantauan kapal perikanan Wilayah Pangkajene Kepulauan	Jumlah lokasi pengawasan IUU Fishing dan pemantauan kapal perikanan	10 kali pengawasan	284,000,000.00	0 kali pengawasan	0.00	0 kali pengawasan	0.00	0 kali pengawasan	0.00	10 kali pengawasan	284,000,000.00	Dinas Kelautan dan Perikanan	
			2.00	08	04	023	Pengawasan IUU Fishing dan pemantauan kapal perikanan Wilayah Ajatappareng	Jumlah lokasi pengawasan IUU Fishing dan pemantauan kapal perikanan	6 kali pengawasan	203,130,000.00	0 kali pengawasan	0.00	0 kali pengawasan	0.00	0 kali pengawasan	0.00	6 kali pengawasan	203,130,000.00	Dinas Kelautan dan Perikanan	
			2.00	08	04	024	Pengawasan IUU Fishing dan pemantauan kapal perikanan Wilayah Bosowasi	Jumlah lokasi pengawasan IUU Fishing dan pemantauan kapal perikanan	7 kali pengawasan	201,985,000.00	0 kali pengawasan	0.00	0 kali pengawasan	0.00	0 kali pengawasan	0.00	7 kali pengawasan	201,985,000.00	Dinas Kelautan dan Perikanan	
			2.00	08	04	025	Pengawasan IUU Fishing dan pemantauan kapal perikanan Wilayah Luwu Raya	Jumlah lokasi pengawasan IUU Fishing dan pemantauan kapal perikanan	7 kali pengawasan	200,005,000.00	0 kali pengawasan	0.00	0 kali pengawasan	0.00	0 kali pengawasan	0.00	7 kali pengawasan	200,005,000.00	Dinas Kelautan dan Perikanan	
			2.00	08	04	026	Pemberdayaan Masyarakat Kelompok Pengawas Sumberdaya Kelautan dan Perikanan wilayah Mamminasata	Jumlah Pokmaswas yang diberdayakan	kelompok	10 kelompok	93,581,500.00	0 kelompok	0.00	0 kelompok	0.00	0 kelompok	0.00	10 kelompok	93,581,500.00	Dinas Kelautan dan Perikanan
			2.00	08	04	027	Pemberdayaan Masyarakat Kelompok Pengawas Sumberdaya Kelautan dan Perikanan wilayah Selatan	Jumlah Pokmaswas yang diberdayakan	kelompok	10 kelompok	168,963,000.00	0 kelompok	0.00	0 kelompok	0.00	0 kelompok	0.00	10 kelompok	168,963,000.00	Dinas Kelautan dan Perikanan
			2.00	08	04	029	Pemberdayaan Masyarakat sebagai Kelompok Pengawas Sumberdaya Kelautan dan Perikanan wilayah Bosowasi	Jumlah Pokmaswas yang diberdayakan	kelompok	10 kelompok	68,000,000.00	0 kelompok	0.00	0 kelompok	0.00	0 kelompok	0.00	10 kelompok	68,000,000.00	Dinas Kelautan dan Perikanan
			2.00	08	04	030	Pemberdayaan Masyarakat Kelompok Pengawas Sumberdaya Kelautan dan Perikanan wilayah Luwu Raya	Jumlah Pokmaswas yang diberdayakan	kelompok	10 kelompok	48,000,000.00	0 kelompok	0.00	0 kelompok	0.00	0 kelompok	0.00	10 kelompok	48,000,000.00	Dinas Kelautan dan Perikanan
			2.00	08	04	031	Pengawasan Terpadu SDKP	Koordinasi teknis Pengawasan dan ... Jumlah Pokmaswas yang diberdayakan Jumlah Pengawasan Biota Laut yang dilindungi Jumlah Lokasi Pengawasan Terpadu	Orang Kelompok Jenis Kali Pengawasan	0 Orang 0 Kelompok 0 Jenis 4 Kali Pengawasan	120 Orang 30 Kelompok 3 Jenis 0 Kali Pengawasan	120 Orang 30 Kelompok 3 Jenis 0 Kali Pengawasan	120 Orang 30 Kelompok 3 Jenis 0 Kali Pengawasan	120 Orang 30 Kelompok 3 Jenis 0 Kali Pengawasan	120 Orang 30 Kelompok 3 Jenis 0 Kali Pengawasan	480 Orang 120 Kelompok 12 Jenis 4 Kali Pengawasan	1,664,000,000.00	Dinas Kelautan dan Perikanan		
			2.00	08	04	032	Penyadaran Tindakan Destruktif Fishing kepada Nelayan	Jumlah nelayan yang mengikuti penyadaran hukum	orang	100 orang	81,100,000.00	0 orang	0.00	0 orang	0.00	0 orang	0.00	100 orang	81,100,000.00	Dinas Kelautan dan Perikanan
			2.00	08	04	033	Koordinasi Teknis Penataan Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Koordinasi teknis Penataan Ruang Laut Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	orang	60 orang	46,850,000.00	0 orang	0.00	0 orang	0.00	0 orang	0.00	60 orang	46,850,000.00	Dinas Kelautan dan Perikanan
			2.00	08	04	034	Koordinasi Teknis Pengawasan dan Pengendalian SDKP	koordinasi teknis Pengawasan dan Pengendalian SDKP	orang	60 orang	62,899,900.00	0 orang	0.00	0 orang	0.00	0 orang	0.00	60 orang	62,899,900.00	Dinas Kelautan dan Perikanan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													PD Penanggung Jawab		
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD					
							Target (8)	Rp (9)	Target (10)	Rp (11)	Target (12)	Rp (13)	Target (14)	Rp (15)	Target (16)	Rp (17)	Target (18)	Rp (19)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)			
			2.00	08	04	036	Pemberdayaan Masyarakat Kelompok Pengawas Sumberdaya Kelautan dan Perikanan wilayah Pangkep	Jumlah Pokmaswas yang diberdayakan	kelompok	10 kelompok	82,000,000.00	0 kelompok	0.00	0 kelompok	0.00	0 kelompok	0.00	10 kelompok	82,000,000.00	Dinas Kelautan dan Perikanan		
			2.00	08	04	037	Pemberdayaan Masyarakat Kelompok Pengawas Sumberdaya Kelautan dan Perikanan wilayah Ajatappareng	Jumlah Pokmaswas yang diberdayakan	kelompok	10 kelompok	33,600,000.00	0 kelompok	0.00	0 kelompok	0.00	0 kelompok	0.00	10 kelompok	33,600,000.00	Dinas Kelautan dan Perikanan		
			2.00	08	04	038	Pengelolaan kawasan konservasi, perairan P3K dan Pemanfaatan Ekosistem Perikanan	Jumlah rehabilitasi ekosistem sumberdaya KP	Ha	0 Ha		42 Ha		42 Ha		42 Ha		168 Ha		Dinas Kelautan dan Perikanan		
								Jumlah pengelolaan dan pembinaan pantai berseri	Wilayah	0 Wilayah	0.00	7 Wilayah	2,100,000,000.00	7 Wilayah	2,100,000,000.00	7 Wilayah	2,100,000,000.00	7 Wilayah	2,100,000,000.00		28 Wilayah	8,400,000,000.00
								Jumlah Tambatan Perahu didaerah pesisir yang dibangun	Unit	0 Unit		5 Unit		5 Unit		5 Unit		5 Unit			20 Unit	
			2.00	08	04	039	Penataan dan penyusunan rencana pengelolaan kawasan konservasi dan penataan ruang laut dan pulau-pulau kecil	Jumlah koordinasi teknis konservasi kawasan dan penataan ruang laut pesisir dan pulau-pulau kecil	Orang	0 Orang		120 Orang		120 Orang		120 Orang		480 Orang		Dinas Kelautan dan Perikanan		
								Jumlah penetapan pencadangan kawasan konservasi	Kawasan	0 Kawasan	0.00	3 Kawasan	300,000,000.00	3 Kawasan	300,000,000.00	3 Kawasan	300,000,000.00	3 Kawasan	300,000,000.00		12 Kawasan	1,200,000,000.00
								Jumlah regulasi konservasi dan penataan ruang laut pesisir dan pulau-pulau kecil	Regulasi	0 Regulasi		1 Regulasi		1 Regulasi		1 Regulasi		1 Regulasi			4 Regulasi	
			2.00	08	04	040	Pengawasan IUU fishing dan pemantauan kapal perikanan	Pengawasan IUU fishing dan pemantauan kapal perikanan	Wilayah	0 Wilayah	0.00	7 Wilayah	3,500,000,000.00	7 Wilayah	3,500,000,000.00	7 Wilayah	3,500,000,000.00	28 Wilayah	14,000,000,000.00	Dinas Kelautan dan Perikanan		
Grandtotal							75,429,977,368.00		75,600,946,774.54		78,403,041,891.43		79,423,822,196.90		82,210,835,209.86		391,068,623,440.73					

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pela
Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sulawesi Selatan**

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	T
					1
-1	-2	-3	-4	-5	-6
1	Meningkatkan produksi dan nilai tambah produk perikanan yang berdaya saing	Kontribusi PDRB Perikanan terhadap PDRB Sulsel			
1			Meningkatnya produksi perikanan dengan menambah jumlah faktor produksi dan produktivitas produksi	Produksi Perikanan Produksi perikanan kelompok nelayan Kontribusi PDRB Perikanan Cakupan Bina Kelompok Nelayan	5.117.387,52 ton 80010.21 ton 8.60% 23.91%
			Meningkatnya konsumsi ikan dan daya saing produk kelautan dan perikanan	Konsumsi Ikan Kontribusi Ekspor Perikanan	57.02 kg/kap/th 5.63%
			Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pelaku usaha kelautan dan perikanan	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	108.10%
4	Meningkatkan kelestarian dan kualitas lingkungan sumberdaya kelautan dan perikanan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup			
			Meningkatnya kelestarian dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan territorial	20%

			alam kelautan dan perikanan	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	49.66%
5	Meningkatkan Akuntabilitas Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi			BB
			Meningkatn ya akuntabilita s kinerja,pere ncanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah	Ni lai Sakip OPD Rata-rata CapaianKin erja PerangkatD aerah(Evalu asi DokumenPe rencanaan) %ASNNilai SKPKategor i Baik	80.85% 95%
					82%

nyanan
1 tahun 2018-2023

TARGET KINERJA PADA TAHUN KE -			
2	3	4	5
-7	-8	-9	-10
5.558.740,89 ton	6.041.173,54 ton	6.568.596,04 ton	7.145.295,69 ton
80810.31 ton	81618.41 ton	82434.6 ton	83258.94 ton
8.80%	9%	9.20%	9.30%
23.05%	26.04%	27.49%	28.80%
58.16 kg/kap/th	59.32 kg/kap/th	60.51 kg/kap/th	61.72 kg/kap/th
5.92%	6.21%	6.52%	6.85%
108.60%	109.10%	110.60%	112.10%
20%	20%	20%	20%

50.42%	51.19%	51.98%	52.80%
BB	BB	BB	A
80.87%	80.89%	80.91%	80.93%
95%	95%	95%	95%
83%	84%	85%	86%



RENSTRA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN

(REKAP PROGRAM)
TAHUN 2018-2023